

KABINET SJAHRIR I

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Dyonysius Osharjo

NIM : 971314012

NIRM : 970051120604120009

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2003

KABINET SJHRIR I

Oleh:


Dyonysius Osharjo

NIM: 971314012

NIRM: 970051120604120009

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. P.J. Suwarno, SH

Tanggal 21 Agustus 2003

Pembimbing II



Drs. Adisusilo Sutarjo J.R.

Tanggal 21 Agustus 2003

KABINET SJAHRIR I

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Dyonysius Osharjo

NIM: 971314012

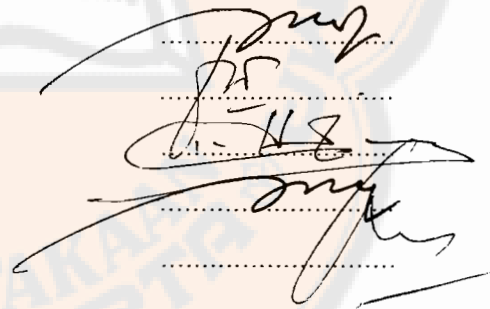
NIRM: 970051120604120009

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 21 Agustus 2003
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua : Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.
Sekretaris : Drs. B. Musidi, M. Pd
Anggota : Prof. Dr. P. J. Suwarno, S.H.
Anggota : Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.
Anggota : Drs. A.A. Padi



Yogyakarta, 21 Agustus 2003

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma



Drs. Slamet Soewandi, M.Pd.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Karya ini dipersembahkan bagi
semua yang telah membentuk aku:
kedua orangtua, guru-guru,
terutama yang tercinta:
Bapak Kaliktus Nambut (+)
Mama Veronika Mia
yang telah menghadirkan aku
dalam sejarah.



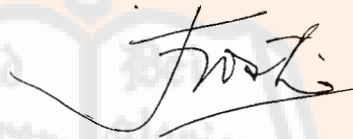
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 21 Agustus 2003

Penulis



Dyonysius Osharjo

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Judul : KABINET SJHRIR I

Oleh : Dyonysius Osharjo

Sebagai suatu negara yang baru merdeka, Negara Republik Indonesia belum memiliki orang-orang yang berpengalaman dalam mengelolah negara. Yang ada hanyalah orang-orang yang berpengalaman membantu Belanda dan kemudian Jepang dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Karena peranan orang-orang Indonesia pada waktu itu hanyalah membantu maka orang-orang Indonesia yang bekerja di bidang pemerintahan pada zaman Belanda dan Jepang tidak dalam posisi untuk menentukan kebijakan tetapi dalam posisi untuk menjalankan kebijakan dan administrasi seperti yang telah ditentukan baik oleh Belanda maupun kemudian oleh Jepang. Padahal sebagai suatu negara yang merdeka, Bangsa Indonesia harus bisa mengatur sendiri negaranya. Dalam kondisi yang serba kurang pengalaman seperti itu, Bangsa Indonesia berjuang mengatur sendiri negaranya dengan resiko bahwa pengelolaan negara belum bisa berjalan sempurna.

Untuk itu selalu ada usaha untuk menyempurnakan pemerintahan yang ada. Pembentukan kabinet Sjahrir I merupakan salah satu usaha untuk menyempurnakan pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Kabinet Presidensiil yang dibentuk pada awal kemerdekaan dianggap kurang demokratis, bahkan dalam padangan negara barat pemerintahan Kabinet Presidensiil bersifat fasis dan diktator. Karena kurang demokratis dan bersifat fasis dan diktator maka pemerintahan Kabinet Presidensiil ditentang baik dari dalam maupun dari luar negeri hal mana menyebabkan kabinet tidak bisa berfungsi dengan baik. Untuk itu maka dibentuklah suatu pemerintahan baru yang lebih demokratis sehingga bisa diterima baik di dalam maupun di luar negeri.

Penelitian yang dilakukan terhadap Kabinet Sjahrir I bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pembentukan Kabinet Sjahrir I, kemudian kiprahnya dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Selanjutnya dianalisis dan didekripsikan pula tentang tantangan yang dihadapi Kabinet dalam memimpin pemerintahan dan akhirnya jatuhnya Kabinet.

Dalam deskripsi tentang pembentukan kabinet dikemukakan beberapa situasi politik dan dasar yang melatarbelakangi pembentukan kabinet. Situasi yang dimaksud adalah situasi politik dalam negeri yang ditandai dengan perjuangan Bangsa Indonesia menentang berbagai usaha Belanda untuk menjajah kembali Indonesia dan situasi politik luar negeri yang mendukung pemerintahan yang demokratis di negara-negara yang baru merdeka. Selanjutnya dasar pembentukan kabinet dirujuk dari Maklumat No. X tentang perubahan status KNIP dari Badan Pembantu Presiden menjadi badan legislatif; Maklumat 3 Nopember tentang anjuran untuk membentuk partai politik; Pengumuman Badan Pekerja tanggal 11 Nopember tentang pertanggungjawaban menteri dan akhirnya Maklumat 14 Nopember tentang pembentukan Kabinet Sjahrir I. Ada dua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabinet Sjahrir I dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yaitu mencegah kembali berkuasanya Belanda di Indonesia dan bagaimana kabinet membangun militer, birokrasi pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Dalam melaksanakan pemerintahan kabinet mengalami dua tantangan besar yaitu tantangan dari dalam negeri dan dari luar negeri.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dari dalam negeri tantangan datang dari beberapa kelompok oposisi yang bergabung di dalam Persatuan Perjuangan di bawah pimpinan Tan Malaka. Sedangkan tantangan dari luar negeri berasal dari Belanda dan Inggris yang bekerjasama untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Tantangan-tantangan yang demikian besar tidak bisa ditanggung lagi oleh kabinet sehingga Kabinet Sjahrir I jatuh.

Kabinet Sjahrir I diteliti dengan menggunakan metode sejarah yang menggunakan empat tahap penelitian yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan akhirnya penulisan. Sedangkan untuk metode penulisan digunakan metode deskriptif analitis.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

Title : SJAHRIR I CABINET
By : Dyonysius Osharjo

As a new independent country, Republic of Indonesia has not have experienced people to manage this country. They just have experienced people to help Netherlands and then Japan in performing governmental administrative. Because Indonesian people role at that time, they just have helped so it did not make them to place as a decision maker at that age. But they just did what both Netherlands and Japan administrative instructed. Meanwhile as independent country, Indonesian country must manage themselves. In this less experienced condition, Indonesian country tried to manage themselves by the risk that this administrative run improperly.

Therefore it always has efforts to complete the existence government. Establishment on Sjahrir I Cabinet administrative that established in early independent supposed not democratic, even in West countries view, Presidential cabinet administrative were both fascist and dictator. Because it was far from democratic and called as fascist and dictator, so Presidential cabinet administrative was challenged by either-outside of inside of the own country which caused this cabinet administrative more democratic until it was received well from wherever.

This research that conducted on Sjahrir I Cabinet administrative was aimed to analyze and describe establishment this cabinet. Then the efforts in holding out and filling the independence. Furthermore, it was also analyzed and described about the challenge that was faced by cabinet in leading the administrative and then tell the fallilng of this cabinet.

In the description on cabinet establishment, it was said that some political situation and fundamental of background in this cabinet. This situation mean that political one in this country was signed by Indonesian struggle in fighting many Netherlands efforts to reoccupy Indonesia. And other situation was in overseas polilitic that supported democratic administrative in non independent country. Then fundamental of background in this cabinet was referred from Declaration Number X about change of status in KNIP from Presidential Assistant Broad into Legislative Council; Declaration on 3 November was about instruction to make political party; announcement Working Council on 11 November was about responsibility of ministry and then Declaration on 14 November was about Sjahrir I Cabinet establishment. There were two activities forms that conducted by Sjahrir I Cabinet in keeping and filling independence, that is, to avoid reoccupation of Netherlands in Indonesia and how cabinet built military, administrative bueaucracy, and economy in this country. In conducting a cabinet administrative, it experienced two big challenges, that is, either outside or inside of the country. From inside of the country, it came from some opposition parties that joined in *Persatuan Perjuangan* under Tan Malaka. While outside of country, it came from Netherlands and England that cooperated to bring back Netherlands occupation in Indonesia. Those challenges were so hard to be handled by sjahrir I Cabinet, then they had failed.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sjahrir I Cabinet was examined by using historical method that has four research stages, that is, collecting sources, critic of sources, interpretation and then writing. And the writing use descriptive-analytic method.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Periode tahun 1945-1950 dalam sejarah Bangsa Indonesia ditandai oleh berbagai peristiwa penting baik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan maupun dalam sejarah ketatanegaraan. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan terjadi pertempuran melawan Belanda dan Sekutu di Semarang, Surabaya, Ambarawa dan di berbagai tempat lainnya. Dalam sejarah ketatanegaraan, pada periode ini disusun UUD Negara Republik Indonesia dan berbagai jenis peraturan perundang-undangan lainnya.

Skripsi dengan judul KABINET SJAHRIR I ini menguraikan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Bangsa Indonesia yaitu dibentuknya Kabinet Sjahrir I yang berbentuk parlementer di dalam bingkai UUD 1945 yang mengatur sistem pemerintahan Indonesia yang presidensiil. Peristiwa pembentukan Kabinet Sjahrir I walaupun oleh banyak kalangan dianggap menyimpang dari UUD 1945 tetapi telah memberikan sumbangan berarti dalam sejarah perjuangan bangsa dan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. P.J. Suwarno, SH dan Bapak Drs. Adisusilo Sutarjo J R, yang telah membimbing dan menyempurnakan karya ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada segenap dosen Program studi Pendidikan Sejarah yang mendidik penulis untuk memahami dan mencintai sejarah.

Terimakasih kepada para pengurus Perpustakaan Nasional Jakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta serta perpustakaan Universitas Sanata Dharma dan Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyediakan dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengisinkan penulis untuk mencari dan memanfaatkan bahan-bahan tulisan yang ada di perpustakaan.

Terimakasih kepada lembaga keuskupan Ruteng dan Seminari Pius XII Kisol yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan lanjut di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Terimakasih kepada keluarga baik yang ada di Flores, di Jogja maupun di Jakarta yang telah memberikan dorongan kepada penulis selama belajar di Universitas Sanata Dharma.

Terimakasih banyak pula disampaikan kepada rekan-rekan sekomunitas: Rm. Bone Rampung, Pr, Rm. Sindus Tae, Pr, Rm. Yosef Berek, Pr (alm.), Rm. Yan Seran, Pr, Rm. Silvinus Fe, Pr, Rm. Emil Sarimas, Pr, Rm. Ansy Syukur Pr, Frater Didi, Fr. Eman dan Fr. Don yang telah menciptakan suasana persaudaraan sehingga penulis merasa diterima sebagai saudara dalam komunitas.

Terimakasih pula kepada kelompok diskusi PASSY (Persaudaraan Alumni SMU St. Klaus Yogyakarta) yang selalu menjadi teman bicara yang menarik untuk memperbincangkan dan mensharingkan sejarah kehidupan yang penuh makna.

Akhirnya dan yang paling penting terimakasih kepada DIA, yang telah membimbing dan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada penulis untuk melakoni sejarah hidupku. Kepada Dialah sejarah kehidupan dipersembahkan.

Penulis

DAFTAR ISI



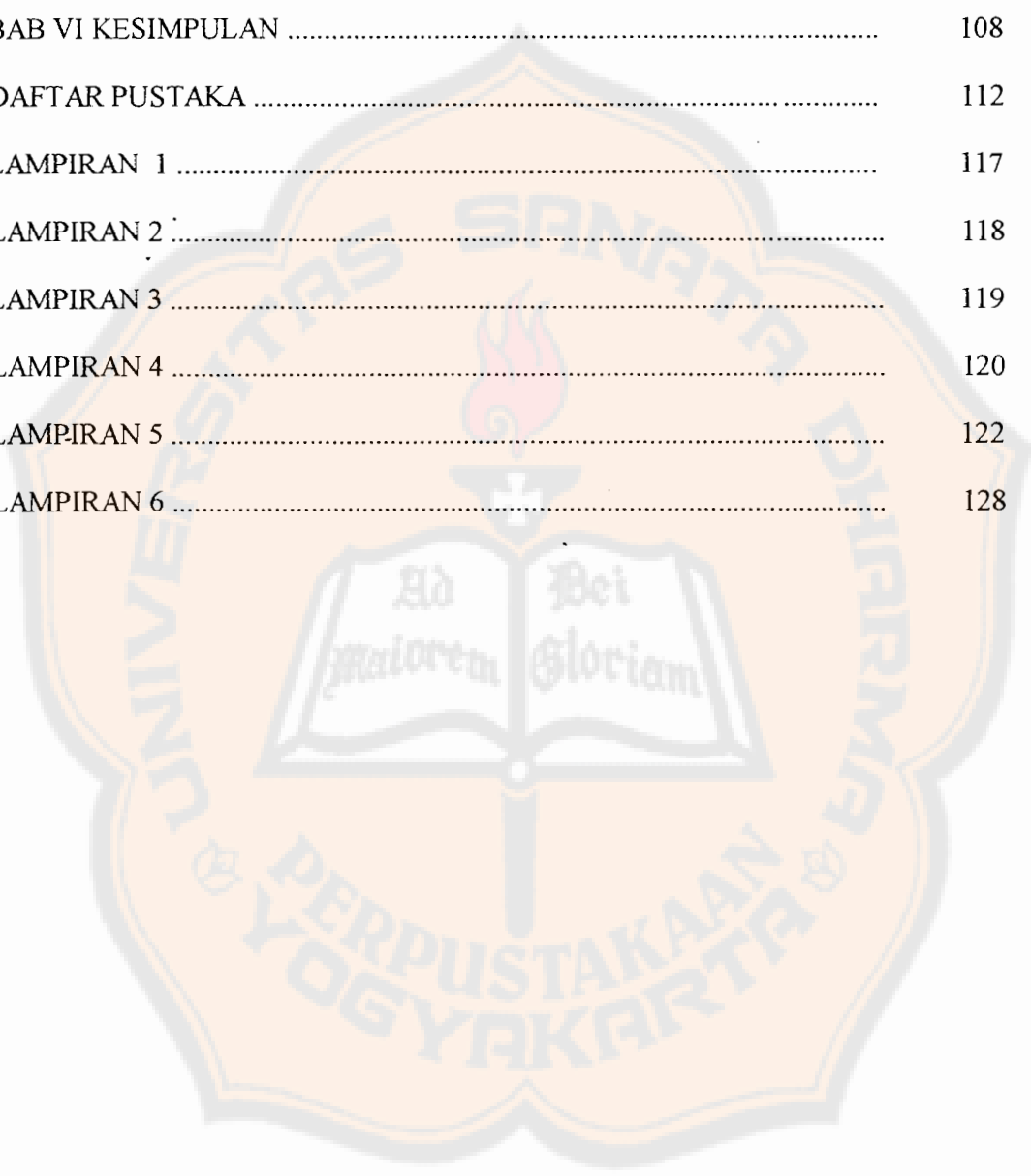
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan Penelitian	11
1.5. Tinjauan Sumber dan Kerangka Teoretik	11
1.6. Hipotesis	15
1.7. Metode Penelitian dan Pendekatan	17
1.8. Sistematika Penulisan	19
BAB II SEJARAH PEMBENTUKAN KABINET SJAHRIR I	20
2.1. Latar Belakang Pembentukan Kabinet Sjahrir I	20

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.2. Proses Pembentukan Kabinet Sjahrir I	24	
2.2.1. Maklumat No. X	24	
2.2.2. Maklumat 3 Nopember	27	
2.2.3. Pengumuman Badan Pekerja 11 Nopember	33	
Rangkuman	39	
BAB III USAHA KABINET SJAHRIR I DALAM MENGISI		
KEMERDEKAAN	41	
3.1. Menanggulangi Ancaman Penjajahan Kembali Belanda	42	
3.1.1. Strategi Diplomasi	44	
3.1.2. Strategi Perjuangan Fisik / Militer	59	
3.1.2.1. Pertempuran Surabaya	60	
3.1.2.2. Pertempuran Ambarawa	61	
3.1.2.3. Pertempuran Semarang	63	
3.2. Pembangunan Negara Indonesia yang Baru Dibentuk	64	
3.2.1. Membangun Angkatan Bersenjata	64	
3.2.2. Menata Kembali Pemerintahan	68	
3.2.3. Memperbaiki Kehidupan Ekonomi	77	
Rangkuman	79	
BAB IV TANTANGAN YANG DIHADAPI KABINET SJAHRIR I		83
4.1. Tantangan dari Dalam	83	
4.1.1. Tantangan dari Anggota Kabinet Lama	84	
4.1.2. Tantangan dari Kelompok Tan Malaka	87	
4.2. Tantangan dari Luar	93	

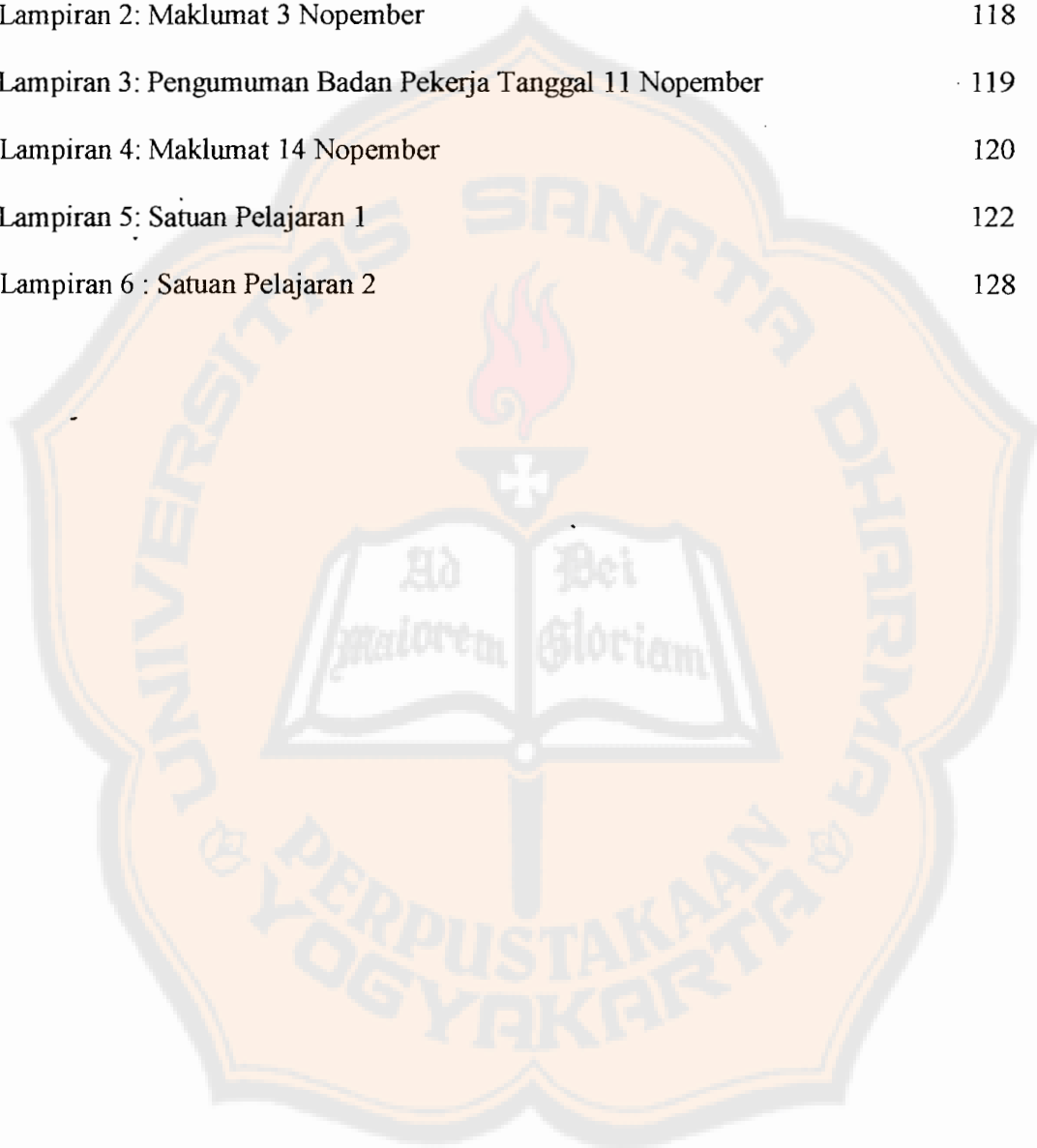
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rangkuman	97
BAB V KEJATUHAN KABINET SJAHRIR I	99
Rangkuman	106
BAB VI KESIMPULAN	108
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN 1	117
LAMPIRAN 2	118
LAMPIRAN 3	119
LAMPIRAN 4	120
LAMPIRAN 5	122
LAMPIRAN 6	128



DAFTAR LAMPIRAN

	hal
Lampiran 1 : Maklumat No. X	117
Lampiran 2: Maklumat 3 Nopember	118
Lampiran 3: Pengumuman Badan Pekerja Tanggal 11 Nopember	119
Lampiran 4: Maklumat 14 Nopember	120
Lampiran 5: Satuan Pelajaran 1	122
Lampiran 6 : Satuan Pelajaran 2	128



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Melalui proklamasi kemerdekaan itu Bangsa Indonesia menyatakan dengan formal baik kepada dunia luar maupun kepada Bangsa Indonesia sendiri, bahwa mulai saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan Bangsa Belanda dan dengan itu pula bebas mengatur hidupnya sendiri. Bangsa Indonesia bebas mengambil sikap untuk menentukan sendiri nasib bangsa dan nasib tanah airnya dalam segala bidang kehidupan.

Dalam kehidupan kenegaraan berarti Bangsa Indonesia akan menyusun Negara sendiri dengan bentuk dan sistem yang dikehendakinya sendiri. Dalam bidang ekonomi, Bangsa Indonesia bebas menentukan sistem ekonomi apa yang mau diterapkan dalam kehidupan bernegara. Di bidang pertahanan dan keamanan, Bangsa Indonesia bebas menentukan sistem pertahanan dan keamanannya sendiri serta bebas membentuk tentara sendiri. Demikian juga dalam bidang hukum, sosial, budaya, pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Semuanya ditentukan sendiri tanpa harus tergantung pada bangsa lain seperti yang terjadi selama bertahun-tahun di masa penjajahan.

Proklamasi telah memberikan kebebasan besar kepada Bangsa Indonesia untuk mengembangkan segala potensinya dalam kehidupan berbangsa, bahkan tidak saja memberikan kebebasan untuk mengembangkan diri sebagai suatu bangsa, tetapi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

proklamasi juga menjadi sumber kekuatan dan sumber tekad perjuangan bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Pentingnya peristiwa proklamasi bagi Bangsa Indonesia dinyatakan sendiri oleh Bung Karno dalam alinea pertama pidato proklamasinya.¹ Peristiwa proklamasi penting karena peristiwa ini membawa perubahan yang sangat berarti bagi kehidupan Bangsa Indonesia. Peristiwa Proklamasi menandai zaman baru dalam perjuangan dan kehidupan Bangsa Indonesia sebagai satu bangsa. Zaman baru itu ditandai oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan tatanan masyarakat Indonesia. Struktur penjajahan diganti dengan struktur kemerdekaan. Hindia Belanda jajahan diganti dengan negara Indonesia yang merdeka. Pemerintahan penjajahan diganti dengan pemerintahan Republik Indonesia. Rakyat terjajah diganti dengan rakyat merdeka. Zaman baru itu oleh Silalahi disebut sebagai zaman pelaksanaan kemerdekaan.²

Akan tetapi walaupun peristiwa proklamasi kemerdekaan dianggap penting bagi Bangsa Indonesia, tetapi peristiwa itu bukanlah tujuan akhir perjuangan Bangsa Indonesia. Kemerdekaan hanyalah tujuan antara; kemerdekaan hanyalah jembatan menuju tercapainya tujuan suatu bangsa. Bahkan Soekarno menyebut kemerdekaan merupakan jembatan emas bagi Bangsa Indonesia.³ Di seberang jembatan emas itulah terdapat berbagai kemungkinan yang perlu digali dan dikembangkan.

¹ Dalam alinea pertama pidato Proklamasinya Bung Karno berucap "Saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita". bdk. O.E. Engelen. et.al., *Lahirnya satu Bangsa dan Negara*. Jakarta: UI-Press, 1997. hal. 85.

² Harry Tjan Silalahi, "Kebangkitan Nasional I: Menemukan, Menumbuhkan dan Mengaktualisasikan Kebangsaan" dalam Bantarto Bandoro et.al. (penyunting), *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: CSIS, 1995, hal. 5. Bdk.juga Ruslan. Abdulgani, "Melacak Jejak Revolusi Nasional" dalam *Prisma*, 8 Agustus 1981, hal. 62-63.

³ Pramudia Ananta Tur, *Kronik Revolusi Indonesia*, Jilid I, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 1999, hal. 305.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Karenanya Proklamasi atau pernyataan kemerdekaan tidak langsung menjamin secara faktual terciptanya unsur-unsur penting suatu negara. Buktinya setelah pernyataan kemerdekaan, Bangsa Indonesia tidak bisa dengan mudah membentuk unsur-unsur penting sebagai suatu negara. Pada saat proklamasi dikumandangkan, di samping rakyat dan pemerintahan, Bangsa Indonesia juga belum sungguh-sungguh mempunyai wilayah (geografis) dan kekuasaan (politis) yang aktual atau nyata walaupun secara konseptual unsur-unsur ini sudah berhasil ditentukan dalam sidang yang diadakan oleh PPKI.

Walaupun proklamasi tidak serta merta membuat Negara Indonesia eksis secara faktual, tetapi peristiwa proklamasi itu sendiri menandai lahirnya negara Indonesia. Sejak lahir sebagai suatu negara, Negara Republik Indonesia mulai berusaha menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai suatu negara.⁴ Tujuan Negara Republik Indonesia, dinyatakan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuan negara Indonesia hampir sama dengan tujuan

⁴ Tentang tujuan dan fungsi suatu negara, lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 45. Bdk. juga C.S.T. Kansil., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 15-17.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

negara berdasarkan ajaran tentang Negara Kesejahteraan yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.⁵

Tidak mudah bagi Bangsa Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsi kenegaraannya. Ancaman dari bangsa asing yang ingin kembali menguasai Indonesia serta persoalan-persoalan dalam negeri yang belum juga teratasi menjadi kendala yang tidak kecil bagi Bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya. Untuk itu maka perlu dibentuk pemerintahan yang kuat dengan sistemnya yang bisa membawa Bangsa Indonesia kepada pencapaian tujuan dan cita-citanya.

Sebagai tahap awal sebelum pemerintahan dibentuk, maka perlu dibuat UUD sebagai dasar dari suatu pemerintahan. Untuk itu maka pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan melelahkan akhirnya berhasil menetapkan UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri atas 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan disertai penjelasan.⁶ Pada hari yang sama PPKI memilih dan mengangkat Soekarno dan Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden pertama untuk Negara RI yang baru dibentuk. Maka sejak tanggal 18 Agustus 1945 untuk pertama kalinya lembaga kepresidenan Republik Indonesia terbentuk. Dengan itu pula secara formal syarat-syarat berdirinya Negara Republik Indonesia terpenuhi.⁷

Kekuasaan Lembaga kepresidenan yang dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945 pada mulanya hampir bersifat mutlak, karena di dalam aturan peralihan dari konstitusi negara yang baru dibentuk dinyatakan bahwa "sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut

⁵ Kansil. *ibid.*

⁶ G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20*. Jilid 1, Yogyakarta: Kanisius, 1988, hal. 89.

⁷ Tentang syarat berdirinya suatu negara bdk. Kansil, *op. cit.* hal. 7.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional" (Pasal IV). Dengan itu, Presiden Soekarno yang baru terpilih dapat saja bertindak diktator, karena lembaga-lembaga yang lain hanya merupakan pembantu dan penasihat presiden. Untuk mencegah kediktatoran dalam pemerintahan maka ada usaha untuk membatasi kekuasaan presiden. Dan usaha ini kemudian berhasil dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No. X.

Seminggu setelah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya tanggal 22 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk. Anggotanya berjumlah 135 orang terdiri dari para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan ditambah dengan sejumlah tokoh nasional. Dengan demikian, para pembentuk negara baik yang berada dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia maupun yang menjadi anggota KNIP adalah orang-orang yang terpilih, yang merupakan para tokoh pejuang kemerdekaan yang mewakili berbagai kelompok etnis, agama dan lain sebagainya dan mencerminkan susunan masyarakat Indonesia dari sekian banyak pulau, suku dan pandangan politik.⁸ Badan ini diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo dan dibantu oleh Wakil Ketua I Soetardjo, Wakil ketua II Mr. Latuharhary dan Wakil Ketua III Adam Malik.

Pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan dan awal bulan September tepatnya tanggal 4 September 1945 dibentuklah kabinet pertama Negara Republik Indonesia. Karena pemerintahan Indonesia berbentuk "Presidensiil" maka kabinet pertama ini pun berbentuk presidensiil di mana para anggota kabinet langsung berada di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden bukan kepada Parlemen dalam hal ini KNIP. Dalam sistem ini, kabinet tidak bisa dibubarkan oleh Parlemen/KNIP.

⁸ G. Moedjanto, *op.cit.*, hal. 90.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, presiden dibantu oleh satu badan yang disebut Komite Nasional yang menjadi cikal bakal lembaga legislatif.

Situasi politik dalam dan luar negeri pada saat ini tidak memungkinkan kabinet pertama ini bertahan lama. Kabinet presidensiil yang disusun Soekarno-Hatta pada tanggal 4 September 1945 ini dinilai masih berbau Jepang karena anggota kabinet itu sebagian besar terdiri dari baik itu kepala-kepala departemen (*bücho*) maupun dari para penasihat (*sanyo*) yang berasal dari masa Jepang. Suara-suara sinis menyebut susunan pemerintahan itu sebagai Kabinet *Bucho*. Sebagai akibatnya, kabinet pertama Indonesia itu bersifat ganda. Di satu pihak, kabinet itu menjadi bagian dari pemerintahan militer Jepang dan di pihak lain, merupakan pemerintahan Republik Indonesia merdeka.⁹

Kabinet yang disusun di bawah sisa-sisa pengaruh fasisme Jepang, dianggap tidak menguntungkan dari sisi perjuangan demokrasi dan diplomasi bangsa Indonesia dalam menghadapi dunia luar terutama dunia barat yang sangat anti terhadap berbagai bentuk fasisme dan menganjurkan demokratisasi dalam pengelolaan negara. Karena itu, kaum demokrat dimana Sjahrir menjadi tokoh utamanya mengambil inisiatif untuk membawa pemerintahan yang baru ke arah yang lebih demokratis. Dalam konteks inilah Sjahrir menerbitkan sebuah pamflet yang mengkritik secara pedas warna fasisme Jepang dalam pemerintahan negara baru itu. Sjahrir menandakan: "negara Republik Indonesia yang telah kita manfaatkan sebagai alat revolusi rakyat, harus juga dimanfaatkan untuk perjuangan demokrasi, membersihkannya dari sisa fasisme Jepang. Konstitusi dewasa ini yang masih jauh dari demokrasi harus diganti dengan konstitusi demokrasi penuh, yang akan meletakkan dasar pada seluruh badan pemerintahan negara hak-hak dasar

⁹Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional dan Konstituante 1956-1959 Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal. 15. Bdk. Juga Benedict R.O.G. Anderson, *Java In A Time Of Revolution Occupation and Resistance, 1944-1946*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1972, hal. 113.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

rakyat, yaitu kebebasan berpikir, berbicara, beragama, bermata-pencapaian, berpendidikan, berpartisipasi dalam pembentukan dan penentuan struktur negara dan pemerintahannya, melalui hak untuk memilih (wakil-wakil) dan dipilih di dalam seluruh lembaga yang ada dalam negara".¹⁰

Perjuangan Sjahrir dan kaum demokrat liberal kemudian mendapatkan hasilnya. Hasil terpenting adalah pembubaran Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 22 Agustus 1945, karena sistem kepartaian tunggal dianggap berbau authoritarian apalagi PNI merupakan kelanjutan dari *Jawa Hokokai* yang dibentuk pada masa Jepang yang menyebabkan tuduhan bahwa kabinet sangat berbau Jepang dalam pemerintahan tidak terhindarkan lagi. Keberhasilan lainnya adalah disetujuinya usul Sjahrir untuk membangun sistem banyak partai.

Selanjutnya bulan Oktober 1945 kaum demokrat dari anggota KNIP berencana untuk mengubah bentuk pemerintahan dari sistem presidensiil menjadi sistem parlementer di mana kekuasaan legislatif berada di tangan KNIP dan kabinet akan bertanggungjawab secara langsung kepada badan tersebut. Perjuangan ini berhasil ketika Soekarno dan Hatta menyetujui usul untuk mengubah KNIP menjadi suatu lembaga dengan kekuasaan legislatif, jadi tidak lagi hanya sebagai badan penasihat presiden. Karena itu keluarlah Maklumat Wakil Presiden No. X pada tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat Wakil Presiden No. X menyatakan "bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara". Dengan demikian, Komite Nasional Indonesia Pusat sepenuhnya

¹⁰ Sutan Sjahrir, *Our Struggle*, Ithaca: Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1968, hal. 29 seperti yang dikutip Fachry Ali dalam Hamid Basyaib (penterj.), *Kemelut Demokrasi Liberal Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton*, Jakarta: LP3S, 1993, hal. xvii.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mempunyai fungsi mengubah kedudukannya yang hanya bersifat membantu presiden menjadi lembaga legislatif penuh.

Proses pembatasan kekuasaan lembaga kepresidenan terus diperjuangkan oleh para anggota KNIP. Tanggal 11 Nopember 1945 KNIP mengusulkan kepada Presiden agar kabinet bertanggungjawab kepada Parlemen dan tidak lagi kepada Presiden. Usul ini diterima oleh Presiden Soekarno. Sebagai konsekwensinya maka tanggal 14 Nopember 1945 Presiden membubarkan kabinetnya. Kemudian atas desakan KNIP pula presiden setuju untuk menunjuk Sutan Sjahrir untuk menjadi Perdana Menteri dan menyusun kabinet. Ada beberapa alasan penunjukkan Sjahrir menjadi Perdana Menteri antara lain: Sjahrir dianggap bisa diterima dan dinilai baik oleh pihak Barat terutama Belanda karena Sjahrir pernah belajar di Belanda dan memiliki pandangannya yang sesuai dengan pandangan Barat. Ia juga ber aliran sosialis dan ini sejalan dengan perkembangan politik di negeri Belanda di mana partai Sosialis menang dalam parlemen. Hal seperti ini dianggap menguntungkan perjuangan Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaannya. Karena itulah maka Sjahrir ditunjuk menjadi formatur pembentukan kabinet. Setelah ditunjuk menjadi Perdana Menteri, Sjahrir lalu menyusun kabinetnya. Sejak itu mulailah masa pemerintahan Kabinet Sjahrir I. Dengan demikian pula maka terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam konfigurasi politik nasional yaitu dari sistem pemerintahan yang presidensiil kepada sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer, presiden hanyalah seorang kepala negara yang tidak mempunyai kekuasaan pemerintahan karena tidak dapat membentuk agenda politik nasional. Para menteri atau kabinet bertanggungjawab langsung kepada Parlemen.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam pelaksanaannya Kabinet Sjahrir I hanya berumur empat bulan, 14 Nopember 1945 sampai dengan 12 Maret 1946. Tantangan berat yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri membuat Kabinet Sjahrir I mengundurkan diri pada 28 Februari 1946. Tetapi kabinet ini masih terus bekerja sampai terbentuknya Kabinet Sjahrir II pada tanggal 12 Maret 1946. Walaupun hanya berusia empat bulan, kabinet Sjahrir sudah berjuang membangun sistem politik yang lebih demokratis di dalam suatu negara yang baru dibentuk. Kabinet Sjahrir I juga berhasil mempertahankan eksistensi Republik Indonesia yang sedang terancam oleh tentara Sekutu dan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia dan juga oleh suatu kekuatan domestik dibawah pimpinan Tan Malaka yang menuntut dicetuskannya revolusi sosial yang bisa membawa Negara Indonesia yang baru dibentuk ke jurang kehancuran. Ada beberapa hal fundamental yang dilakukan oleh Kabinet Sjahrir I yang merupakan peletak dasar bagi demokrasi di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya. Beberapa hal dasar itu diungkapkan oleh Afan Gafar¹¹ antara lain: pertama, *political franchise* yang menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku dan kedaerahan. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator dibatasi kekuasannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, Dengan maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah

¹¹ Afan. Gafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2000 hal. 11.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

1.2. Rumusan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis serta keterbatasan sumber penelitian dan fasilitas yang bisa digunakan untuk mengadakan penelitian yang mendalam tentang Kabinet Sjahrir I, maka pembahasan tentang Kabinet Sjahrir I akan dibatasi hanya pada pembentukan kabinet, usaha yang dilakukan oleh kabinet dalam mengisi kemerdekaan, tantangan-tantangan yang dihadapi kabinet serta kejatuhan Kabinet Sjahrir I.

Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Proses Pembentukan Kabinet Sjahrir I dan faktor-faktor pendorong serta penghambatnya.
2. Apa Usaha Kabinet Sjahrir I dalam mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia
3. Tantangan Apa yang dihadapi Kabinet Sjahrir I selama masa pemerintahan mulai 14 Nopember 1945 sampai dengan 12 Maret 1946
4. Bagaimanakah proses Jatuhnya Kabinet Sjahrir I beserta faktor-faktor penyebabnya.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum diarahkan pada upaya menjawab pelbagai masalah yang berkaitan dengan Kabinet Sjahrir I. Karenanya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1. Pembentukan Kabinet Sjahrir I beserta faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. 2. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Kabinet Sjahrir I dalam mengisi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. 3. Tantangan-tantangan yang dihadapi Kabinet Sjahrir I. 4. Kejatuhan Kabinet Sjahrir I beserta faktor-faktor penyebabnya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian terhadap Kabinet Sjahrir I ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain:

1. Bagi para pembaca pada umumnya diharapkan dengan penelitian ini pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia selama pemerintahan Kabinet Sjahrir I bertambah.
2. Bagi kepentingan penulisan sejarah, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya kasanah penulisan sejarah di tanah air, terutama sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaannya.
3. Bagi kepentingan penelitian sejarah, diharapkan penelitian ini dapat mendorong para pencinta sejarah untuk melakukan penelitian serupa baik terhadap tema yang sama tentu dengan sudut pandang yang berbeda maupun terhadap banyak tema lain yang belum digali.

1.5. Tinjauan Sumber dan Kerangka Teoretik

Penelitian ini mengambil kurun waktu antara bulan Oktober 1945 sampai dengan bulan Maret 1946, yaitu masa pemerintahan Kabinet Sjahrir I. Kurun waktu yang sudah lama lewat memang membawa kesulitan tersendiri dalam menemukan sumber-sumber yang berbicara tentang Kabinet Sjahrir I. Hal itu memang disadari oleh peneliti. Namun demikian, dengan sumber yang berhasil diperoleh yang menulis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tentang masa pemerintahan kabinet Sjahrir I, kiranya dapatlah dibuat suatu rekonstruksi peristiwa sejarah khususnya pada masa pemerintahan Kabinet Sjahrir I.

Sumber yang dipakai ada yang berasal dari koran ada pula dari buku-buku. Koran yang dijadikan sumber adalah beberapa koran yang terbit pada bulan Oktober 1945 sampai dengan Maret 1946 seperti: *Kedaulatan Rakyat*, 15 Nopember 1945; *Kedaulatan Rakyat*, 17 Nopember 1945; *Kedaulatan Rakyat*, 22 Nopember 1945; *Kedaulatan Rakyat*, 28 Nopember 1945; *Kedaulatan Rakyat*, 11 Desember 1945; *Kedaulatan Rakyat*, 18 Desember 1945; *Semangat Merdeka*, 20 Nopember 1945; *Semangat Merdeka*, 27 Nopember 1945; *Semangat Merdeka*, 6 Desember 1945; *Soeloeh Merdeka*, 13 Desember 1945 yang mengulas tentang Kabinet Sjahrir I.

Sedangkan sumber buku yang dipakai adalah *Perkembangan Kabinet Dan Pemerintahan di Indonesia*, karangan Bibit Suprpto; *Java In a Time of Revolution Occupation and Resistance, 1944-1946* karangan Benedict R. O'G. Anderson terutama mulai bab 8 tentang "A Silent Coup" sampai bab 13 tentang "The Cabinet Falls"; *Setengah Abad Negara Pancasila Tinjauan Kritis ke Arah Pembaruan* karangan J. Soedjati Djiwandono; *Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia* karangan Rudolf Mrazek dan beberapa buku lain seperti yang terdapat dalam daftar pustaka pada bagian akhir dari tulisan ini.

Dari sumber-sumber yang ada, ditemukan beberapa pendapat atau pandangan tentang kabinet Sjahrir I yang perlu dikemukakan sebagai kerangka teoretis penelitian ini. Pendapat pertama dikemukakan oleh Van der Plass bekas anggota *Stuv* dan rekan Van Mook. Menurut Van der Plass¹² Kabinet Sjahrir adalah Kabinet Indonesia yang

¹² Rudolf, Mrazek. *Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996, hal. 519.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

demokratis. Letak kedemokratisannya dapat dilihat pada tiga usaha demokratisasi yang direncanakan akan dilakukan oleh Kabinet Sjahrir I. Ketiga usaha itu seperti yang diterangkan oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir kepada wartawan seperti yang dikutip Semangat Merdeka¹³ sebagai berikut: 1. Sudah datang masanya sekarang untuk menyusun demokrasi di Indonesia. 2. Kabinet selekas-lekasnya akan mengadakan pemilihan umum. 3. Kabinet memberikan kesempatan selapang-lapangnya kepada rakyat untuk mendirikan perhimpunan politik asal saja dasar partai politik itu tidak bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia. Karena Kabinet Sjahrir I merupakan kabinet yang demokratis maka perlu didukung dengan pelbagai cara agar kedudukan kabinet ini menjadi kuat dan diusahakan agar segala hal yang dapat menjatuhkan kabinet ini sedapat mungkin dicegah. Dukungan terhadap kabinet yang demokratis diharapkan oleh Van der Plass kepada pemerintah Belanda.¹⁴ Dukungan seperti itu memang bisa diharapkan untuk diberikan oleh pemerintah Belanda karena sejalan dengan keinginan negara-negara Barat pemenang perang yang menginginkan untuk memperjuangkan demokrasi di negara-negara yang baru dibentuk.

Pandangan tentang Kabinet Sjahrir I sebagai kabinet yang demokratis dikemukakan pula oleh Mr. Amir Sjarifudin Menteri Penerangan pada Kabinet Sjahrir I. Sariffudin mengatakan bahwa kabinet yang baru dibentuk adalah kabinet yang lebih demokratis daripada kabinet sebelumnya.¹⁵ Karena kabinet yang baru ini lebih demokratis maka ia mempunyai kedudukan yang kuat dalam perundingan dengan Belanda menyangkut Indonesia. Sebab sebagai suatu pemerintahan yang demokratis Negara Indonesia disejajarkan dengan negara-negara demokratis lainnya di Barat.

¹³ *Semangat Merdeka*, No. 17. Tahun I, Selasa 27 Nopember 1945, hal. 2

¹⁴ Mrazek, *op.cit.*, hal. 519

¹⁵ *Kedaulatan Rakyat*, 17 Nopember 1945

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jiwandono¹⁶ menyebut Kabinet Sjahrir I sebagai kabinet Parlemerter. Hal yang sama dikemukakan oleh Bibit Suprpto¹⁷ ketika menjelaskan tentang Kabinet Sjahrir I.

Sebagai kabinet parlementer, Kabinet Sjahrir I mencoba menerapkan sistem pemerintahan parlementer dalam pemerintahannya walaupun tidak diterapkan secara sempurna. Dalam sistem parlementer terdapat elemen-elemen berikut ini:¹⁸

1. Parlemen dipilih dalam pemilihan yang umum, langsung, bebas dan rahasia.
2. Mayoritas anggota parlemen (satu atau beberapa fraksi yang membentuk koalisi) membentuk pemerintah.
3. Perdebatan dan pertentangan antara mayoritas dan oposisi adalah inti parlementarisme.
4. Pimpinan eksekutif berkepala dua, yakni kepala negara (raja, presiden yang berfungsi representatif) dan kepala pemerintahan (Perdana Menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen).
5. Kepala negara mengangkat kepala pemerintahan yang harus didukung oleh mayoritas dalam parlemen.
6. Kepala pemerintah memilih para menteri (kabinet), yang biasanya juga anggota parlemen.
7. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan politik dalam parlemen dan dapat dijatuhkan dengan votum tak percaya.

¹⁶ Soedjati Djiwandono, *Setengah Abad Negara Pancasila Tinjauan Kritis ke Arah Pembaharuan*, Jakarta: CSIS, 1995, hal. 161.

¹⁷ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Galia Indonesia, 1985, hal. 27.

¹⁸ Kotan Y. Stefanus, *Perkembangan Kekuasaan pemerintahan Negara: Dimensi Pendekatan Politik Hukum Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hal. 35-36.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ciri parlementerisme seperti di atas memang belum diterapkan secara murni dalam masa pemerintahan kabinet Sjahrir I. Namun yang jelas bahwa pada masa pemerintahan Kabinet Sjahrir I ada beberapa unsur parlementer yang sudah diterapkan seperti pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir sendiri, sedangkan kepala Negara dijalankan oleh Presiden Soekarno. Pertanggungjawaban kabinet juga tidak lagi diberikan kepada presiden sebagaimana yang berlaku dalam Kabinet Presidensial sebelumnya, tetapi pertanggungjawaban diberikan kepada Parlemen. Karena parlemen atau DPR belum terbentuk maka pertanggungjawaban diberikan kepada KNIP sebagai badan yang menggantikan lembaga DPR sampai DPR terbentuk.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kabinet Sjahrir I adalah Kabinet Parlementer yang dalam pelaksanaannya tidak menerapkan sistem parlementer secara ketat. Artinya tidak semua unsur atau elemen parlementerisme dapat diterapkan oleh Kabinet Sjahrir I. Hal ini dapat dipahami karena di satu pihak Bangsa Indonesia belum memiliki pengalaman dalam mengelolah negara dan di lain pihak situasi revolusi yang terjadi pada waktu itu tidak memungkinkan bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahan secara sempurna.

1.6. Hipotesis

Yang dimaksudkan dengan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian. Dalam suatu penelitian, hipotesis merupakan pedoman bagi penelitian. Itu berarti sebelum penelitian dilakukan, sudah dirumuskan hipotesis dari masalah yang akan diteliti. Hipotesis itulah yang akan dibuktikan dalam penelitian.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dengan adanya rumusan hipotesis, maka langkah pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan lebih terarah.

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Dari bacaan-bacaan tentang pemerintahan Kabinet Sjahrir I dapatlah kiranya diduga bahwa faktor yang menyebabkan terbentuknya Kabinet Sjahrir I adalah: pertama, situasi politik dalam negeri yang mulai kurang percaya pada kabinet Presidensiil dan situasi kecenderungan luar negeri yang menjunjung tinggi proses demokrasi dalam negara. Kedua, keluarnya Maklumat No. X yang mengubah status KNIP dari badan pembantu presiden menjadi badan legislatif. Ketiga, keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember tentang pembentukan partai-partai politik dan keempat, keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember tentang pembentukan Kabinet I. Sebaliknya faktor yang menghambat pembentukan Kabinet Sjahrir I adalah adanya pandangan para ahli hukum tatanegara bahwa perubahan itu bertentangan dengan UUD 1945.
2. Ada dua tindakan utama Kabinet Sjahrir I dalam mengisi kemerdekaan Indonesia yaitu pertama menanggulangi ancaman kembalinya Belanda untuk menjajah Indonesia sebab adanya keinginan kuat dari pemerintahan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Kedua, membangun Republik Indonesia yang baru dibentuk dengan menata angkatan bersenjata, menata kehidupan ekonomi dan menyempurnakan pemerintahan daerah sebab kehidupan ekonomi Indonesia sejak pemerintahan Jepang tidak berkembang dengan baik, organisasi militer belum sempurna serta birokrasi pemerintahan belum sempurna.
3. Tantangan utama yang dihadapi Kabinet Sjahrir I berasal dari dua pihak yaitu pertama dari para menteri kabinet lama karena tidak diangkat lagi pada kabinet yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

baru sebagai akibat langsung dari serangan Sutan Sjahrir dalam pamflet *Perjuangan Kita*. Kedua, tantangan dari kelompok Tan Malaka dengan organisasi Persatuan Perjuangan yang didirikannya yang sangat berambisi untuk menduduki tampuk tertinggi pemerintahan di Indonesia, sebab pemerintahan Kabinet Sjahrir I dianggap menghalangi ambisi Tan Malaka untuk mewujudkan keinginannya. Tantangan lainnya berasal dari Belanda dan Inggris sebab Belanda selalu menentang setiap perjuangan diplomasi dan perjuangan fisik yang dilakukan oleh Republik Indonesia. Sedangkan Inggris selalu mendukung sikap dan tindakan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia.

4. Kejatuhan kabinet sjahrir I lebih banyak disebabkan karena perlawanan dari Persatuan Perjuangan di bawah pimpinan Tan Malaka, sebab Persatuan Perjuangan tidak setuju dengan kebijaksanaan Kabinet Sjahrir I yang menerima perundingan dengan Belanda tanpa terlebih dahulu mendapatkan pengakuan 100% kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Tan Malaka dan Persatuan Perjuangannya menuntut pengakuan kemerdekaan 100% sebelum dilakukan perundingan dengan Belanda.

1.7. Metode Penelitian dan Pendekatan

1.7.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menyangkut obyek sejarah, oleh sebab itu metode sejarah adalah yang paling tepat untuk digunakan. Menurut Louis Gotschalk ada empat tahap yang harus dilalui untuk dapat merekonstruksi suatu peristiwa sejarah, yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan akhirnya penulisan.¹⁹ Keempat tahap tersebut akan digunakan dalam penelitian ini walaupun dilaksanakan tidak sempurna.

¹⁹ Louis. Gotschalk, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986. Hal. 27-40.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1) Pengumpulan sumber.

Pengumpulan sumber dilakukan dengan menginventarisir tulisan-tulisan tentang Pemerintahan dan Politik pada umumnya dan Pemerintahan Kabinet Sjahrir I khususnya. Sumber yang diambil terdiri dari buku-buku dan klipng koran tahun 1945-1946.

2) Kritik Sumber

Setelah sumber-sumber dikumpulkan, maka kemudian dibuat kritik atas sumber yang ada. Untuk mengetahui kebenaran informasi, digunakan metode perbandingan, yang membandingkan satu informasi dengan informasi lainnya. Kesamaan informasi oleh beberapa sumber dipandang benar. Apabila terdapat perbedaan informasi tentang satu masalah, pemecahan yang ditempuh adalah mengikuti informasi yang diberikan oleh yang paling banyak sumber.

3) Interpretasi

Data berupa informasi yang sudah dianggap valid lalu diinterpretasikan. Mengingat sumber utama kajian ini adalah teks, maka diperlukan penafsiran yang cermat agar makna aslinya dapat ditangkap secara tepat. Teori penafsiran teks itulah yang dikenal dengan istilah hermeneutika. Langkah ini diambil dengan memperhatikan landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini.

4) Penulisan

Setelah pengumpulan dan kritik sumber dan interpretasi dijalankan, barulah dilaksanakan langkah berikut yaitu penulisan hasil penelitian.

1.7.2. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah pemerintahan pada masa pemerintahan Kabinet Sjahrir I. Maka penelitian ini dititikberatkan pada studi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sejarah politik pemerintahan. Oleh karena itu pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sejarah politik. Yang akan dianalisis dalam pendekatan sejarah politik adalah bagaimana distribusi kekuasaan terjadi dalam suatu masyarakat atau suatu negara. Terhadap Kabinet Sjahrir I, akan diteliti bagaimana kabinet ini mendapatkan kekuasaannya, selanjutnya bagaimana kekuasaan yang telah didapat itu dipertahankan. Juga diteliti bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan akhirnya bagaimana kekuasaan itu berakhir.

1.8. Sistematika Penulisan

-Sistematika penulisan tentang penelitian terhadap Kabinet Sjahrir I ini disusun sebagai berikut: Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan sumber dan kerangka teoretik, hipotesis penelitian, metodologi penelitian dan pendekatan serta sistematika penulisan. Bab II tentang pembentukan Kabinet Sjahrir I beserta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat. Bab III tentang usaha-usaha yang dilakukan Kabinet Sjahrir I dalam mengisi kemerdekaan. Bab IV tentang tantangan yang dihadapi Kabinet Sjahrir I. Bab V tentang kejatuhan Kabinet Sjahrir I beserta faktor-faktor penyebabnya. Bab VI Kesimpulan

BAB II

SEJARAH PEMBENTUKAN KABINET SJAHRIR I

Kabinet Sjahrir I adalah kabinet parlementer pertama di Indonesia yang dibentuk ketika Negara Republik Indonesia masih menggunakan UUD 1945 yang mengatur bahwa sistem pemerintahan yang digunakan di Negara Republik Indonesia adalah sistem presidensiil. Menarik untuk dikaji bagaimana sampai terjadi bahwa di dalam suatu sistem pemerintahan presidensiil bisa hidup Kabinet yang berbentuk parlementer padahal kedua sistem ini memiliki perbedaan-perbedaan mendasar. Karena itu dalam membahas sejarah pembentukan Kabinet Sjahrir I terlebih dahulu akan dikemukakan tentang latar belakang pembentukan Kabinet Sjahrir I. Dalam penjelasan tentang latar belakang pembentukan Kabinet Sjahrir I tersirat faktor pendorong terbentuknya Kabinet Sjahrir I. Selanjutnya dijelaskan secara singkat proses pembentukan Kabinet Sjahrir I.

2.1. Latar Belakang Pembentukan Kabinet Sjahrir I

Untuk memahami terjadinya pergeseran kekuasaan di Negara Republik Indonesia dari pemerintahan presidensiil kepada pemerintahan parlementer, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu situasi kehidupan politik di Jakarta selama periode bulan Oktober – Nopember 1945.

Moedjanto²⁰ melukiskan bahwa situasi Jakarta pada periode itu ditandai dengan putusnya hubungan politik, administrasi pemerintahan maupun militer antara pusat dan

²⁰ G. Moedjanto, *op.cit.*, hal. 141-142, bdk. juga Anderson, *op.cit.* hal. 167-170.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

daerah-daerah. Kedatangan Sekutu dengan kekuatan yang besar, peleburan badan-badan peperangan, pengumpulan kembali orang Jepang, penyesuaian tugas para pegawai, sarana hubungan yang tidak baik dan kemunduran ekonomi menjadi penghalang bagi berfungsinya pemerintahan secara baik.

Akibatnya ketika daerah-daerah mengalami krisis, pemerintah pusat tidak bisa memberikan sumbangan untuk memecahkan persoalan di daerah. Karena itu, setiap daerah berusaha mengatasi sendiri persoalan-persoalan mereka dengan cara mereka sendiri. Maka terjadilah pengambilalihan perusahaan baik itu kantor-kantor, pabrik-pabrik, pertambangan dan perkebunan. Demikian juga banyak pejabat pangreh praja dipaksa berhenti dan diganti oleh pejabat yang dipilih rakyat. Pertempuran-pertempuran melawan tentara Sekutu yang membonceng NICA yang terjadi di daerah-daerah juga tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Digambarkan pula bahwa di ibu kota, para pemuda yang terdesak ke luar kota Jakarta karena kedatangan tentara Sekutu menyusun kekuatan sendiri di daerah-daerah pinggiran kota Kerawang, Bekasi, Depok, Bogor dan Tangerang. Mereka merekrut pemuda-pemuda dari daerah-daerah itu dan memimpin sendiri revolusi tanpa meminta persetujuan pemerintah. Di banyak tempat revolusi yang mereka lakukan mengalami keberhasilan karena didukung oleh rakyat.

Situasi seperti ini bisa memberikan gambaran ke dalam negeri bahwa pemerintahan yang tengah berjalan lemah dan tidak mampu mengatasi krisis. Sedangkan ke luar negeri memberikan gambaran bahwa di Indonesia terjadi tindakan-tindakan anarkis dan fasis. Situasi ini sangat merugikan perjuangan Bangsa Indonesia baik ke dalam maupun ke luar negeri dalam menegakkan Negara Republik Indonesia dan mengisi kemerdekaan yang telah dicapai. Ke dalam negeri, situasi seperti itu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membahayakan persatuan yang sangat dibutuhkan dalam melawan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah. Ke luar negeri, situasi seperti itu bisa mengurangi kepercayaan Sekutu bahwa pemerintah RI mendapat dukungan dari rakyat dan cukup siap untuk menjalankan pemerintahan.²¹

Demikian juga kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia pada bulan September yang diboncengi oleh Belanda menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pemerintah yang baru dibentuk; sebab tentara Belanda dengan NICA-nya berusaha untuk menjajah kembali Indonesia. Kedatangan Sekutu yang diboncengi Belanda inilah yang kemudian memicu kemarahan rakyat sehingga terjadi beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap Sekutu seperti yang terjadi di Semarang pada tanggal 15 Oktober 1945 selama 5 hari atau di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang kemudian diperingati sebagai hari pahlawan.

Pemerintah Indonesia mengalami suatu dilema untuk menyikapi kedatangan tentara Sekutu. Di satu pihak kalau pemerintah tunduk kepada Sekutu berarti mereka menjauhkan diri dari dukungan pemuda yang semangatnya berkobar-kobar dan merupakan kekuatan besar bagi RI dalam menghadapi kekuatan luar yang mau menjajah kembali Indonesia. Namun di pihak lain kalau tunduk kepada kemauan rakyat maka pemerintah akan dimusuhi Sekutu. Menghadapi dilema seperti ini pemerintah Indonesia menempuh jalan yang dianggap paling baik yang tidak menimbulkan banyak korban di pihak rakyat yaitu melakukan kerja sama dengan pihak Sekutu dengan pertimbangan bahwa Republik Indonesia pada waktu itu tidak memiliki senjata yang memadai untuk menghadapi tentara Sekutu yang bersenjata lengkap sehingga kalau memilih jalan konfrontasi akan menimbulkan banyak korban di kalangan rakyat Indonesia. Dengan

²¹ G. Moedjanto, *ibid.* hal. 101.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memilih jalan kerjasama maka korban di kalangan rakyat sipil akan terelakkan. Akan tetapi walaupun bekerjasama dengan Sekutu, pemerintah Indonesia tetap dalam arah perjuangannya untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Karena kerjasamanya dengan Sekutu maka tersebar juga pada waktu itu anggapan bahwa pemerintah tidak suka dengan aksi-aksi yang revolusioner pemuda-pemuda propinsi sehingga timbul gagasan untuk menggantikan pemerintahan yang ada dengan suatu pemerintahan baru yang lebih revolusioner.

Pemerintahan Kabinet Presidensiil Soekarno-Hatta juga dianggap tidak demokratis bahkan mengarah ke pemerintahan totaliter sebab kedudukan presiden menurut pasal IV aturan peralihan itu sangat kuat. Menurut ketentuan pasal IV Presiden berhak menjalankan segala kekuasaan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung, karena itu ada yang menyebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan presiden²². Pemerintahannya juga digambarkan sebagai pemerintahan oleh seorang.²³ Melihat kedudukan presiden yang begitu kuat, maka tidak mengherankan kalau ada pihak yang menyamakan Negara Republik Indonesia itu dengan suatu negara fasis. Belanda pada waktu itu menggunakan kelemahan ini untuk menyebarkan isu bahwa Negara Indonesia adalah buatan Jepang dan antek Jepang. Buktinya kekuasaan presidennya tidak terbatas atau absolut hal mana sesuai dengan militerisme Jepang.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul maka dirasa perlu untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat dan demokratis menggantikan pemerintahan yang lemah dan dianggap tidak demokratis bahkan terkesan fasis. Maka

²² Pringgodigdo, *Perubahan Kabinet Presidensiil Menjadi Kabinet Parlementer*, Jogjakarta: Jajasan Fonds Universitit Negeri Gadjah Mada, 1954, hal. 26.

²³ *Ibid.*, hal. 25.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

timbul gerakan demokratisasi di bidang pemerintahan dengan mengubah sistem pemerintahan dari sistem presidensiil ke sistem parlementer. Untuk itu dicarilah dasar yang kuat supaya terbentuklah pemerintahan yang demokratis. Maka berturut turut keluarlah maklumat No. X, Maklumat 3 Nopember dan maklumat 11 Nopember 1945.

2.2. Proses Pembentukan Kabinet Sjahrir I

Proses pembentukan Kabinet Sjahrir I dimulai dengan dikeluarkannya Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945 diikuti dengan Maklumat 3 Nopember 1945 dan akhirnya Maklumat 11 Nopember 1945.

2.2.1. Maklumat No. X

Melihat pemerintah tidak mampu memberikan tanggapan yang cepat dan sesuai dengan harapan pemuda maka pemuda Jakarta mulai merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Beberapa sikap pemerintah yang terkesan memihak kepada Sekutu dan berlawanan dengan kehendak pemuda dan rakyat banyak mendorong pemuda untuk membuat penilaian bahwa pemerintah yang ada tidak mendukung perjuangan yang tengah dijalankan oleh pemuda. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 1945 di Jakarta tercapai suatu konsensus untuk menggantikan pemerintah yang ada dengan pemerintah yang lebih tanggap terhadap situasi dan kehendak kuat dalam masyarakat.

Orang yang dianggap cocok untuk memulai pergeseran pemerintahan ini adalah Sutan Sjahrir. Dia didukung baik oleh golongan muda maupun oleh golongan tua. Bagi golongan muda, kepemimpinannya selama masa pembuangan dan sikapnya yang sangat prinsipiil dianggap cocok untuk memimpin revolusi. Sedangkan oleh kaum tua, Sjahrir dianggap sebagai seorang nasionalis walaupun mengenyam pendidikan di Belanda. Dia

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

juga dianggap oleh kaum tua memiliki reputasi yang baik selama berada di bawah pembuangan Belanda.

Sjahrir sendiri yang setelah proklamasi kemerdekaan mendapat peran sebagai ketua Badan Pekerja KNIP berpendapat bahwa langkah pertama untuk mengubah sistem pemerintahan adalah dengan mengubah status KNIP dari suatu badan penasihat yang membantu presiden dalam melaksanakan tugas legislasi dan tugas pemerintahan lainnya menjadi suatu badan legislatif yang sebenarnya. Kedudukan sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP memungkinkan Sjahrir untuk melakukan langkah-langkah yang perlu demi tercapainya pergantian sistem pemerintahan. Maka dalam sidang tanggal 16 Oktober 1945 di Gedung Balai Muslimin Jakarta, KNIP mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan status baru kepada KNIP dari pembantu presiden menjadi suatu badan legislatif. Maklumat No. X sesungguhnya merupakan keputusan presiden sebagai jawaban atas usulan Komite Nasional Indonesia Pusat itu.²⁴

Proses lahirnya Maklumat No. X bisa dibaca dalam tulisan Pringgodigdo.²⁵ Dikatakan bahwa setelah sidang pertama tanggal 29 Agustus 1945, KNIP mengadakan sidang kedua tanggal 16 Oktober 1945. Dalam sidang kedua ini dibicarakan tentang usul supaya pekerjaan KNIP sehari-hari dijalankan oleh sebuah badan yang bernama Dewan Pekerja (*Working Comitee*) yang bertanggungjawab kepada KNIP. Usul ini diajukan karena sebagian besar anggota KNIP yang berasal dari daerah-daerah dibutuhkan di daerah untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah sehingga tidak bisa secara penuh bekerja dalam KNIP.

²⁴ *Ibid.*, hal. 27

²⁵ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sebagai hasil dari sidang kedua KNIP maka keluarlah Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 nomor X. Isi maklumat No. X adalah pertama, penyerahan kekuasaan legislatif oleh presiden yang sebelumnya mempunyai kekuasaan tunggal dan absolut dalam bidang legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat yang sebelumnya hanyalah badan pembantu presiden. Kedua, penyerahan kekuasaan kepada KNIP untuk turut menetapkan garis-garis besar haluan negara.

Maklumat No. X juga menyatakan bahwa berhubung dengan gentingnya keadaan yang menyebabkan KNIP tidak bisa jalankan pekerjaan secara efektif maka pekerjaan KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih dari antara anggota KNIP dan bertanggungjawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.²⁶

Menurut Maklumat Nomor X, ada dua tugas utama Badan Pekerja KNIP yaitu:²⁷

1. Turut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2. Bersama Presiden menetapkan Undang-Undang yang berkaitan dengan segala macam urusan pemerintahan.

Dengan dikeluarkannya maklumat ini maka terjadilah perubahan besar dalam hukum tata negara Republik Indonesia. Tugas KNIP tidak lagi berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan²⁸ tetapi berkaitan dengan fungsi legislasi. Demikian juga kekuasaan absolut presiden berakhir sejak adanya badan pengontrol pemerintah yaitu KNIP yang berubah fungsi. Dengan dikeluarkannya maklumat No. X maka jalan untuk membentuk partai-partai yang memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat terbuka lebar.

²⁶ Lihat Maklumat No. X di bagian lampiran tulisan ini

²⁷ Pringgodigdo, *op. cit.*, hal. 28.

²⁸ Sebelumnya, KNIP juga menjalankan tugas-tugas pemerintahan bahkan menjadi pembantu Presiden. Lihat Pringgodigdo, *op. cit.* hal. 24-26.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Untuk membantu kelancaran dan keefektifan kerja KNIP maka KNIP mendelegasikan wewenangnya kepada satu badan perwakilan kecil yang disebut Badan Pekerja yang anggotanya terdiri dari anggota-anggota badan induk (KNIP) yang sesewaktu dapat dipanggil untuk bersidang. Badan ini beranggotakan 15 orang dan bertanggungjawab kepada KNIP serta bersidang paling tidak 10 hari sekali, sedangkan KNIP bersidang paling kurang 1 tahun sekali.²⁹

Kemudian KNIP memilih Sjahrir sebagai ketua dan Sjarifuddin sebagai wakil ketua Badan Pekerja yang selanjutnya keduanya memilih anggota-anggota lainnya seperti Mr. Suwandi, Mr. Sjarifudin Prawiranegara, Kolopaking, Dr. A. Halim, Subadio Sastroatomo, Mr. Tam Ling Djie, Supeno, S. Mangunsarkoro, Adam Malik, Tajaludin dan Dr. Sudarsono. Selanjutnya anggota KNIP diperluas dari 150 menjadi 188 orang.³⁰ Tambahan anggota diambil dari para pemimpin terkemuka yang belum termasuk di dalam KNIP.

Badan Pekerja dalam kegiatannya kemudian menggariskan beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan dan mengatur keseimbangan kekuatan politik di Indonesia. Keinginan untuk mengubah struktur pemerintahan di dasarkan atas pertimbangan untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari bahaya pemerintahan yang otoriter serta organisasi politik yang otoriter dan totaliter. Di pihak lain perubahan sistem pemerintahan dilakukan untuk menghapus noda kolaborator dari pemerintahan yang sedang berlangsung. Penghapusan noda kolaborator dipandang dapat memperkuat kedudukan Republik Indonesia di dunia internasional terutama dalam rangka perundingan dengan Belanda.

²⁹ George Mc Tuman Kahin, *Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Solo: UNS Press. hal. 192.

³⁰ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.2.2. Maklumat 3 Nopember

Sebagai konsekwensi dari berubahnya fungsi dan status KNIP dari pembantu Presiden menjadi suatu lembaga legislatif yang memiliki fungsi sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat maka perlu dibentuk partai-partai. Partai-partai itulah yang kemudian akan memperebutkan kursi yang ada di badan legislatif (DPR). Karena itu, KNIP menganjurkan untuk mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan kemerdekaan.

Terbitnya maklumat 3 Nopember membawa beberapa akibat. Pertama mulai berlakunya sistem multi partai menggantikan sistem satu partai yang diberlakukan sebelumnya. Sebelum tanggal 3 Nopember hanya ada satu partai yang hidup dan berkembang di Negara Republik Indonesia. Partai yang dimaksud adalah Partai Nasional Indonesia yang disingkat PNI. PNI lalu menjadi partai pemerintah yang diharapkan bisa menjadi pendukung pemerintah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Akan tetapi tanggal 1 September 1945, Partai Nasional Indonesia dibubarkan karena beberapa alasan yakni: adanya kesan bahwa pemerintah ingin mempertahankan kekuasaannya yang tak terbatas dan ingin mendasarkannya atas satu partai tunggal yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Perkembangan ke arah diktator itu menimbulkan kegelisahan di kalangan KNIP yang menuntut supaya KNIP diakui sepenuhnya sebagai MPR-DPR darurat dan supaya hubungan pemerintah KNIP diatur menurut sistem parlementer.³¹ PNI juga dirasa menyamai dan menyaingi KNIP sehingga mungkin kelak dapat menimbulkan perpecahan.³² Setelah PNI dibubarkan maka berkembanglah

³¹ Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal. 26.

³² George Mc Turnan Kahin, *op. cit.*, hal. 186.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

organisasi atau kelompok yang dipimpin oleh Subardjo yang sudah mulai hidup dan berkembang sejak bulan terakhir masa pendudukan Jepang. Perkembangan kelompok yang dipimpin oleh Subardjo dianggap berbahaya oleh kelompok Sjahrir.³³ Kelompok Sjahrir menganggap klik Subardjo adalah suatu kelompok yang bersifat fasis karena dipimpin oleh individu-individu yang tidak disenangi oleh banyak orang karena kerjasama mereka dengan Jepang dan sikap politik mereka dianggap otoriter.

Agar organisasi yang dipimpin Subardjo ini tidak berkembang lebih jauh lagi maka kelompok Sjahrir mengusulkan untuk mulai menerapkan sistem multi partai di Negara Republik Indonesia yang baru dibentuk. Perombakkan sistem ini memang melemahkan pertumbuhan organisasi yang dipimpin Subardjo bahkan kemudian organisasi yang berada di bawah pimpinan Subardjo tidak bisa dipertahankan lagi karena bermunculan banyak partai baru.

Perubahan status KNIP berdasarkan maklumat No. X juga telah mendorong berdirinya partai-partai. Karena dengan statusnya yang baru berarti Negara Republik Indonesia mulai mengikuti pola sistem parlementer Eropah Barat. Sebagai konsekwensinya maka suara rakyat harus disalurkan lewat organisasi politik yang kemudian akan menduduki kursi parlemen. Karena itu partai-partai politik harus didirikan. Untuk itu Badan Pekerja KNIP mengusulkan agar sistem kepartaian tunggal diganti dengan sistem multi partai. Usulan untuk menerapkan sistem multi partai juga bertujuan untuk memberi kesan kepada dunia luar bahwa pemerintah Republik Indonesia sungguh-sungguh mau mengembangkan iklim demokrasi. Di samping itu, sistem multi partai bertujuan untuk mencegah berkembangnya partai tunggal yang bisa memberi kesan bahwa Negara Republik Indonesia bukanlah negara demokratis. Untuk

³³ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

itu maka dicarilah dasar untuk pembentukan partai-partai politik. Dasar itu ditemukan dalam aturan tambahan ayat 1 UUD 1945 yang menetapkan bahwa “Dalam enam bulan sesudah akhirnya perang Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini”.³⁴ Ayat ini dapat ditafsirkan bahwa 6 bulan setelah perang usai, di Indonesia harus diadakan Pemilu untuk memilih MPR-DPR.³⁵ Kelompok Sjahrir menjelaskan bahwa pemilihan itu akan bersifat demokratis kalau partai-partai politik ikut serta. Karena itu perlu didorong bertumbuhnya partai-partai yang akan bersaing dalam memperebutkan kursi-kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Maka atas usulan Badan Pekerja, Presiden menyetujui perubahan sistem kepartaian di Indonesia dari sistem partai tunggal ke sistem multi partai. Presiden tidak hanya menyetujui perubahan sistem kepartaian tetapi ia juga meminta agar partai-partai sudah terbentuk sebelum diadakan pemilihan umum yang rencananya akan diadakan pada bulan Januari 1946. Untuk itu dikeluarkanlah maklumat tanggal 3 Nopember 1945.

Maklumat 3 Nopember menyatakan dua hal.³⁶

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai politik itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur.
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat dalam bulan Januari 1946.

Dengan dikeluarkannya maklumat 3 Nopember 1945 yang berisi anjuran mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan kemerdekaan, maka sejak saat itu

³⁴ G. Moedjanto, *op. cit.* hal. 143

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Pramudia Ananta Tur, Jilid I, *op. cit.* hal. 438.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berkembanglah berbagai partai politik. Berikut ini dikemukakan partai-partai yang berkembang sejak Maklumat 3 Nopember diumumkan.

1. Partai Sosialis

Partai ini merupakan fusi dari Partai Sosialis Indonesia (Parsi) yang didirikan Amir Syarifuddin pada tanggal 1 Nopember 1945 dan Partai Rakyat Sosialis (Paras) yang didirikan Sjahrir pada tanggal 20 Nopember 1945. Fusi ini terjadi pada pertengahan bulan Desember 1945 dalam konferensi yang diadakan di Cirebon. Partai ini adalah partai kader yang memiliki anggota-anggota terpelajar dan mempunyai kesadaran politik yang tinggi sehingga pengaruhnya besar.³⁷

2. Partai Komunis Indonesia

Partai ini didirikan pada tanggal 21 Oktober 1945 tetapi baru diperkenalkan secara resmi tanggal 7 Nopember 1945. Partai ini dipimpin oleh Mr. Moh. Yusuf. Partai ini tidak mempunyai hubungan dengan gerakan komunis pada tahun 1926 atau PKI Musa 1935.

3. Partai Buruh Indonesia

Pada tanggal 9 Nopember 1945, para pemimpin Barisan Buruh Indonesia yang baru didirikan membentuk Partai Buruh Indonesia. Selama beberapa bulan partai ini dipimpin oleh orang-orang Indonesia yang pernah bekerja di Jawatan Perburuan Jepang, yang dekat hubungannya dengan Subarjo. Tetapi dengan pulangnya Setiajid dari Negeri Belanda pada permulaan tahun 1946, kekuasaan partai ini beralih kepada kelompok kolaborator dan dipimpin oleh Setiajid. Untuk masa 18 bulan berikutnya partai ini adalah pendukung partai sosialis.

³⁷ Penjelasan tentang timbulnya Partai-partai diambil dari Poerwantana, *op. cit.* hal. 27-31 dan G. Moedjanto, *op. cit.* hal. 126-130.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ada juga golongan yang tidak mendukung Partai Sosialis yaitu golongan yang berada di bawah pimpinan Syamsu Harya Udaya. Golongan ini mempunyai garis perjuangan mirip dengan garis perjuangan Tan Malaka.

4. Partai Rakyat Jelata atau Murba

Didirikan pada bulan Nopember 1945 oleh sejumlah politisi yang mendukung gagasan Tan Malaka. Partai ini dipimpin oleh Sutan Dewanis dan Maruto Nitimiharjo. Partai Rakyat Jelata banyak terlibat dalam pembinaan Persatuan Perjuangan yang diharapkan bisa menjadi wadah persatuan partai-partai dan memberi jalan kepada Tan Malaka supaya bisa memegang kekuasaan.

- Tahun 1948 bersama dengan PBI (Partai Buruh Indonesia) Syamsu Harya Udaya dan sejumlah perkumpulan yang lain mendirikan GRR (Gerakan Rakyat Revolusioner) dan kemudian berfusi menjadi Partai Murba.

5. Masyumi

Masyumi didirikan pada tanggal 7 Nopember 1945 di Yogyakarta. Walaupun menggunakan nama perkumpulan sosial yang didirikan pada masa pendudukan Jepang, Masyumi adalah partai yang lain dan baru sama sekali dari Masyumi pada zaman Jepang karena Masyumi yang didirikan pada tanggal 7 Nopember 1945 dipimpin oleh tokoh-tokoh yang tidak erat bekerja sama dengan Jepang termasuk ketuanya: Sukiman Wiryosanjoyo. Partai ini adalah gabungan dari semua organisasi Islam non politik yang dulu ikut Masyumi pada zaman Jepang termasuk Muhammadiyah dan Nah Datul Ulama, maupun organisasi-organisasi politik sebelum perang seperti Partai Sarekat Islam Indonesia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Masyumi bertujuan menegakkan kedaulatan negara dan agama Islam serta melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Partai ini memiliki laskar Hisbullah dan Sabilillah yang terorganisir dengan baik serta bersenjata.

6. Serindo – PNI

Pada mulanya didirikan dalam bentuk Pengurus Sementara Partai yang diberi nama SERINDO (Serikat Rakyat Indonesia). Baru dalam kongres yang diadakan di Yogyakarta dari tanggal 18 Januari sampai 1 Februari 1946 dicapai kata sepakat untuk menggunakan nama PNI (Partai Nasional Indonesia). Terpilih sebagai ketua pada kongres itu adalah Sarmidi Mangunsarkoro.

Berbeda dengan partai-partai lain yang memegang peranan penting di zaman revolusi, PNI tidak memiliki laskar yang sepenuhnya tunduk kepadanya seperti Hisbullah untuk Masyumi dan Pesindo untuk Partai Sosialis. Barisan Banteng yang sering dianggap sebagai laskar PNI dalam perkembangannya nampak lebih dekat dengan Persatuan Perjuangan, GRR dan Partai Murba.

2.2.3. Pengumuman Badan Pekerja Tanggal 11 Nopember

Pada tanggal 11 Nopember 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Pusat mengeluarkan pengumuman yang berisi tentang persetujuan presiden atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tentang pertanggungjawaban menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat dalam hal ini KNIP.

Ada beberapa alasan yang mendasari usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Menurut pengumuman Badan Pekerja no. 5³⁸, yang menjadi dasar hukum pertanggungjawaban menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat adalah Pasal IV aturan

³⁸ Pringgodigdo, *op.cit.* hal. 73

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

peralihan Undang-Undang Dasar yang dirubah. Dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara RI, tidak terdapat pasal yang mewajibkan atau pun melarang para menteri bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di pihak lain, pertanggungjawaban Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat adalah jalan untuk memberlakukan kedaulatan rakyat. Maka berdasarkan alasan tersebut Badan Pekerja mengusulkan pertanggungjawaban menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri penerangan pada masa Kabinet Sjahrir I, Amir Sjarifudin memberi penjelasan tentang alasan pertanggungjawaban menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat sbb:

“bahwa di dalam prakteknja Presiden tidak dapat mendjalankan pekerdjaan legislatif dengan Dewan Perwakilan Rakdjat, apabila tidak dibantu oleh Menteri-Menterinja. Djadi didalam pembentukan Undang-Undang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat itu Menteri jang bersangkutanlahjng sesungguhnya harus berhadapan dengan Dewan tersebut. Akan tetapi tanggung djawab tetap terletak pada Presiden. Hal inilah jang tidak memuaskan, karena dengan tjara demikian Presiden mendjadi sangat mudah dapat kena tjelaan. Sebab kalau seandainya seorang Menteri didalam pekerdjaannja terhadap D.P.R. berkesalahan maka jang harus menanggung djawab kepada rakjat (M.P.R.) bukanlah Menteri itu, melainkan Presiden. Betul Presiden dapat menghentikan Menteri itu dari djabatannja, akan tetapi hal jang demikian tidak akan menghilangkan pandangan tidak baik terhadap Presiden, jang seolah-olah mengoper kesalahan Menteri itu. Dari sebab itu timbul pertanjaan apakah tidak mungkin soal pertanggungdjawab jang tidak memuaskan itu diubah begitu rupa sehingga Menteri Negararpun bertanggung djawab kepada rakdjat”.³⁹

Presiden Soekarno menerima usul KNIP lalu keluarlah Pengumuman Badan Pekerja pada tanggal 11 Nopember 1945 yang memungkinkan perubahan sistem pemerintahan di Republik Indonesia dari pemerintahan Presidensiil ke pemerintahan Parleментар. Namun perubahan ini tidak terjadi pada tataran Undang-Undang Dasar sebab Undang-Undang Dasar yang mengatur pemerintahan presidensiil tetap berlaku. Perubahan justru terjadi pada tataran pelaksanaan.

³⁹ *Ibid.*, hal. 38.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perubahan sistem pemerintahan itu juga berkaitan erat dengan situasi politik dalam negeri di mana ada usaha dari kelompok Tan Malaka yang didukung Soebardjo untuk menggeser kepemimpinan Soekarno. Untuk mencapai keinginannya Tan Malaka pernah mengajak Sjahrir untuk bergabung dengan konsensi kalau berhasil maka Sjahrir menjadi Perdana Menteri dan memegang beberapa kementerian penting sedangkan Tan Malaka sebagai Presiden dengan memegang kementerian perburuhan. Tapi ajakan ini ditolak Sjahrir. Tidak puas dengan itu, Tan Malaka langsung menemui Soekarno dan mendesak Presiden untuk membuat surat wasiat tentang pelimpahan kekuasaan kepada Tan Malaka dkk kalau Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda.⁴⁰

Sementara itu, di dalam kelompok revolusioner yaitu mahasiswa terdapat kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap pola otoriter pemerintah darurat Soekarno dan terutama kecewa terhadap susunan kabinet yang berbau Jepang. Kabinet Presidensiil pertama didominasi oleh orang-orang yang pernah memegang jabatan tinggi pada masa pendudukan Jepang. Kelompok mahasiswa berpendapat bahwa sistem presidensiil terlalu otoriter apalagi kalau dijalankan oleh kabinet seperti yang ada. Karena itu ada usaha untuk mengganti kabinet yang ada dengan kabinet yang baru. Untuk mencegah supaya jangan sampai Tan Malaka berkuasa dan di pihak lain tetap mendukung Soekarno, maka dirasa perlu diadakan perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Republik, misalnya Kabinet mulai bertanggungjawab kepada KNIP.

Pengumuman Badan Pekerja tanggal 11 Nopember 1945 memuat usul Badan Pekerja tentang pertanggungjawaban menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat yang telah disetujui oleh Presiden.⁴¹ Dengan maklumat ini maka Negara Republik Indonesia

⁴⁰ George Mc Turnan Kahin, *op. cit.* hal. 187-190, 211.

⁴¹ isi lengkap maklumat lihat di bagian lampiran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mulai menerapkan sistem pemerintahan parlementer di mana kepala pemerintahan dan kepala negara dipisahkan dan tanggungjawab menteri tidak lagi kepada presiden tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai realisasi dari pengumuman Badan Pekerja tanggal 11 Nopember 1945 maka Pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang Pembentukan Kabinet II dengan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menterinya. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember menetapkan beberapa tindakan demokratis yang perlu dijalankan oleh pemerintah seperti mengadakan pemilihan umum, menganjurkan kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai guna menyalurkan segala pikiran politik dalam negara. Maklumat 14 Nopember juga menyatakan bahwa partai-partai politik tidak akan dilarang sejauh dasar dan aksinya tidak melanggar asas-asas demokrasi yang sah.⁴²

Pada tanggal 14 Nopember 1945 diumumkanlah susunan Kabinet Sjahrir I sebagai berikut.⁴³

St. Sjahrir	- Perdana Menteri
	- Menteri Luar Negeri
	- Menteri Dalam Negeri
Mr. A. Sjarifudin	- Menteri Penerangan
	- Menteri Keamanan Rakyat
Mr. Soenarjo Kolopaking	- Menteri Keuangan
Dr. T.G.S. Mulia	- Menteri Pengajaran
Mr. Suwandi	- Menteri Kehakiman

⁴² Pringgodigdo, *op. cit.* hal. 74-75. Isi lengkap Maklumat Pemerintah ada di bagian lampiran tulisan ini.

⁴³ Susunan Kabinet Sjahrir I dikutip dari Pringgodigdo, *ibid.* hal. 74. bdk. Suprpto, *op. cit.* hal. 29.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dr. Adji Darmo	- Menteri Sosial
Dr. Darmasetiawan	- Menteri Kesehatan
Ir. Darmawan	- Menteri Kemakmuran
Ir. Putuhena	- Menteri Pekerjaan Umum
Ir. Abd. Karim	- Menteri Perhubungan
H. Rasjidi	- Menteri Negara

Dalam kabinet ini banyak perangkapan jabatan, yang sebenarnya tidak efektif karena pada waktu itu selain menteri yang memegang jabatan kementerian tersebut, masih banyak tenaga ahli yang mampu memegang jabatan kementerian tetapi tidak dipilih karena tidak satu klik dengan Sjahrir. Perangkapan jabatan itu seperti Sutan Sjahrir merangkap sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Demikian juga Amir Sjarifuddin merangkap sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Pertahanan.

Kabinet ini akhirnya banyak mengalami perubahan komposisi antara lain:⁴⁴

1. Tanggal 5 Desember 1945 Mr. Sunaryo Kolopaking diganti oleh Ir. Suralman Cokrodipuro sebagai menteri keuangan.
2. Tanggal 5 Desember 1945 itu juga Dr. Aji Darmo Cokronegoro diganti oleh Dr. Sudarsono sebagai Menteri Sosial.
3. Tanggal 3 Januari 1946 Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin diganti oleh Muhammad Natsir. Amir Sjarifuddin tidak merangkap lagi, hanya sebagai Menteri Pertahanan. Pada tanggal 3 Januari 1946 pula dibentuk satu kementerian baru yaitu Kementerian Agama dengan Menterinya H. Rasyidi, B.A.

⁴⁴ Suprpto, *ibid.* hal. 30

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Bulan Januari 1946 S. Yosodiningrat menggantikan Abdul Murad sebagai Menteri Muda Pertahanan / Keamanan Rakyat.

Sjahrir dan Amir Syarifudin menyusun kabinet dengan tujuan mematangkan sikap Indonesia untuk menghadapi diplomasi dengan Sekutu Belanda. Karena itu, ahli-ahli yang dipilih untuk menjadi anggota kabinet adalah mereka yang sudah bekerja sejak jaman Belanda. Namun pemilihan anggota kabinet yang pernah bekerja pada masa pemerintahan kolonial Belanda menimbulkan kritik tersendiri. Mereka dikuatirkan akan bersikap lunak terhadap Belanda.⁴⁵

Reaksi negatif pertama sekali muncul dari beberapa ahli hukum tata negara seperti yang berpendapat bahwa pembentukan Kabinet Sjahrir I yang bersifat parlementer merupakan satu penyimpangan dari UUD 1945.

Reaksi negatif juga datang dari beberapa golongan seperti dari golongan pemuda revolusioner, kaum tua, dan terutama menteri-menteri yang telah tersingkir dan dendam terhadap Sjahrir oleh tulisannya dalam buku kecil *Perjuangan Kita*. Demikian juga kelompok yang kecewa dengan susunan kabinet yang dianggap terlalu teknokratis dan tidak revolusioner memberikan reaksi yang negatif.⁴⁶ Hal yang sama juga terjadi pada para pemuda revolusioner yang semula bersama-sama dengan Sjahrir mulai menjauhkan diri dan mendekati Tan Malaka. Hadirnya empat orang Kristen dalam kabinet mendapat kritikan tersendiri yang berujung pada kecurigaan yang mendalam oleh kelompok pemuda dan rakyat banyak. Sjahrir mengakui bahwa reaksi umum dari susunan kabinetnya adalah sebagian dingin dan sebagian lagi menolak dengan keras.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ O.E. Engelen, et.al., *op.cit.*, hal. 218.

⁴⁷ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Di samping kritikan terdapat juga dukungan terhadap Kabinet Sjahrir I. Kalangan kelompok khusus di Belanda yang mengenal Sjahrir merasa lega dan puas ketika mengetahui bahwa Sjahrir telah diangkat menjadi Perdana Menteri. Orang-orang yang berada di sekitar Van Mook dan Logemann juga mendukung dan merasa terkesan dengan Sjahrir. Mereka bahkan dikritik di Belanda karena mendukung dan menerima Sjahrir sebagai Perdana Menteri dalam kabinet yang baru. Mereka bahkan melukiskan Van Mook dan Logemann dalam bentuk karikatur di mana keduanya mengenakan kopiah sebagai pernyataan perendahan martabat mereka. Dukungan terhadap Sjahrir dan kabinetnya juga dilakukan oleh beberapa penerbit di Nederland yang berusaha memperkenalkan Sjahrir melalui penerbitan kembali tulisan-tulisan Sjahrir sebelumnya.⁴⁸

Dukungan juga berasal dari KNIP setelah mengadakan sidang tanggal 25-27 Nopember 1945 atas permintaan kabinet. Dalam sidang itu, sebanyak 84 orang anggota KNIP mendukung kabinet Sjahrir I dan 15 abstain. Apapun bentuk dukungan dan kritikan, Kabinet Sjahrir tetap hidup dan berjalan walaupun hanya empat bulan.

Rangkuman

Dari uraian di atas tampak bahwa Kabinet Sjahrir I dibentuk untuk menjawab situasi dalam dan luar negeri yang terus menerus mengeritik pemerintahan Kabinet Presidensiil pertama. Ada kritikan dari dalam negeri yang menganggap pemerintah kurang mampu memimpin bangsa Indonesia dalam menghadapi Belanda yang mau menjajah kembali Indonesia. Hal ini terlihat dari sikap pemerintah yang lebih cenderung untuk bekerjasama dengan Sekutu padahal Sekutu jelas-jelas diboncengi Belanda yang

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 518.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ingin menguasai kembali Indonesia dan di pihak lain terus menerus menghimbau rakyat Indonesia untuk tidak menentang atau melawan pasukan Sekutu. Sedangkan kritikan dari luar negeri terhadap pemerintahan Republik Indonesia adalah bahwa pemerintahan Republik Indonesia adalah pemerintahan yang fasis dan tidak demokratis karena merupakan pemerintahan bentukan Jepang yang adalah negara fasis menurut pandangan negara-negara Barat. Kedua kritikan seperti itu sama-sama tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Maka timbul desakan untuk menggantikan pemerintahan yang ada dengan suatu pemerintahan baru yang lebih sesuai dengan kehendak rakyat dan lebih demokratis.

Usaha untuk membentuk pemerintahan baru mulai terlaksana dengan dikeluarkannya Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah status KNIP dari badan pembantu Presiden menjadi suatu badan legislatif penuh. Selanjutnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang pembentukan partai politik dan akhirnya Maklumat Pemerintah tanggal 11 Nopember 1945 tentang pembentukan Kabinet Sjahrir I.

Usaha pembentukan Kabinet Sjahrir I sebetulnya tidak berjalan mulus, karena banyak pihak yang menentang Kabinet Sjahrir I. Penentangan terhadap pembentukan Kabinet Sjahrir I didasarkan pada pemikiran bahwa dengan dibentuknya Kabinet Sjahrir I yang berbentuk parlementer maka akan terjadi penyimpangan dari UUD 1945 yang menetapkan bahwa Sistem Pemerintahan Republik Indonesia adalah presidensiil. Penentangan selanjutnya terjadi setelah kabinet terbentuk yaitu ketika melihat komposisi kabinet yang dianggap tidak representatif sebab hampir semua anggota kabinet adalah orang-orang yang dekat dengan Perdana Menteri. Namun demikian tidak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sedikit pula yang mendukung terbentuknya Kabinet Sjahrir I karena Kabinet Sjahrir I dianggap demokratis.



BAB III

USAHA KABINET SJHRIR I DALAM MENGISI KEMERDEKAAN

Ada beberapa usaha yang dilakukan Kabinet Sjahrir I dalam mengisi kemerdekaan seperti menanggulangi ancaman penjajahan kembali oleh Belanda dan membangun Negara Republik Indonesia yang baru dibentuk. Usaha-usaha ini sebetulnya dapat dilihat dari Maklumat yang dikeluarkan pemerintahan Sjahrir I tanggal 17 Nopember 1945. Dalam maklumat itu dinyatakan bahwa politik luar negeri yang akan dijalankan kabinet yang baru tetap seperti yang tertuang dalam Maklumat tanggal 1 Nopember 1945. Kabinet dalam hal ini tetap menuntut kemerdekaan Indonesia sepenuhnya dengan tetap mengindahkan kewajiban-kewajiban negara merdeka di dalam hubungan internasional serta kewajiban dalam usaha bersama membangun tatanan dunia baru berdasarkan cita-cita dalam perjanjian perdamaian (*Charter for Peace*).⁴⁹ Dinyatakan pula bahwa dalam menyempurnakan susunan Negara Indonesia akan diperhatikan sepenuhnya kepentingan asing serta kedudukan penduduk asing di dalam Negara Indonesia. Dalam hubungan dengan ini akan ditempuh segala macam usaha, juga dengan cara melakukan perundingan-perundingan dan yang bersangkutan akan

⁴⁹ O.E.Engelen, et.al. *op. cit.*, hal. 219-220.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diperhatikan dengan sekali-kali tidak meninggalkan maupun mengurangi kedaulatan negara.⁵⁰

Dalam usahanya ke dalam (politik dalam negeri), kabinet akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁵¹

1. Menyempurnakan susunan pemerintah daerah berdasarkan kedaulatan rakyat
2. Mencapai koordinasi segala tenaga rakyat di dalam usaha menegakkan Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan
3. Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat di antaranya dengan jalan pembagian makanan
4. Berusaha mempercepat permasalahan tentang uang Republik Indonesia.

Berikut ini akan dijelaskan usaha yang dilakukan oleh Kabinet Sjahrir I dalam mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

3.1. Menanggulangi Ancaman Penjajahan Kembali Belanda

Setelah meninggalkan Indonesia karena dikalahkan Jepang, Belanda tetap berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia didasarkan pada dua hal. Pertama: masih adanya anggapan bahwa Belanda tidak mungkin bertahan hidup tanpa Indonesia karena Belanda

⁵⁰ *Ibid.* hal. 220.

⁵¹ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

banyak dihidupi oleh hasil-hasil bumi Indonesia. Kedua: Belanda menyatakan bahwa dari hukum internasional Indonesia bukan lagi koloni, melainkan wilayah yang sejajar dengan wilayah Belanda di Eropah. Indonesia dianggap dan diakui kemudian oleh dunia internasional sebagai wilayah Belanda di seberang lautan.⁵²

Untuk memenuhi keinginannya, maka sejak bulan April 1944 Belanda telah menyiapkan diri untuk kembali menguasai Indonesia. Karena itu, maka pada bulan April 1944 pemerintah Belanda dan Inggris mengadakan perundingan di London dan Candy yang menghasilkan apa yang disebut *Civil Affairs Agreement* yang antara lain berisi pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada pihak Belanda.⁵³ *Civil Affairs Agreement* ini baru disahkan pada tanggal 24 Agustus 1945 di London setelah diperkuat dengan hasil perundingan antara Inggris dan Belanda di Singapura pada tanggal 6 Agustus 1945. Dalam perundingan di Singapura itu dinyatakan bahwa Christison diberi kekuasaan penuh untuk menjaga keamanan di Jawa dan akan menggunakan segala cara untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia.⁵⁴ Maka ketika Inggris yang mewakili Sekutu mendarat di Indonesia, Belanda pun ikut masuk bersama pasukan Inggris. Selanjutnya, Belanda pelan-pelan mulai mengambil tindakan sebagai orang yang berkuasa atas Indonesia. Mayor F.E. Crockett staf jendral Christison seperti yang dikutip Kahin mencatat:

⁵² G. Moedjanto, *op. cit.*, hal. 99.

⁵³ *Ibid.*, hal. 96.

⁵⁴ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid I*, Bandung: Angkasa, 1996, hal. 286. bdk. *Soeloeh Merdeka*, 13 Desember 1945 hal. 1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berbarengan dengan kedatangan Jendral van Oyen, di jalan-jalan (Jakarta) mulai tampak barisan patroli Belanda dan Ambon (serdadu KNIL) yang getol menembak. Mereka menembak segala yang tampak mencurigakan, dan bila tidak ada yang dapat dijadikan sasaran, mereka tidak segan-segan merampas rumah penduduk, dan tanpa tuduhan atau peringatan, menyeret keluar beberapa atau seluruh penghuninya.....” Insiden-insiden” itu meningkat. Kaum nasionalis mendapat perintah bahwa setiap perlawanan dari pihak mereka akan ditumpas oleh para penguasa. Untuk mencegah...., Soekarno memerintahkan agar semua orang Indonesia menyingkir dari jalan-jalan di Batavia pada malam hari. Menjelang jam 8.00 malam, jalan sudah kosong kecuali barisan patroli Belanda yang mondar-mandir. Ini adalah contoh mengesankan cara Soekarno memerintah rakyat.⁵⁵

Tindakan Belanda yang berusaha menjajah kembali Indonesia dan tindakan Inggris yang membantu mewujudkan keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia tidak dapat diterima oleh Bangsa Indonesia. Oleh karena itu timbullah pelbagai perlawanan dari Bangsa Indonesia baik terhadap Inggris maupun terhadap Belanda.

Usaha untuk menanggulangi ancaman bahaya penjajahan kembali Belanda di Indonesia dilakukan dengan dua pola atau strategi. Pertama melalui strategi diplomasi dan yang kedua melalui strategi perjuangan fisik atau perjuangan militer. Kedua strategi ini sama-sama digunakan untuk mendapatkan hasil maksimal dari perjuangan melawan Belanda dan Inggris. Berikut akan diuraikan dua jenis strategi itu dan dampak yang ditimbulkan dari kedua strategi yang dimaksud.

⁵⁵ George Mc Turnan Kahin, *op. cit.*, hal. 181.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3.1.1. Strategi Diplomasi

Yang dimaksud dengan perjuangan diplomasi adalah perjuangan dengan menggunakan kemampuan berunding atau perjuangan dengan kemampuan menggunakan kata-kata dalam menghadapi pihak lawan. Dalam perjuangan diplomasi diusahakan untuk menarik simpati dan pengakuan dunia internasional dengan cara hendak menunjukkan adanya kematangan bernegara, yang hendak dicapai dengan jalan apa pun.⁵⁶

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, strategi ini telah digariskan pada jaman Soekarno dan dipraktekkan oleh Sjahrir dan Amir. Strategi ini didasarkan pada pandangan yang pesimistis terhadap kekuatan militer dalam negeri dan pada pertimbangan kekuatan dunia dan kekuatan revolusi Indonesia. Bagi para penganut strategi ini, diplomasi merupakan kunci bagi kelangsungan hidup RI. Pokok pangkal pikiran ini menyebabkan mereka mau mengabdikan segala sesuatu untuk mencapai penyelesaian dengan Belanda yang dijamin negara-negara besar. Pemerintahan Kabinet Sjahrir I dalam pernyataannya melalui Perdana Menteri Sutan Sjahrir menyatakan bahwa berkaitan dengan perselisihan dengan Belanda pemerintah akan melanjutkan politik yang telah dijalankan oleh pemerintah yang terdahulu, yaitu politik diplomasi dan perjuangan fisik. Penggunaan politik diplomasi sejalan dengan garis pemikiran Sjahrir tentang revolusi demokratis yang menekankan pentingnya arti demokrasi buat melawan kecenderungan

⁵⁶ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Diplomasi Atau Bertempur Jilid 2*, Bandung: Angkasa, 1996, hal. 89.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

fasisme yang masih membekas, terutama di kalangan pemuda, akibat pengaruh pendudukan Jepang. Dengan kata lain, Sjahrir tidak menginginkan semangat revolusi yang meluap menjadi terorisme yang tidak bertanggungjawab terhadap orang-orang Belanda, Indo dan kelompok-kelompok minoritas yang dianggap pro Belanda seperti Cina, Ambon dan Menado. Penggunaan strategi diplomasi dalam perjuangan kemerdekaan juga berkaitan erat dengan pandangan Sjahrir tentang kedudukan Indonesia yang sangat lemah pada waktu itu yang menurutnya berada di daerah pengaruh kekuatan kapitalis Amerika Serikat dan Inggris, dan oleh karena itu tidaklah bijaksana bagi negara muda yang masih rapuh untuk memusuhi mereka. Sjahrir bahkan melihat bahwa nasib Indonesia amat tergantung pada kebijaksanaan politik yang akan diambil oleh kekuatan imperialis itu. Dari situ dia mengambil kesimpulan bahwa satu-satunya jalan untuk menjamin kemerdekaan Indonesia ialah melalui “diplomasi yang lihai dan fleksibel, agar Amerika dan Inggris tidak terundang buat mendukung Belanda secara penuh”.⁵⁷ Pola diplomasi juga perlu diambil mengingat Belanda memiliki persenjataan yang lebih baik dari pada angkatan perang Indonesia yang masih terlalu lemah dalam organisasi, disiplin, pengalaman dan pengetahuan militer yang modern. Di samping itu, pola diplomasi juga akan memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk menarik napas sehingga dapat memperkuat tenaganya dan juga bisa menghemat sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya yang akan

⁵⁷ William H. Frederik, Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, Jakarta: LP3ES, 1991, hal. 351.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dapat dipergunakan untuk pembangunan.⁵⁸ Pola diplomasi juga dianggap lebih ampuh untuk meyakinkan dunia internasional yang menjunjung tinggi demokrasi dan perjuangan tanpa kekerasan.

Namun untuk melaksanakan strategi diplomasi diperlukan kondisi politik dalam negeri yang kondusif. Untuk jelasnya dapat dikatakan bahwa diplomasi menuntut kegiatan-kegiatan pemuda dikendalikan, hak milik asing dilindungi, aksi-aksi revolusioner yang tak terkendalikan harus ditekan. Di pihak lain diplomasi mengharuskan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkena pembinaan kembali ketika pemerintahan ditata ulang.⁵⁹ Mereka adalah orang-orang bekas pemerintahan sebelumnya yang seringkali tidak sejalan dalam pikiran dan strategi. Ini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pemerintah.

Sasaran perjuangan diplomasi adalah mengusahakan pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia.⁶⁰ Untuk itu masalah Indonesia perlu di bawah ke forum internasional dalam hal ini PBB sehingga persoalan antara Indonesia dengan Belanda bukan lagi persoalan dalam negeri seperti yang dinyatakan oleh Belanda di forum internasional tetapi menjadi persoalan internasional. Di forum internasional Belanda selalu beranggapan bahwa persoalan di Indonesia adalah persoalan dalam negeri karena itu tidak perlu ada campur tangan dunia internasional. Dengan cara itu, mereka akan mudah

⁵⁸ Bantoro Bandoro, et.al. *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: CSIS, 1995, hal. 967.

⁵⁹ G. Moedjanto, *op. cit.*, hal. 157.

⁶⁰ *Kedaulatan Rakyat*, 11 Desember 1945.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menanamkan lagi pengaruh dan kekuasaan mereka di Indonesia. Sedangkan pemerintah Indonesia melihat bahwa persoalan antara Indonesia dan Belanda perlu didorong agar menjadi persoalan internasional. Kalau sudah menjadi persoalan internasional maka Belanda tidak hanya mendapat tekanan dari dalam negeri tetapi juga mendapat tekanan dari dunia internasional. Politik seperti ini memang dirasa lebih memungkinkan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Tindakan diplomasi dilakukan baik melalui perundingan-perundingan dengan pihak Sekutu dan Belanda maupun melalui seruan-seruan terhadap dunia internasional untuk memberikan pengakuan terhadap Negara Republik Indonesia, bahkan perjuangan untuk menarik perhatian dunia luar juga dilakukan dalam bentuk protes-protes dari Bangsa Indonesia terhadap perlakuan yang sewenang-wenang dari tentara pendudukan.

Perundingan dengan Belanda di bawah Kabinet Sjahrir berlangsung pertama kali pada 17 Nopember 1945. Perundingan ini berlangsung di bawah pimpinan Panglima Tentara Sekutu bertempat di Markas Besar Tentara Inggris, jalan Imam Bonjol 1 Jakarta. Dari pihak Belanda hadir: Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook, Dr. Ch. O. van der Plas, Dr. P.J.A. Idenburg dan Prof. Baron van Asbek. Sedangkan dari pihak Indonesia hadir Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifuddin, Menteri Pekerjaan Umum Ir. Putuhena, dan Menteri Perhubungan Ir. Abdul Karim. Dari pihak Inggris hadir

Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Dr. M. E. Dening dan Brigadir Jenderal Wingrave.⁶¹

Dalam perundingan itu Panglima Christison menjelaskan bahwa perundingan itu dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang tawaran kemauan baik pemerintah Belanda yang akan disampaikan oleh van Mook dan pendirian Pemerintah Inggris akan disampaikan oleh Dening, seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Inggris. Dikemukakan bahwa buku *Perjuangan Kita* yang ditulis oleh Sjahrir tentang pengaruh buruk dari pendudukan Jepang di Indonesia dianggap positif oleh Pemerintah Inggris. Christison juga menyatakan bahwa dirinya mendapat kuasa dari pemerintah Inggris untuk menyatakan bahwa usul Belanda juga positif dan baik. Hanya dalam hal kedaulatan, pemerintah Inggris mengakui kedaulatan Belanda atas kepulauan Indonesia.

Christison juga menjelaskan bahwa di dalam pemerintahan Inggris ada dominion yang mempunyai pemerintahan dan kemerdekaan sendiri dan hanya mempunyai ikatan persemaikmuran dengan Mahkota Inggris. India dan Birma dinyatakan sedang dalam proses perkembangan menuju kepada dominion. Sedangkan dari pihak Belanda, Dr. van Mook menjelaskan bahwa asas fundamental pemerintah Belanda adalah menghendaki kerja sama dan berdiri sama tinggi. Kedua belah pihak harus bekerja sama untuk meniadakan dan menyelesaikan dalam waktu yang singkat ancaman terhadap kebebasan dan keamanan yang ditimbulkan oleh tidak adanya ketertiban hukum yang kian hari

⁶¹ O.E. Engelen, et al. *op. cit.*, hal. 220.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kian meningkat dan untuk bersama-sama melucuti serta memulangkan pasukan Jepang.⁶²

Terhadap sikap dan pandangan pihak Inggris dan Belanda, Sjahrir mengucapkan terimakasih dan menyatakan bahwa perlu diberi waktu paling kurang satu minggu kepada Pemerintah Indonesia untuk mempelajari usul yang dikemukakan pemerintah pendudukan Sekutu dan Belanda.⁶³ Akan tetapi pemerintah Inggris mendesak agar dalam waktu lima hari pertemuan berikut dapat dilaksanakan. Janji pertemuan berikut hampir gagal setelah pasukan NICA menembak Ketua KNI Jakarta Mr. Moh. Roem di rumahnya di jalan Kwitang dan menembak penduduk laki-laki serta menyerbu dan menghancurkan kantor polisi di Prapatan.

Perundingan lainnya berlangsung di Sumatera pada bulan Nopember 1945 antara Pemerintah Republik Indonesia di Sumatera dengan wakil-wakil tentara Sekutu yang berlangsung di Grand Hotel, Medan. Dalam perundingan itu dari pihak Republik hadir Gubernur Sumatera Mr. Teuku Mohammad Hassan, Dr. Mohammad Amir, Mr. Mohammad Jusuf dan Mr. Luat Siregar. Di pihak Sekutu hadir Panglima Sekutu di Indonesia Letnan Jenderal Sir. Philips Chrstison, Panglima Sekutu di Sumatera yang berkedudukan di Padang Mayor Jenderal Chambers, dan Panglima Sekutu untuk daerah Medan Brigadir Jenderal Kelly. Dalam pertemuan itu Gubernur Sumatera menekankan bahwa seluruh rakyat

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Indonesia menuntut kemerdekaan 100% tanpa dapat ditawar-tawar lagi. Ia pun menyatakan bahwa Jawa, Sumatera dan seluruh kepulauan lainnya di Indonesia tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain.⁶⁴

Usaha menentang pendudukan kembali Indonesia oleh Belanda juga dilakukan melalui protes-protes baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Protes keras misalnya dilakukan oleh Konggres Pemuda Indonesia di Yogyakarta yang bersidang tanggal 10 dan 11 Nopember. Protes ditujukan kepada seluruh dunia atas pemboman dan penembakan sewenang-wenang dari udara, laut dan darat oleh tentara pendudukan Inggris terhadap kota Surabaya.⁶⁵ Protes juga dilakukan oleh pemerintah atas pembakaran kota Bekasi oleh Sekutu.⁶⁶

Sedangkan KNIP dalam sidang plenonya pada bulan Desember 1945 mengeluarkan resolusi untuk memprotes dengan keras pucuk pimpinan tentara Inggris di Indonesia yang telah melancarkan berbagai serangan terhadap rakyat Indonesia. Resolusi itu juga meminta pemerintah Indonesia agar mendesak PBB menarik pendudukan Inggris dan Belanda. Dalam point lain resolusi, KNIP mendorong untuk menyelesaikan pertikaian politik Indonesia dengan cara damai.⁶⁷

⁶⁴ Osman Raliby, *Documenta Historica I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1953 seperti dikutip Pramudia Anantatur dalam *Kronik Revolusi Indonesia Jilid 1*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 1999, hal 190.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 159.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 257.

⁶⁷ Isi lengkap resolusi KNIP, *ibid.*, hal. 206-209.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perjuangan diplomasi yang dilakukan pemerintah dan bangsa Indonesia berdampak luas bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Simpati dari dunia internasional terhadap perjuangan rakyat Indonesia bermunculan. Radio Moskow memberitakan bahwa pemerintah Uni Soviet telah menyatakan rasa simpatinya terhadap perjuangan rakyat Indonesia, bahkan Rusia kemudian membawa soal Indonesia untuk dibicarakan dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Dalam sidang itu dikemukakan tentang apa yang dilakukan Inggris di Indonesia. Inggris dinyatakan telah menyerang penduduk Indonesia di Jawa dengan mempergunakan tank-tank, kapal terbang dan alat-alat militer lainnya. Dikemukakan pula bahwa Inggris telah menggunakan tentara Jepang yang ada di Indonesia untuk menyerang Bangsa Indonesia hal mana sangat bertentangan dengan tugas Inggris seperti yang diamanatkan Sekutu yaitu untuk menerima penyerahan tentara Jepang dan melucuti senjata-senjataanya. Wakil Rusia dalam Sidang Dewan keamanan PBB mengusulkan agar Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi untuk membentuk suatu komisi yang terdiri dari wakil-wakil Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Tiongkok dan Belanda untuk mengadakan penyelidikan di daerah, mendatangkan perdamaian di Indonesia dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Dewan Keamanan.⁶⁸ Desakan yang sama dilakukan oleh Perserikatan India di Amerika kepada Presiden Truman. Dalam sidang Dewan Keamanan, Bangsa Indonesia mendapat dukungan pula dari wakil-wakil Amerika, Mesir

⁶⁸ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Diplomasi Sambil Bertempur Jilid 3*, Bandung: Angkasa, hal. 20-21.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

namun mendapat perlawanan dari Australia yang menyatakan bahwa soal Indonesia adalah soal dalam negeri sehingga tidak dibenarkan untuk dicampuri oleh Dewan Keamanan. Pendapat ini didukung pula oleh Prancis. Terhadap resolusi itu, beberapa pejabat di PBB menyatakan bahwa PBB mungkin akan mengirimkan utusannya ke daerah-daerah konflik seperti Indonesia, Iran dan Yunani hanya kalau tidak ada jalan yang lebih cepat untuk menyelesaikan masalah di negeri-negeri tersebut. Walaupun tidak ada kejelasan sikap PBB, tetapi sejak saat itu sengketa antara Indonesia dengan Belanda menjadi sengketa internasional.⁶⁹

Dukungan lain datang dari Mayor Jenderal Aung San tokoh kemerdekaan Birma yang menerangkan dalam kongres Liga Anti-Fasis Shewedagon Pagoda pada tanggal 22 Januari 1946 bahwa dia menyampaikan rasa hormat kepada Bangsa Indonesia atas perjuangan rakyat Indonesia yang gagah perwira melawan pasukan-pasukan penindas yang lalim dan atas nama rakyat Birma menyampaikan dukungan yang sepenuhnya kepada perjuangan rakyat Indonesia.⁷⁰ Demikian juga 400 orang prajurit India yang Islam setelah mengetahui bahwa mereka dikirim dari Jakarta ke Surabaya untuk berperang melawan rakyat Indonesia menolak untuk dikirim ke Surabaya.

Di Inggris sendiri, Partai Buruh yang memerintah mendukung perjuangan Indonesia dan mencela tindakan Inggris yang membantu menegakkan kembali

⁶⁹ *Pantja Raja* 1 Pebruari 1946.

⁷⁰ A.H. Nasution, jilid 3, *op. cit.* hal. 18.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemerintahan Belanda di Indonesia dan memanfaatkan pasukan Jepang untuk berperang melawan rakyat Indonesia. Dalam pandangan Partai Buruh tindakan seperti itu merupakan noda bagi partai buruh yang sedang memerintah.⁷¹ Bahkan kabinet Inggris kemudian mendesak Belanda agar menjalankan politik yang luwes terhadap persoalan Indonesia.⁷² Panglima Besar tentara Inggris di India Jenderal Sir Claude Auchinlock juga menyatakan sikap tidak senangnya terhadap kedudukan Inggris di Indonesia dan berharap agar keadaan itu dapat diakhiri dengan segera.⁷³ Sikap yang sama diperlihatkan oleh Partai Komunis Inggris di Parlemen⁷⁴ dan juga oleh anggota konservatif Kapten L.D. Gammans di Majelis Rendah Inggris. Gammans mendesak agar soal Indonesia dibuka perdebatannya dalam *House of Commons*.⁷⁵ Beberapa serikat buruh seperti Serikat Buruh Tambang Skotlandia, Serikat Tukang Daerah Barat-Laut, Kinston dan West-on-Supermare juga membuat resolusi yang menentang digunakannya tentara India di Jawa. Di Inggris diberitakan bahwa 250 anak buah kapal penumpang “Aquitania” milik Rose Liner yang terkenal di seluruh dunia telah menyampaikan pernyataan kepada Charles Garman, Sekretaris Persatuan Nasional Inggris. Isinya mendesak agar Inggris mendukung Bangsa Indonesia dalam perjuangannya menuntut kemerdekaan. Demikian juga Persatuan Buruh di Lancashire dan Cheshire

⁷¹ *Pantja Raja*, 1 Desember 1945.

⁷² Osman Raliby, *Documenta Historica I*, seperti dikutip Pramudia Anantatur, Jilid 1, *op. cit.*, hal. 264.

⁷³ *Pantja Raja*, 15 Januari 1946.

⁷⁴ *Pantja Raja*, 1 Desember 1945.

⁷⁵ Osman Raliby, *Documenta Historica I*, seperti dikutip Pramudia Anantatur dalam *Kronik Revolusi Indonesia Jilid 2*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 1999, hal. 33.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengeluarkan maklumat berjudul “Hands off Indonesia”. Juga persatuan Buruh Teknik di Illford menyampaikan protes keras berhubung dengan intervensi Inggris di Indonesia dan mendesak agar tentara Inggris ditarik secepatnya dari Indonesia.⁷⁶

Di Sialon dukungan langsung datang dari Kabinet yang secara bulat menerima usul untuk menyatakan simpati kepada gerakan kemerdekaan di Indonesia dan Indocina dan untuk memberikan bantuan guna memperkokoh gerakan kemerdekaan di kedua negara termaksud.⁷⁷ India memberi dukungan melalui pernyataan Nehru, Kongres India dan Perserikatan Kaum Buruh India yang mendukung perjuangan Indonesia untuk melawan penjajah. Di samping itu mereka mengirim utusan ke Inggris untuk bertemu dengan Menteri Muda urusan India Henderson dan menyampaikan tuntutan agar menarik tentara India dari Pulau Jawa.⁷⁸

Sedangkan di India terjadi demonstrasi para pelajar di dua tempat di Bombay untuk memprotes perbuatan Inggris di Surabaya, yang menurut mereka tidak jujur. Jawaharlal Nehru menyatakan melalui Radio Bombay bahwa kalau pemerintah imperialis tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehendak rakyat Asia yang ingin menentukan nasib sendiri maka Eropah dan Asia haruslah siap berperang. Sedangkan Pemimpin Perserikatan Muslimin India Moh. Ali Jinnah

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 260-261.

⁷⁷ A.H. Nasution, Jilid 2, *op. cit.*, hal 181.

⁷⁸ *Pantja Raja*, 23 Desember 1945.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mendesak Inggris dalam pidatonya, supaya pasukan India tidak lagi digunakan di Indonesia, dan supaya mereka segera ditarik pulang.⁷⁹

Di Australia walaupun ada kelompok yang mendukung tentara Sekutu dan kembalinya Belanda ke Indonesia, tetapi ada juga kelompok yang mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Partai Komunis Australia dalam pesannya kepada Partai Komunis Indonesia menjanjikan untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi perjuangan Indonesia.

Politik diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia juga telah menyebabkan beberapa kelompok dari negeri Belanda dan Inggris sendiri mendukung perjuangan Indonesia dan mencela tindakan pemerintah mereka. Pemerintah Inggris seperti telah dikemukakan terdahulu mendapat tantangan bahkan dari partai yang sedang berkuasa yaitu Partai Buruh. Sedangkan di Negeri Belanda Kongres Partai Komunis Belanda meminta kepada Perdana Menteri Shermerhorn agar politik kekerasan terhadap Republik Indonesia dihentikan dengan segera selanjutnya agar mengakui pemerintahan Sjahrir.⁸⁰

Politik diplomasi telah berhasil membawa persoalan Indonesia menjadi persoalan internasional. Belanda yang sebelumnya menyatakan bahwa persoalan Indonesia adalah persoalan dalam negeri yang tidak boleh dicampuri oleh kekuatan asing ternyata kemudian mengakui bahwa persoalan Indonesia adalah persoalan internasional. Prof. Logemann menyatakan di depan sidang Parlemen

⁷⁹ *Pantja Raja*, 1 Desember 1945

⁸⁰ *Revue Indonesia*, 22 Januari 1946

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Belanda bahwa masalah Indonesia merupakan masalah internasional yang rumit sekali.⁸¹ Dengan demikian, perjuangan kemerdekaan Indonesia sekarang telah melibatkan tidak saja seluruh rakyat Indonesia tetapi juga rakyat di dunia internasional.

Diplomasi tidak saja dilakukan di tingkat internasional. Di dalam negeri pun tentara Inggris dan Belanda dihadapi pula dengan jalan diplomasi. Di Medan misalnya terjadi perundingan antara Gubernur Sumatera Mr. Teuku Mohammad Hassan dengan panglima tentara Sekutu untuk seluruh Sumatera Jenderal Mayor Chambers. Dalam perundingan itu Inggris berjanji tak akan mengganggu pemerintahan sipil Republik Indonesia atau menyerahkan kepada tentara Jepang di luar Medan, Padang, dan Palembang selama pemerintah itu berjalan seperti sekarang, kecuali jika keamanan terganggu benar. Tentara Inggris juga berjanji untuk memberikan senjata kepada Polisi dan Tentara Keamanan Rakyat demi menjaga keamanan.

Walaupun politik diplomasi bisa mendatangkan hasil yang maksimal dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, namun itu tidak berarti politik diplomasi tidak mendapat tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan politik diplomasi datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari luar negeri tantangan paling berat datang dari negeri Belanda sendiri yang tidak merasa perlu berunding dengan Indonesia karena Indonesia adalah wilayah kedaulatannya. Adanya anggapan negara Barat bahwa negara Indonesia adalah negara buatan

⁸¹ *Pantja Raja*, 1 Pebruari 1946.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

fasis dan pemerintahnya termasuk pemerintahan fasis yang dibuktikan dengan kenyataan terjadinya kerusuhan dan pemberontakan-pemberontakan yang mengganggu keamanan umum menjadi alasan bagi Belanda untuk menolak berunding dengan pemerintah Indonesia. Kalaupun perundingan kemudian bisa dilakukan itu pun dengan syarat pemerintah Indonesia bisa memulihkan situasi keamanan dalam negeri dan perundingan itu pun hanya mau dilakukan dengan Sutan Sjahrir yang dianggap tidak fasis dan bukannya dengan Soekarno yang dianggap pemerintahan fasis. Menteri Daerah jajahan Belanda J.H.A. Logemann menyatakan bahwa dia hanya bersedia berunding dengan Sutan Sjahrir tetapi tidak dengan Sukarno.⁸²

Tantangan dari dalam negeri muncul dari kaum muda dan badan-badan perjuangan yang menginginkan perjuangan fisik melawan tentara pendudukan. Kelompok-kelompok ini tetap berjalan dengan rencananya untuk berperang melawan tentara pendudukan dan menimbulkan suasana tidak aman bagi tentara pendudukan. Hal seperti inilah yang kemudian dijadikan alasan bagi tentara pendudukan untuk tidak mau berunding dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah walaupun menganut pola diplomasi dalam perjuangannya tetap mendukung juga perjuangan fisik. Perjuangan fisik dipakai jika perjuangan diplomasi menemui jalan buntu. Perjuangan fisik sering dipakai untuk memaksa pihak lawan agar mau berunding atau mau menempuh jalur diplomasi. Tentang hal ini PM. Sjahrir berucap: “perjuangan pemerintah tetap teguh memegang haluan yang telah

⁸² Peta No. 7-8, 1993 seperti dikutip Pramudia Anantatur, Jilid 1, *op. cit.*, hal. 210.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ditetapkan dalam maklumat politik pemerintah yang telah diumumkan beberapa waktu yang lalu, yang antara lain menerangkan dalam perjuangan sekarang ini kita tidak memakai satu jalan saja, tetapi semua jalan harus kita pakai”⁸³

3.1.2. Strategi Perjuangan Fisik / Militer

Strategi perjuangan fisik/militer adalah perjuangan dengan menggunakan kekuatan militer dan kekuatan rakyat dalam menghadapi tentara pendudukan. Pangkal pemikiran strategi ini adalah pada optimisme atas kekuatan nasional revolusioner dengan dukungan rakyat luas.⁸⁴ Strategi perjuangan fisik/militer ditempuh baik sebagai sandaran diplomasi maupun untuk menghadapi kemungkinan kegagalan diplomasi. Artinya strategi perjuangan fisik/militer bisa sebagai tekanan agar strategi diplomasi bisa berhasil.

Bagi para penganut strategi perjuangan fisik/militer, perkembangan situasi pada bulan September sampai dengan Desember 1945 tidak memungkinkan untuk menerapkan strategi diplomasi. Sebab kalau pun diplomasi dijalankan, hasilnya tidak akan dapat diterima oleh kedua belah pihak karena di samping tuntutan kedua belah pihak yang sangat bertolak belakang, juga perasaan benci membenci semakin meningkat. Belum lagi di pihak Belanda sendiri ada sikap enggan untuk berunding dengan pemerintah yang dalam pandangan mereka fasis. Dalam situasi seperti itu setiap diplomasi tidak mudah ditaati oleh kedua belah pihak.

⁸³ *Kedaulatan Rakjat*, 17 Nopember 1945

⁸⁴ G. Moedjanto, *op. cit.*, hal. 157.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jalan lain yang perlu ditempuh adalah melalui perjuangan fisik atau melalui aksi militer. Negara Republik Indonesia walaupun baru dibentuk dan memiliki peralatan yang kalah modern dari tentara pendudukan tetapi memiliki semangat dan dukungan yang kuat dari seluruh rakyat. Semangat dan dukungan ini menjadi modal yang penting dalam memenangkan peperangan dengan tentara pendudukan. Di berbagai tempat di Indonesia pada masa-masa pemerintahan Kabinet Sjahrir I terjadi pertempuran antara tentara pendudukan dengan rakyat Indonesia. Berikut dikemukakan beberapa pertempuran yang memperlihatkan pelaksanaan strategi perjuangan fisik/militer.

3.1.2.1. Pertempuran Surabaya

Pertempuran Surabaya adalah pertempuran antara serdadu Inggris dan Indonesia yang berlangsung mulai bulan Nopember sampai dengan Desember 1945. Pertempuran diawali ketika Brigade 49/Divisi India ke-23 tentara Sekutu (AFNEI) di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di Kota Surabaya tanggal 25 Oktober 1945. Pada mulanya Rakyat Surabaya menyambut kedatangan mereka dengan baik. Tetapi uluran tangan ini tidak disambut dengan baik oleh Tentara Sekutu, bahkan mereka menyerbu penjara republik untuk membebaskan perwira-perwira Sekutu dan pegawai RAPWI. Akibatnya rakyat Surabaya menjadi marah dan pada tanggal 28 Oktober menyerang pos-pos Sekutu di seluruh kota Surabaya. Menghadapi keadaan yang demikian, pimpinan Tentara

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sekutu meminta bantuan kepada pemimpin-pemimpin Indonesia untuk memerintahkan penghentian tembak-menembak. Dengan bantuan Presiden Soekarno akhirnya berhasil disetujui perjanjian penghentian tembak-menembak, tetapi kemudian perjanjian penghentian tembak menembak ini tidak dihormati Tentara Sekutu.

Tanpa berunding lebih dahulu pada tanggal 9 Nopember 1945 pimpinan Sekutu mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua pimpinan dan orang-orang Indonesia yang bersenjata untuk melapor dan meletakkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan untuk selanjutnya menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Karena rakyat surabaya tidak mengindahkan ultimatum tersebut, maka pecahlah pertempuran pada tanggal 10 Nopember 1945. Dalam pertempuran itu Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby tewas.

3.1.2.2. Pertempuran Ambarawa

Pertempuran juga terjadi di Ambarawa pada bulan Nopember sampai dengan Desember 1945. Pertempuran diawali ketika pada tanggal 20 Oktober 1945 tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jendral Bethel mendarat di Semarang. Tentara Sekutu ketika datang berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan rakyat Indonesia, tetapi hanya mengurus tawanan perang karena itu mereka diterima dengan baik oleh rakyat Semarang. Demikian juga dengan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah disambut baik oleh rakyat Semarang.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tetapi kebaikan rakyat Semarang itu tidak dibalas setimpal oleh Tentara Sekutu. Tentara Sekutu berusaha membebaskan secara sepihak para interniran Belanda di Magelang. Akibatnya timbul insiden bersenjata di Magelang, yang meluas menjadi pertempuran antara Sekutu dan NICA dengan pasukan Indonesia. Setelah dilakukan perundingan antara Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Behtel, secara diam-diam tentara Sekutu meninggalkan Magelang, mundur ke Ambarawa. Oleh Resimen Kedu Tengah pimpinan Letnan Kolonel. M. Sarbini segera dilakukan pengejaran.

Gerakan mundur mereka, berhasil ditahan oleh pasukan pejuang di bawah pimpinan Sastrodihardjo yang diperkuat pasukan Ambarawa, Suruh dan Surakarta. Begitu pula ketika mereka mundur ke Desa Ngipik, tentara Sekutu kembali berhasil dihadap Batalyon Satu Surjosumpeno. Pada saat pengunduran ini tentara Sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa yang menewaskan Komandan Resimen Banyumas, Letnan Kolonel Isdiran, ketika sedang berusaha membebaskan kedua desa tersebut.

Sementara itu di saat terjadi pertempuran di desa sekitar Ambarawa, di Ambarawa terjadi insiden bersenjata antara rakyat dan tentara Sekutu. Insiden meluas menjadi pertempuran yang terjadi di sepanjang rel kereta api yang membelah kota Ambarawa. Dalam pertempuran ini pasukan Indonesia membentuk jajaran pertahanan sepanjang rel sebelah utara, sedangkan tentara Sekutu bertahan di tangsi-tangsi militer sebelah selatan rel. Pada tanggal 23

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nopember 1945 mulai berlangsung tembak menembak antara kedua pasukan. Tentara Sekutu bertahan di kompleks gereja dan pekuburan Belanda di Jalan Marga Agung. Mereka mengerahkan tawanan-tawanan Jepang yang berusaha menyusup wilayah yang diduduki pasukan Indonesia, karena itu pasukan Indonesia meninggalkan kedudukannya dan pindah ke Bedono. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia kembali melancarkan serangan secara serentak. Pertempuran berakhir pada tanggal 16 Desember 1945, setelah pasukan atau tentara Sekutu berhasil dihalau mundur ke Semarang.

3.1.2.3. Pertempuran Semarang

Tanggal 20 Nopember terjadi pertempuran di Semarang. Pertempuran ini melibatkan tiga pihak yaitu Jepang, Inggris dan Indonesia. Dalam pertempuran ini Jepang tidak memihak kepada Indonesia maupun kepada Inggris, tetapi bertempur untuk kepentingannya sendiri. Sebab terjadinya pertempuran adalah karena adanya beberapa orang asing yang menyamar sebagai orang Indonesia lalu memulai serangan terhadap serdadu Gurkha. Inggris lalu meminta kepada Kepala Polisi Indonesia agar rakyat Indonesia menyerahkan senjatanya kepada Inggris. Inggris mengultimatum bahwa kalau kedapatan membawa senjata api maka akan ditembak mati. Ancaman itulah akhirnya yang mencetus terjadinya pertempuran di Semarang.

3.2. Membangun Negara Indonesia yang Baru Dibentuk

3.2.1. Membangun Angkatan Bersenjata

Salah satu tugas yang harus dijalankan oleh Kabinet Sjahrir I adalah membangun angkatan Bersenjata yang bertugas untuk menjaga keamanan dalam negeri sehingga tiap-tiap orang merasa aman dan tidak perlu tiap-tiap orang atau golongan bertindak sendiri-sendiri untuk menjaga keamanannya.

Memang sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945, Rakyat Indonesia tidak memiliki militer yang sengaja dibentuk oleh pemerintah. Yang ada adalah beberapa laskar rakyat atau organisasi militer yang relatif berdiri sendiri tanpa ada hubungan dengan pemerintah pusat. Beberapa organisasi militer itu antara lain Pesindo, Hizbullah dan Sabililah, Barisan Banteng, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, Laskar Rakyat. Organisasi ini adalah alat perjuangan rakyat yang disusun oleh rakyat sendiri. Anggota-anggotanya adalah pemuda-pemuda patriot yang ingin berjuang untuk kemerdekaan dan tidak berpikir untuk menjadi militer yang sebenarnya.⁸⁵ Mereka relatif otonom dalam kegiatan. Hubungan dengan pemerintah sangat longgar karena mereka tidak dibiayai oleh pemerintah tetapi oleh rakyatnya secara langsung.

Di samping itu terdapat organisasi atau badan sosial yang dibentuk oleh pemerintah sebagai Badan Penolong Korban Perang yaitu Badan Keamanan

⁸⁵ A.H. Nasution, Jilid 3, *op. cit.*, hal. 122.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rakyat atau BKR.⁸⁶ Mereka yang bergabung dalam BKR adalah orang-orang yang penuh semangat perjuangan, para mantan anggota PETA dan Heiho. Ketika Inggris dan Belanda datang ke Indonesia dan berusaha untuk menjajah kembali Indonesia, maka BKR mengubah diri menjadi kekuatan besenjata. Mereka melengkapi diri dengan senjata yang direbut atau diminta dari tentara Jepang. Kemudian tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang mengubah BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sampai akhir bulan Nopember 1945 TKR belum memiliki panglima besar. Baru pada tanggal 18 Desember 1945 Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal.⁸⁷

Dengan ketetapan pemerintah tanggal 7 Januari 1946 maka Tentara Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 1946 diubah lagi menjadi Tentara Rakyat Indonesia melalui keputusan pemerintah yang berbunyi:⁸⁸

Kami Presiden Republik Indonesia, setelah mendengar nasehat dari Dewan Kementrian yang berapat di Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 1946, menimbang, bahwa di dalam saat perjuangan politik negara Republik Indonesia sekarang, mesti diperhatikan kesatuan susunan ketentaraan.

Menetapkan:

1. Nama Tentara Keselamatan Rakyat, dahulu Tentara Keamanan Rakyat, dirobah jadi Tentara Republik Indonesia.

⁸⁶ P.J. Soewarno, "Latar Belakang Sosio-Budaya Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia", *Seri Pengetahuan Dan Pengajaran Sejarah*, Seri XXIV, No. 1, Juni 1999, Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dhrama Yogyakarta, hal. 2.

⁸⁷ Suprpto. *op. cit.*, hal. 32-33.

⁸⁸ A.H. Nasution, Jilid 3, *op.cit.*, hal. 4-5.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Tentara Republik Indonesia adalah satu-satunya organisasi militer negara Republik Indonesia
3. Tentara Republik Indonesia akan disusun atas dasar militer internasional.
4. Tentara Keselamatan Rakyat yang sekarang, yang mulai hari pengumuman maklumat ini disebut Tentara Republik Indonesia, akan diperbaiki susunannya atas dasar dan bentuk ketentaraan yang sempurna.
5. Untuk melaksanakan pekerjaan yang disebut dalam futsal 4, maka oleh pemerintah akan diangkat sebuah panitia terdiri dari para ahli militer dan ahli lain yang dianggap perlu.

Presiden Republik Indonesia
Soekarno
Menteri Pertahanan
Amir Sjarifoedin

Dengan keputusan ini maka satu-satunya organisasi militer adalah Tentara Republik Indonesia. Dengan itu pula maka TKR harus menyesuaikan diri sebagai alat negara, alat Republik Indonesia yang harus patuh kepada pimpinan negara, yakni Pemerintah Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, organisasi-organisasi militer yang telah ada sebelumnya tidak semerta-merta dapat langsung bergabung dengan Tentara Republik Indonesia. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyerap organisasi-organisasi itu ke dalam kekuasaan TRI.

Selanjutnya Nasution⁸⁹ menjelaskan bahwa keputusan bahwa TRI akan disusun atas dasar militer “internasional” menimbulkan sikap ketidakpuasan dan keragu-raguan untuk golongan tertentu dan kepuasan di golongan lain di kalangan rakyat Indonesia. Golongan yang sejak semula ingin agar negara Republik Indonesia setara dengan negara-negara lain merasa puas dengan keputusan pemerintah untuk membentuk TRI atas dasar militer internasional. Dengan

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 5-7.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menyusun TRI berdasarkan militer internasional maka Negara RI akan diakui di dunia internasional. Konsekwensinya bahwa Negara RI juga harus berbuat seperti negara-negara internasional lain dalam memperlakukan angkatan bersenjata. Itu berarti harus lengkap dengan menteri, duta, jenderal, laksamana laut, laksamana udara dan sebagainya.⁹⁰ Akan tetapi ada keragu-raguan di kalangan tentara sendiri soal angkatan bersenjata yang harus disusun atas dasar militer internasional. Di kalangan tentara ada kecurigaan terhadap apa saja yang bercap internasional termasuk dalam soal ketentaraan. Penjajahan Jepang selama 3 tahun telah menyebabkan pandangan terhadap bangsa Barat sangat direndahkan. Di kalangan pemimpin pun pada waktu itu ada anjuran agar soal keprajuritan dibangun secara nasional karena soal keprajuritan dalam pandangan pemimpin adalah soal keberanian, bukan soal keahlian. Keberanian itu bisa ditemukan juga di dalam dada rakyat Indonesia. Karena itu pula militer Indonesia tidak perlu dibentuk dengan dasar internasional.

Nasution selanjutnya menjelaskan bahwa pemerintah ingin membentuk Tentara Rakyat Indonesia yang susunan dan bentuknya sempurna. Untuk itu maka digunakan juga bahan-bahan dan pengalaman-pengalaman dari bangsa lain untuk membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Untuk menyusun Tentara Rakyat Indonesia yang sempurna maka Presiden membentuk panitia yang disebut "Panitia Besar Reorganisasi" yang diketuai oleh Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, beranggotakan Jenderal Mayor/Komodor Suryadarma, Jenderal

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 5.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Mayor Kartasmita, Jenderal mayor Mustopo, Kolonel Sutirto, Kolonel Holan Iskandar, Mayor Simatupang, Prof. Supomo dan Prof. Roosseno.⁹¹ Baru pada tanggal 17 Mei 1947 panitia ini selesai melaksanakan tugas penyusunan kembali Tentara Republik Indonesia. Kemudian tanggal 21 Mei 1946 Presiden menetapkan formasi dan susunan Markas Besar serta Kementerian Pertahanan.⁹²

3.2.2. Menata Pemerintahan

Menata kembali pemerintahan bukanlah pekerjaan mudah. Sjahrir menyadari hal ini ketika mengatakan: “rakyat yang mengawasi pemerintahan Republik ialah orang tanpa watak sejati...[mereka] sudah terbiasa dengan kowtow (menjilat)...banyak dari mereka yang secara moral masih merasa berutang budi kepada Jepang yang “menghadiahkan” kepada mereka peluang untuk “mempersiapkan” kemerdekaan Indonesia”.⁹³ Mentalitas budak, mentalitas feodal adalah sesuatu yang bisa menghambat usaha untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis sebab pemerintahan demokratis mengandaikan adanya partisipasi aktif dari masyarakat padahal dalam mentalitas budak dan feodal, masyarakat lebih banyak bersifat pasif dan menunggu.

Masalah lain adalah adanya “massa rakyat” yang sering berjalan sendiri-sendiri dalam perjuangan melawan Belanda dan tidak berada di bawah kontrol pemerintah. Hal seperti itu bisa membawa kekacauan di kalangan rakyat. Karena

⁹¹ *Ibid.*, hal. 6.

⁹² Formasi dan Susunan Markas Besar serta Kementerian Pertahanan, *ibid.* hal. 125.

⁹³ Mrazek, *op.cit.*, hal. 492.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

itu tugas pemerintah adalah mengintegrasikan unsur-unsur massa rakyat itu ke dalam struktur pemerintahan.⁹⁴ Pengintegrasian itu dapat dengan mudah dicapai kalau dibentuk dewan-dewan perwakilan rakyat dari pemerintah desa sampai ke tingkat tertinggi pemerintahan.⁹⁵

Yang tidak kalah sulitnya adalah persoalan . ketenagaan dalam pemerintahan yang akan dibentuk. Republik Indonesia memiliki tenaga yang sangat terbatas yang bisa bekerja di bidang pemerintahan. Tenaga yang sangat terbatas itu pun kebanyakan mereka yang sudah bekerja bersama-sama dengan Jepang sebelumnya hal mana ditolak oleh Sjahrir untuk duduk dalam pemerintahan yang demokratis dan revolusioner. Namun kemudian Sjahrir memperlunak sikapnya terhadap para pegawai yang pernah bekerjasama dengan Jepang.

Ketika menjelaskan pokok-pokok usaha penyusunan administrasi negara PM. Sjahrir menyatakan bahwa untuk menata kembali pemerintahan pertanyaan pokok yang harus dijawab adalah apakah peralatan negara yang lama, yang kita terima sebagai warisan, dapat kita gunakan ataukah kita harus membentuk peralatan yang baru? Kalau dapat kita gunakan maka bagaimana dan hingga di mana akan dapat digunakan? Terhadap pertanyaan ini Sjahrir menjelaskan bahwa pada pokoknya kita masih membutuhkan alat pemerintah yang lama sebab kita memang tidak memiliki cukup tenaga untuk membentuk alat pemerintah yang

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 433.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 493-494.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

baru. Alat pemerintah yang lama merupakan bahan yang diakui masih perlu dan berguna untuk membangun negara Republik Indonesia. Namun bahan yang lama itu kalau masih digunakan maka harus disesuaikan dengan kebutuhan negara baru.⁹⁶ Alat pemerintah yang ada harus diperkuat dan diberi tempat yang selaras dengan kewajibannya di dalam negara dan di dalam masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya alat-alat pemerintah yang lama bisa dipakai kembali kalau dipilih oleh rakyat.

Sebagai pelaksanaan dari pemikiran tentang pemerintahan seperti yang telah dijelaskan terdahulu maka sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan pada tanggal 23 Nopember 1945 yaitu Undang-undang 1945 No. 1 maka dibentuklah Komite Nasional Daerah di daerah-daerah kecuali di daerah Surakarta dan Yogyakarta, di Karesidenan, di Kota berautonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Menteri dalam Negeri. Komite Nasional Daerah menjadi semacam Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersama-sama dan dipimpin oleh kepala daerah mengatur rumah tangga daerah. Oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang sebanyak-banyaknya 5 orang sebagai Badan eksekutif, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari, sedangkan

⁹⁶ A.H. Nasution, Jilid 3, *op. cit.*, hal. 9-10.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ketua Komite Nasional Daerah yang lama harus diangkat menjadi Wakil Ketua Badan Perwakilan Rakyat Daerah.⁹⁷

Undang-undang No. 1 dikeluarkan untuk mengalihkan kekuasaan pemerintah yang sudah direbut oleh KND dari Jepang yang sudah kalah ke pemerintah Indonesia yang sudah dibentuk berdasarkan UUD 1945. Dengan demikian pemerintah daerah berada di tangan Kepala Daerah yang sekaligus menjadi ketua badan legislatif dan badan eksekutif. Birokrasi pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-undang No. 1 itu sama dengan birokrasi pemerintah daerah yang diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang sebenarnya merupakan suatu upaya untuk memberi akomodasi birokrasi pemerintahan tradisional dalam birokrasi pemerintahan modern.⁹⁸

Yogyakarta walaupun menjadi daerah yang dikecualikan dari UU No. 1 tetapi ikut juga mengadakan pembaharuan birokrasi bahkan menjadi pilot proyek untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Untuk menjelaskan tentang penyempurnaan susunan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, P.J. Suwarno⁹⁹ menyatakan bahwa sejak berdirinya KNID di Yogyakarta awal September 1945, di Yogyakarta terdapat tiga birokrasi pemerintahan yang berusaha menjalankan kekuasaan masing-masing yaitu birokrasi pemerintahan Kasultanan dan Paku Alaman yang dipimpin oleh Sultan dan Paku Alam, *Kooti*

⁹⁷ P.J. Suwarno, *Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1990, hal. 46.

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ P.J. Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta, 1942-1974*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, hal. 201-263.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Zimu Kyoku yang dipimpin oleh *Kooti Zimu Kyoku Tyookan* dan KNID.¹⁰⁰ Akan tetapi birokrasi pemerintahan Jepang kemudian diambil alih oleh KNID sehingga yang ada hanyalah birokrasi pemerintahan Kasultanan dan Pakualaman dan birokrasi KNID.

Seruan pemerintah untuk menyempurnakan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundangan dari pemerintah pusat menjadi ancaman tersendiri bagi birokrasi pemerintahan Sultan dan Pakualaman dan juga bagi para anggota birokrasi pemerintahan yang sudah dibina sultan sejak zaman Jepang. Berkaitan dengan persoalan ini, Sultan berusaha menyesuaikan tindakan pemerintahannya dengan peraturan yang berlaku untuk daerah-daerah di luar Yogyakarta misalnya tentang pembentukan BPKNID dan pelaksanaan Undang-Undang No. 1/1945 meskipun peraturan perundang-undangan itu mengecualikan DIY.¹⁰¹ Sultan menggabungkan kekuasaan tradisional kasultanan dan kekuasaan baru yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang rasional.¹⁰²

Maka sesuai dengan instruksi Presiden RI yang mempunyai dasar hukum pada pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dibentuklah KNID Yogyakarta. Banyak anggota pengurus KNID berasal dari *abdidalem* sehingga kekuasaan karismatis Sultan dapat digunakan oleh KNID untuk memerintah rakyat. Sikap seperti ini ternyata telah menyebabkan bagian birokrasi pemerintahan Jepang

¹⁰⁰ *Ibid.* hal. 207.

¹⁰¹ *Ibid.* hal. 206.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 207.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menggabungkan diri dengan birokrasi pemerintahan kesultanan.¹⁰³ Proses penyatuan juga tidak saja terjadi dari birokrasi pemerintahan Jepang ke dalam birokrasi pemerintahan KNID atau kesultanan tetapi juga terjadi penyatuan dari birokrasi pemerintahan KNID ke dalam birokrasi pemerintahan kasultanan yang memiliki legitimasi wahyu *karaton* yang dimiliki oleh Sultan secara tradisional.¹⁰⁴

Proses penyatuan ini kemudian diikuti dengan proses penyusunan kembali birokrasi sampai ke desa-desa seperti yang tampak dalam Maklumat No. 7/1945 yaitu Sultan dan Paku Alam dengan persetujuan BPKNID untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan di setiap kelurahan DIY.¹⁰⁵ Kemudian diikuti Maklumat No. 9/1945 tentang penghapusan *Kapanewon* Kenaran dan Prambanan yang sebelumnya telah dibentuk oleh Dewan Kelurahan dan diganti dengan nama Prambanan Baru dan Kalasan. Kemudian pada tanggal 13 Pebruari 1946 keluar lagi Maklumat No. 10/1945 yang mengubah istilah Pangreh Praja menjadi Pamong Praja. Perubahan istilah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pangreh Praja di kalangan masyarakat mempunyai arti yang mengingat pada zaman penjajahan. Di samping itu istilah Pamong Praja sudah digunakan secara tidak resmi sesuai dengan kehendak rakyat dan juga istilah ini lebih sesuai dengan kedudukan dan kewajibannya pada masa kini.¹⁰⁶ Pangreh Praja sendiri

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 208.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 210.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 211.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 214.



berarti orang yang menguasai pemerintahan sedangkan Pamong Praja berarti orang yang mengasuh pemerintahan.¹⁰⁷

Dalam perkembangan selanjutnya keluar lagi beberapa Maklumat seperti Maklumat No. 14/1946 tentang pembentukan Dewan Kalurahan sekaligus menghapus Rapat Desa, Maklumat No. 15/1946 tentang hak pilih dan hak dipilih dalam kelurahan.¹⁰⁸ Maklumat No. 18/1946 mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat DIY.¹⁰⁹

Sedangkan pembaharuan penyusunan pemerintahan di Surakarta mengalami hambatan karena tidak sejalannya keinginan antara pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran dengan KNID. Sesuai dengan instruksi pemerintah pusat maka KNID yang dibentuk di Surakarta dipimpin oleh perwira PETA. Namun KNID yang di Surakarta tidak didukung oleh Kasunanan dan Mangkunegaran. Karena itu para pemuda yang sebagian besar berasal dari Barisan Banteng, satu organisasi badan perjuangan dengan jumlah anggota paling besar di Surakarta melakukan tindakan yang revolusioner dengan menculik kaum bangsawan Surakarta. Sikap anti Kasunanan dan Mangkunegaran kemudian disalurkan melalui partai politik sehingga masalah politik lokal di Surakarta menjadi masalah politik nasional. Pada akhirnya pemerintah pusat melalui

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keputusan 15 Juli 1946 menyatakan daerah Surakarta menjadi daerah karesidenan. Sebagai wakil residen diangkat seorang tokoh Barisan Banteng.¹¹⁰

Di Klaten, setelah kepemimpinan Kabupaten Klaten KRMT Yudodiningkrat yang diangkat oleh Sunan ditarik kembali ke istana Sunan maka kepemimpinan di kabupaten lowong. Kekosongan itu lalu diisi oleh BPKNI. Kemudian dalam suatu rapat raksasa di Klaten dicetuskan bahwa Kabupaten Klaten tidak merupakan bagian dari Kasunanan melainkan bagian dari Republik. Pada bulan September 1946 diangkatlah seorang bupati yang melaksanakan berbagai kebijakan yang lebih moderat.¹¹¹

Di wilayah Sumatera pemerintah membentuk KNI Sumatera dan KNI keresidenan, kabupaten dan sebagainya untuk menghimpun semua keinginan rakyat dan memusatkan semua tenaga. KNI pertama sekali diketuai oleh Dokter Sunaryo. Kemudian juga diangkatlah Teuku Mohamad Hassan sebagai Gubernur. Pengangkatan ini memang tidak memuaskan semua pihak namun dapat diterima karena karisma Soekarno dan Hatta. Untuk jabatan residen Sumatera Timur diangkat Mohamad Yusuf dan untuk Walikota Medan diangkat Luat Siregar. Staf gubernur terdiri atas Sekretaris Mas Tahir dan pegawai-pegawai tinggi Teuku Hafas (Residen diperbantukan), Mangaraja Soangkupon, Dokter Pirngadi, Teuku

¹¹⁰ *Prisma*, No. 7, Tahun XVII, 1998, hal.60-61.

¹¹¹ *Ibid.* hal. 62.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Mohamad Hanafiah, A. Xarim M.S. dan lain-lain, yakni pemuda-pemuda dari semua aliran yang ada.¹¹²

Tuntutan rakyat agar demokratisasi dijalankan di daerah-daerah istimewa dan agar dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat di daerah-daerah terlihat dalam hasil pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan para sultan, raja dan sibayak di daerah Sumatera Timur. Dalam pembicaraan yang dihadiri baik oleh utusan pemerintah pusat maupun dari pihak kerajaan di Sumatera Timur dibicarakan tentang garis besar kedudukan daerah-daerah istimewa kerajaan-kerjaan di Sumatera Timur dalam lingkungan negara kesatuan Republik Indonesia dan dibicarakan pula tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹¹³

Penyusunan birokrasi di Sumatera menimbulkan berbagai gejolak sosial yang disebabkan oleh adanya keinginan dari kaum revolusioner untuk secepatnya membentuk pemerintahan demokratis dengan mengganti semua unsur pemerintahan tradisional yang dianggap feodal. Usaha ini mendapat tantangan yang hebat dari para penguasa tradisional yang merasa dirugikan oleh pembaharuan birokrasi yang dilakukan karena menyebabkan kekuasaan mereka berkurang bahkan hilang. Keinginan penguasa tradisional untuk tetap mempertahankan kekuasaan mereka dijawab oleh kaum revolusioner dengan tindakan-tindakan yang keras baik dengan penculikan maupun pembunuhan para pemimpin tradisional dan keluarga.

¹¹² A.H. Nasution, Jilid 1, *op. cit.*, hal.398-399.

¹¹³ Osman Raliby, *Documenta Historica I*, Jakarta, Hasta Mistra, 1995, seperti yang dikutip Pramudia Anantatur, dalam Jilid II, *op. cit.*, hlm. 50.

3.2.3. Memperbaiki Kehidupan Ekonomi

Pada tahun-tahun awal kemerdekaan (1945-1949) perhatian pemerintah lebih tertuju kepada diplomasi politik dan perang dengan Belanda daripada kepada persoalan ekonomi. Padahal kehidupan ekonomi Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan sangat buruk. Gambaran kehidupan ekonomi pada masa perang kemerdekaan sangat suram. Badan Pekerja KNIP dalam sidangnya yang membahas tentang perlunya membentuk suatu komisi ekonomi melukiskan bahwa keadaan ekonomi Indonesia sangat genting.¹¹⁴ Hal ini dapat dipahami sebab selama masa pendudukan Jepang semua hasil produksi dan tenaga kerja dari Indonesia digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan perang. Di jaman sebelum kemerdekaan, sistem ekonomi penjajahan merusakkan pola ekonomi pribumi yang bersifat agraris dan statis, tidak diberi kesempatan untuk menumbuhkan semangat pengalaman dan *skill* dalam golongan tukang, pedagang dan pengusaha. Kemudian juga produktivitas rakyat sangat merosot akibat bermacam-macam kerja paksa yang mematikan inisiatif dan kemampuan. Demikian juga usaha ekonomi dengan perhitungan tajam, kerja keras, risiko yang terbatas, tanggungjawab dan kebanggaan atas hasil usaha sendiri kurang berkembang.¹¹⁵ Keadaan ekonomi yang morat marit seperti itulah yang diwariskan kepada Republik Indonesia pada awal kemerdekaannya. Akibatnya rakyat hidup dalam kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan dan pakaian.

¹¹⁴ *Soeloeh Merdeka*, 13 Desember 1945; bdk. *Kedaulatan Rakyat*, 11 Desember 1945.

¹¹⁵ A. Heuken, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Jilid 1*, Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1973, hal. 280.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Karena itu walaupun perhatian pemerintah lebih terfokus pada persoalan politik, pemerintah berusaha pula menata kehidupan ekonomi melalui dua usahanya yaitu memperbaiki kemakmuran rakyat dan mempercepat keberesan tentang hal uang Republik Indonesia.¹¹⁶ Disamping itu pemerintah juga berusaha menyusun rencana ekonomi jangka tiga tahun.¹¹⁷

Untuk membantu daerah-daerah yang mengalami kesulitan ekonomi karena peperangan maka diusulkan supaya masyarakat serta para pemimpin di sekitar daerah yang kesulitan makanan dan pakaian mengumpulkan bahan makanan dan pakaian untuk dibagikan kepada yang sangat membutuhkan. Untuk menjalankan maksud ini maka KNI mengeluarkan maklumat tentang pendaftaran bahan makanan dan pakaian. Maksud pendaftaran ini adalah agar bahan-bahan makanan dan pakaian tersebut di masa perlu dapat dipergunakan dengan tepat untuk mencukupi kebutuhan perjuangan dan memperkuat pemerintah Republik Indonesia.¹¹⁸ KNI juga menentukan ketika mendaftar perlu didaftar secara jelas jenis makanan atau pakaian, jumlahnya, disimpan di mana, apakah maksud penyimpanan untuk dijual atau untuk digunakan sendiri. Kalau untuk dijual agar tidak menjual dalam jumlah yang besar. Kalau dipakai untuk kepentingan sendiri agar tidak dipakai untuk tujuan senang-senang, pesta dan lain sebagainya.

¹¹⁶ Suprpto, *op. cit.*, hal. 30.

¹¹⁷ Osman Raliby, "Documenta Historica I" seperti yang dikutip Pramudia Anantatur dalam Jilid 1, *op. cit.*, hal. 193.

¹¹⁸ *Kedaulatan Rakyat*, 22 Nopember 1945.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Diharapkan juga agar para pedagang, petani dan hartawan sama-sama memperjuangkan bahan-bahan yang sangat diperlukan oleh segenap penduduk.¹¹⁹

Di samping itu, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat menghimbau partai-partai dan golongan-golongan masyarakat agar mengajukan usul rencana pembangunan ekonomi (program urgensi) jangka pendek misalnya program ekonomi untuk 3 tahun maksudnya adalah agar tindakan pemerintah di bidang ekonomi pembangunan sesuai dengan kehendak rakyat. Rencana pembangunan ekonomi jangka tiga tahun itu diharapkan dimasukkan ke sekretariat BP KNIP Jalan Cilacap 4, Jakarta paling lambat tanggal 20 Desember 1945.¹²⁰

Di sektor keuangan pemerintah menetapkan mata uang sendiri menggantikan mata uang NICA. Penerapan penggunaan mata uang sendiri sering mengalami tantangan dalam pelaksanaannya sebab Belanda tetap menghendaki agar mata uang NICA digunakan sebagai alat tukar yang sah di Indonesia. Sedangkan rakyat menolak menggunakan uang NICA.

Rangkuman

Setelah pemerintahan baru terbentuk maka menjadi tugas pemerintah barulah untuk mengatur negara yang baru dibentuk ke arah cita-cita untuk hidup berbangsa. Dalam mengisi kemerdekaan yang baru diraih, pemerintah yang baru

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Osman Raliby, "Documenta Historica I" seperti yang dikutip Pramudia Anantatur Jilid 1, *op. cit.*, hal. 193.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menetapkan beberapa kegiatan utama sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Beberapa kegiatan itu adalah yang pertama menanggulangi ancaman kembalinya Belanda untuk menjajah Indonesia. Usaha mencegah kembalinya Belanda ke Indonesia dilakukan dengan dua jalan yaitu jalan diplomasi dan jalan perjuangan fisik. Kedua jalan ini sama-sama ditempuh. Walaupun demikian, pemerintahan Kabinet Sjahrir I berusaha untuk lebih menonjolkan perjuangan diplomasi karena perjuangan diplomasi lebih kecil kemungkinan untuk terjadinya jatuhnya korban jiwa di kalangan rakyat Indonesia kalau dibanding dengan jalan perjuangan fisik dan di pihak lain perjuangan diplomasi lebih memungkinkan untuk mendapatkan simpati yang luas dari negara-negara Barat yang lebih menjunjung tinggi perjuangan yang bersifat demokratis daripada perjuangan fisik yang terkesan kasar dan fasis.

Kedua, menyusun kekuatan bersenjata. Kekuatan bersenjata adalah salah satu unsur yang perlu ada dalam suatu negara agar negara bisa terjamin keamanannya dari gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kekuatan bersenjata juga dibutuhkan sebagai alat untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam strategi diplomasi ketrampilan berunding menjadi faktor yang menentukan kemenangan perjuangan, sedangkan dalam strategi perjuangan fisik, maka adanya kekuatan bersenjata yang tangguh baik menyangkut perlengkapan perang maupun strategi berperang menjadi faktor yang menentukan kemenangan perjuangan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Maka BKR yang sebelumnya hanyalah suatu Badan Penolong Korban Perang dibentuk menjadi Tentara Keamanan Rakyat melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945. Selanjutnya tanggal 7 Januari 1946 pemerintah menetapkan Tentara Keamanan Rakyat berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan selanjutnya menjadi Tentara Rakyat Indonesia melalui keputusan pemerintah tanggal 24 Januari 1946.

Ketiga, menata kembali pemerintahan melalui pembentukan pemerintahan di daerah-daerah. Pembentukan pemerintahan di daerah-daerah diwarnai oleh proses penyatuan atau peleburan antara pemerintahan tradisional dengan pemerintahan yang baru seperti yang terjadi di Yogyakarta, Surakarta dan beberapa daerah lain. Pembentukan pemerintahan di daerah-daerah ada yang berjalan lancar dan ada pula yang tersendat-sendat karena mendapat perlawanan dari pemerintahan tradisional yang merasa dikurangi hak-hak dan kekuasaannya.

Keempat, menata kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi pada masa-masa awal kemerdekaan penuh dengan kesulitan. Pada zaman penjajahan Jepang ekonomi Indonesia tidak dapat berkembang dengan baik karena banyak tenaga dan perhatian diarahkan kepada kepentingan perang. Pembenahan kembali ekonomi Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan lebih diarahkan pada usaha untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari agar rakyat Indonesia tidak mengalami kelaparan. Untuk itu penghematan dan pengumpulan bahan-bahan makanan menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah pada masa itu berusaha

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menurunkan harga kebutuhan sehari-hari serta mengadakan barang-barang kebutuhan pokok di pasar-pasar.¹²¹



¹²¹A.H. Nasution, Jilid 1, *op. cit.*, hal. 400-401.

BAB IV

TANTANGAN YANG DIHADAPI KABINET SJHRIR I

Sejak dibentuk Kabinet Sjahrir I telah mendapatkan banyak tantangan yang kemudian sangat berpengaruh terhadap kegiatan Kabinet. Tantangan itu bisa digolongkan atas dua yaitu tantangan dari dalam negeri dan tantangan dari luar negeri. Yang dimaksud dengan tantangan dari dalam negeri adalah tantangan dari sesama orang Indonesia atau kelompok orang Indonesia baik dari para mantan anggota kabinet lama yang tidak dipilih dalam kabinet yang baru maupun dari kelompok militer dan kelompok Tan Malaka. Sedangkan tantangan dari luar negeri adalah tantangan dari pihak Belanda. Kedua tantangan ini sama-sama mengancam kelangsungan hidup Kabinet Sjahrir I.

4.1. Tantangan dari Dalam Negeri

Kabinet Sjahrir I praktis tidak mendapatkan sedikitpun tantangan dari para anggota kabinet sebab semua anggota kabinet adalah orang-orang yang sepaham dengan Sjahrir sehingga dapat diajak untuk bekerja sama. Tantangan dari dalam justru datang dari anggota Kabinet Presidensiil dan dari kelompok Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka. Kelompok militer pun kurang memiliki hubungan yang harmonis dengan Sjahrir sebab kaum militer termasuk orang yang dituding Sjahrir dalam pamflet *Perjuangan Kita* sebagai orang yang bekerjasama

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan Jepang sebab militer Indonesia pada waktu itu dilatih oleh Jepang dan banyak anggota militer Indonesia pada waktu itu merupakan bekas militer pada zaman Jepang.¹²²

4.1.1. Tantangan dari Anggota Kabinet Lama

Dalam pamflet *Perjuangan Kita*, Sjahrir menyerukan agar menolak semua pimpinan yang pernah aktif berkolaborasi dengan Jepang dan sebaliknya mempercayakan kepemimpinan revolusi hanya kepada mereka yang tidak ternoda oleh suatu hubungan semacam itu. Sjahrir menyatakan:

Revolusi kita harus dipimpin oleh kelompok-kelompok demokratis yang revolusioner, dan bukan oleh kelompok-kelompok nasionalis yang pernah menjadi antek fasis-fasis, fasis kolonial Belanda, atau fasis militer Jepang.

Perjuangan demokrasi revolusioner itu dimulai dengan membersihkan diri dari noda-noda fasis Jepang, mengungkung pandangan orang-orang yang jiwanya masih termakan oleh pengaruh propaganda Jepang dan didikan Jepang. Orang-orang yang sudah menjual jiwa dan kehormatannya kepada fasis Jepang harus disingkirkan dari kepemimpinan revolusi kita, yaitu orang-orang yang pernah bekerja dalam organisasi propaganda Jepang, polisi rahasia Jepang, umumnya dalam usaha pasukan ke lima Jepang. Semua orang ini harus dianggap sebagai pengkhianat perjuangan dan harus dibedakan dari kaum buruh biasa yang bekerja hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, semua kolaborator politik dengan fasis Jepang seperti yang disebutkan di atas harus dianggap sebagai fasis sendiri atau alat dan kaki tangan Jepang, yang sudah tentu berdosa dan berkhianat kepada perjuangan revolusi rakyat.¹²³

Penolakan Sjahrir terhadap mereka yang bekerjasama dengan Jepang didasarkan pada pertimbangan bahwa Belanda dan Sekutu bakal lebih suka

¹²² Anggota militer Indonesia banyak berasal dari Peta suatu organisasi militer yang dibentuk dan dilatih oleh Jepang

¹²³ George Mc Turnan Kahin, *op. cit.*, hal. 208-209.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berunding dengan suatu pemerintah Indonesia yang bersih dari kolaborator Jepang. Sjahrir juga mengkhawatirkan perkembangan suatu pemerintah Indonesia yang totaliter karena adanya warisan otoriter feodalistis yang tetap hidup dan diperkuat oleh periode kolonial yang panjang. Ia merasa bahwa anggota-anggota klik Subardjo yang duduk dalam kabinet lama dan yang tersebar luas di seluruh kantor pemerintah dalam Republik Indonesia adalah kaum kolaborator yang pandangan fasisnya dekat dengan pandangan Jepang yang telah memperbudak mereka. Menurut Sjahrir, mereka akan mampu menggiring Bangsa Indonesia ke arah suatu bentuk pemerintahan fasis¹²⁴ hal mana sangat ditentang oleh Sjahrir dan akan sangat mengganggu politik diplomasi yang akan dijalankan oleh pemerintah Kabinet Sjahrir. Karena itu pula ia berusaha sedapat mungkin untuk tidak mengangkat lagi menteri-menteri pada kabinet sebelumnya sebaliknya mengangkat orang-orang baru yang adalah para pengikutnya maupun para pejabat non politikus yang kompeten yang semuanya tidak pernah bekerjasama dengan Jepang.¹²⁵

Kaum militer Indonesia merasa bahwa serangan Sjahrir dalam *Perjuangan Kita* ditujukan bagi mereka juga sebab mereka terutama para perwiranya mendapatkan latihan militer dari Jepang. Karena itu ada rasa kurang senang di kalangan militer terhadap Sjahrir hal mana bisa mempengaruhi dukungan mereka terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan Sjahrir.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 209-210.

¹²⁵ *Ibid.*, hal 213.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Anggota Kabinet Sjahrir hampir semuanya orang baru kecuali Amir Sjarifuddin yang menjabat sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Keamanan Rakyat dan Mr. Harmani yang menjabat sebagai wakil Menteri Dalam Negeri. Beberapa tenaga ahli dalam kabinet sebelumnya yang mampu memegang jabatan kementerian tidak diangkat karena tidak satu klik dengan Sjahrir.¹²⁶ Kebijakan tidak mengangkat kembali menteri-menteri dalam kabinet lama menimbulkan rasa sakit hati apalagi ditambah dengan tuduhan dalam pamflet *Perjuangan Kita*.

Anggota kabinet yang dibubarkan merasa sakit hati terhadap Soekarno lalu mereka mengarahkan ketidaksenangan mereka kepada Sjahrir karena merasa bahwa serangan anti kolaborator Sjahrir yang tertuang dalam pamflet *Perjuangan Kita* jelas-jelas menyebabkan kajatuhan mereka dan juga menghancurkan reputasi mereka.

Sjahrir menyadari mereka akan menjadi masalah tersendiri dalam pemerintahannya. Sejumlah menteri yang disingkirkan adalah orang-orang terkemuka dari kalangan PNI dan Masyumi. Kemudian mereka melakukan penentangan terhadap Sjahrir dengan mendorong partainya masing-masing untuk menentang Sjahrir dan kebijakan-kebijakan kabinetnya. Di samping itu mereka juga menyerang secara langsung Kabinet Sjahrir I dengan menuduh bahwa kabinet dan Badan Pekerja tidak representatif yang seharusnya menjadi badan koalisi yang mencakup semua aliran politik dan hanya terdiri dari wakil partai-partai. Semua serangan ini didorong baik oleh ambisi untuk menduduki jabatan politik maupun

¹²⁶ Suprpto, *op. cit.*, hal. 29.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

juga oleh sakit hati serta keinginan untuk menyingkirkan Sjahrir dengan kelompoknya.¹²⁷

Perlawanan terhadap Kabinet Sjahrir I menjadi begitu besar sehingga Sjahrir merasa perlu untuk mengadakan sidang KNIP guna membicarakan kritikan-kritikan rakyat terhadap kabinetnya. Dalam sidang ini, Sjahrir meminta dukungan KNIP untuk melaksanakan kebijakannya. Kalau tidak didukung oleh KNIP, Sjahrir akan mengundurkan diri dari Perdana Menteri. Dalam sidang itu, Sjahrir dan kabinetnya mendapat suara dukungan yang cukup signifikan sehingga ia melanjutkan memimpin kabinet.¹²⁸

4.1. 2. Tantangan dari Kelompok Tan Malaka

Tan Malaka dilahirkan di Sumatera Barat pada tanggal 19 Pebruari 1896. Pernah mengalami pendidikan Barat di Negeri Belanda. Tahun 1919 ketika kembali dari Belanda ia bekerja sebagai guru sekolah dasar di perkebunan *Senembah Maatschappij*, Sumatera Timur selama dua tahun kemudian bergiat dalam Partai Komunis. Ia mulai melihat paham komunis sebagai paham yang sesuai dengan keinginannya ketika menyaksikan keberhasilan peristiwa revolusi Bolswyk pada tahun 1917. Pada tahun 1921 memimpin *Revolutionairo Vakcentrale*. Kemudian akibat kegiatannya pada pemogokan pegawai pegadaian pada tahun 1922, ia ditangkap dan dibuang. Atas permintaan sendiri ia diijinkan

¹²⁷ George Mc Turnan Kahin, *op. cit.*, hal. 214.

¹²⁸ Dalam sidang itu, 84 suara mendukung, 8 menolak dan 15 abstain. Anggota KNIP dari luar kota banyak yang tidak mengikuti sidang pada waktu itu. *ibid.*, hal. 214

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

untuk meninggalkan Indonesia dan pergi ke Belanda dan Rusia pada bulan Maret 1922.

Walaupun ia bergiat dalam Partai Komunis tetapi ia termasuk orang yang tidak menyetujui pemberontakan PKI tahun 1926. Ia juga menolak menyetujui sistem komunis di bawah Stalin yang dianggapnya bertentangan dengan komunisme yang sebenarnya. Komunisme yang sebenarnya menurut Tan Malaka adalah komunisme yang memberlakukan demokrasi sepenuh-penuhnya, sama rasa sama rata sedangkan komunisme di bawah Stalin menanam dalam barisannya rasa perbudakan.¹²⁹ Kemudian ia Memisahkan diri dari komunisme gaya Stalin yang dikendalikan dari Moskow lalu bersama teman-temannya pada 2 Juni 1927 mendirikan PARI (Partai Republik Indonesia) di Bangkok Thailand. Dalam manifestonya PARI menyatakan tujuan partai ini adalah mengusahakan agar secepatnya Indonesia memperoleh kemerdekaannya dan setelah itu akan mendirikan suatu Republik Federasi Indonesia berdasarkan keadaan ekonomi, sosial dan politik negara dan sesuai dengan akhlak serta sifat-sifat penduduk. Selain itu PARI juga akan mempertinggi peradaban, kedudukan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.¹³⁰

Selama di luar negeri Tan Malaka sering menulis tentang keadaan di Indonesia yang diterbitkan dalam bulletin *Profintern*. Ia muncul kembali ke Indonesia pada masa pendudukan Jepang tahun 1942. Selama pendudukan Jepang,

¹²⁹ P. Swanstoro, *Dari Buku ke Buku Sambung Menyambung Menjadi Satu*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Rumah Budaya TeMBI, 2002, hal. 338.

¹³⁰ Ibid. hal. 339-340.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ia bergerak di bawah tanah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia muncul kembali secara aktif dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tan Malaka memiliki ambisi untuk menduduki tampuk pimpinan dalam republik ini. Untuk itu ia bekerja sama dengan kelompok Subardjo yang juga mempunyai ambisi yang sama. Tan Malaka juga mengajak Sjahrir untuk bekerjasama menggabungkan kekuatan guna menggulingkan Sukarno. Kalau berhasil Tan Malaka berjanji untuk menjadikan Sjahrir sebagai presiden, sedangkan Tan Malaka cukup menguasai dua kementerian penting yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perburuan.¹³¹ Tetapi Sjahrir menolak ajakan Tan Malaka dengan alasan bahwa Sukarno didukung oleh seluruh rakyat.

Setelah mengetahui bahwa memang Sukarno sangat populer di kalangan rakyat, maka Tan Malaka merubah strateginya. Ia terang-terangan mendekati Hatta, mengusulkan agar Tan Malaka menggantikan Soekarno sebagai presiden dan mendesak pendapat bahwa Tan Malaka lebih cocok untuk memimpin revolusi.¹³² Usul ini ditolak oleh Hatta. Ia lalu meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk membuat surat wasiat yang akan melanjutkan kepemimpinan kalau Soekarno dan Hatta ditangkap atau dibunuh oleh Belanda. Strategi ini pun gagal karena terjadi perubahan kabinet dari Kabinet Presidensiil ke Kabinet Parlementer. Sjahrir diangkat menjadi Perdana Menteri dalam Kabinet Parlementer I.

¹³¹ *Ibid.*, hal. 120-121.

¹³² *Ibid.*, hal. 120.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kabinet yang dibentuk banyak diisi oleh orang-orang yang dekat dan sepaham dengan Sjahrir. Dengan kabinet yang dikuasai oleh kelompok Sjahrir dan didukung oleh mayoritas Badan Pekerja serta KNIP bersama Soekarno dan Hatta, kedudukan Tan Malaka dan kaum oposisi kabinet menjadi sulit. Sebelum diadakan pemilihan umum yang rencananya akan diadakan pada bulan Januari 1946, pemerintah sementara sepenuhnya ada di tangan kelompok Sjahrir, Soekarno dan Hatta. Sangat mungkin pemilihan umum yang akan datang akan mempertegas dukungan terhadap Soekarno dan Hatta. Karena itu, Tan Malaka bersama kelompoknya berusaha untuk lebih cepat merebut kekuasaan. Untuk membina organisasi oposisinya Tan Malaka berpegang pada tiga sumber dukungan.¹³³

1. Martabatnya sendiri dan daya tarik program sosial politik yang dicetuskannya, ini menyebabkan teras inti organisasinya bertambah dengan sejumlah pemuda militan di bawah pemimpin seperti Sukarni, Adam Malik, Chairul Saleh, Pandu Wiguna dan Maruto Nitimihardjo.
2. Perasaan anti Sjahrir yang kuat dikalangan politikus dan militer yang pernah bekerjasama dengan Jepang dan merasa dipojokkan oleh Pamflet *Perjuangan Kita*. Termasuk di dalam kelompok ini adalah para anggota kabinet lama yang sudah dibubarkan oleh Soekarno dan yang merasa bahwa dengan bergabung dengan oposisi kelompok Tan Malaka mereka bakal mendapatkan kesempatan terbaik untuk memperoleh jabatannya kembali. Kelompok lainnya adalah orang-orang yang pernah bekerjasama

¹³³ George Mc Tuman Kahin, *op. cit.* hal. 216-217.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan Jepang seperti para pemimpin militer (ex Peta) dan para pemegang pos yang tinggi dalam bidang pemerintahan yang merasa bahwa kedudukannya terancam oleh gencarnya kampanye anti kolaborator Sjahrir dan yang ingin sekali menjatuhkan kelompok Sjahrir agar kedudukan mereka sendiri lebih terjamin.

3. Gelombang pasang nasionalisme yang membuat banyak orang tidak dengan mudah menyetujui setiap perundingan dalam bentuk apa saja dengan Belanda selama pasukan masih bercokol di bumi Indonesia, lebih-lebih jika jumlah pasukan mereka bertambah.

Untuk itu, Tan Malaka bersama pendukungnya membentuk satu organisasi yang merupakan federasi dari berbagai Partai, Laskar atau Badan yang ada untuk mendukung perjuangan menghadapi Sekutu dan Belanda. Akan tetapi untuk melaksanakan rencana itu mereka harus terlebih dahulu mengganti pemerintah yang ada yang dianggap tidak sejalan dengan kehendak dan keinginan rakyat.¹³⁴

Dalam kongres kedua tanggal 15-16 Januari 1946 diresmikan Persatuan Perjuangan sebagai satu organisasi yang bertujuan memusatkan semua kekuatan perjuangan dan menghasilkan suatu minimum program yang harus dijalankan.

Program minimum itu adalah:¹³⁵

1. Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%

¹³⁴ Tan Malaka, *Dari Penjara Ke Penjara Bagian Tiga*, Yogyakarta: TePLOK Press, 2000, hal. 183.

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 194, bdk juga George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hal. 129.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Pemerintah rakyat (dalam arti sesuaiya haluan pemerintah dengan kemauan rakyat)
3. Tentara Rakyat (dalam arti sesuaiya haluan tentara dengan kemauan rakyat)
4. Melucuti tentara Jepang
5. Mengurus tawanan Bangsa Eropah
6. Menyita (membeslag) dan menyelenggarakan pertanian musuh (kebun)
7. Menyita (membeslag) dan menyelenggarakan perindustrian musuh (Pabrik, bengkel, tambang dll).

Pada mulanya banyak pihak yang mendukung Persatuan Perjuangan termasuk Badan Pekerja, sehingga Badan Pekerja menganjurkan agar seluruh rakyat masuk organisasi ini. Demikian juga para pemimpin politik dan militer lainnya dan juga dari yang menentang Soekarno dan Sjahrir mendukung Persatuan Perjuangan. Akan tetapi tidak sampai bulan Pebruari 1946 mulai tampak tujuan Persatuan Perjuangan yang sebenarnya yaitu mengganti pemerintah yang ada. Hal ini terlihat dari anjuran dari Persatuan Perjuangan kepada partai-partai agar jangan mau mewakili kabinet selama seluruh program minimum Persatuan Perjuangan terlaksana. Menjadi jelas juga bagi banyak orang bahwa tujuan akhir dari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Persatuan Perjuangan adalah menjatuhkan Kabinet Sjahrir. Maka sejak saat itu beberapa partai melepaskan diri dari koalisinya dengan Persatuan Perjuangan.¹³⁶

PP yang merasa dirinya lebih mewakili keinginan nasional daripada KNIP mendesak agar diciptakan keseimbangan kekuatan dalam kabinet. Bahkan kemudian terang-terangan meminta pembubaran kabinet Sjahrir I dan diganti dengan suatu kabinet yang berdasarkan pilihan dan bersifat “nasional” yang dapat mereka kuasai.¹³⁷ Sebelum mereka berhasil menjatuhkan Kabinet Sjahrir I, maka pada tanggal 28 Pebruari 1946 PM Sutan Sjahrir telah lebih dahulu mengajukan surat pengunduran diri dari Perdana Menteri hal mana sangat mengejutkan para pemimpin Persatuan Perjuangan. Dengan demikian maka berakhir masa pemerintahan Kabinet Sjahrir I. Akan tetapi kabinet ini terus bekerja sampai terbentuknya kabinet yang baru yaitu Kabinet Sjahrir II tanggal 12 Maret 1946.

4.2. Tantangan dari Luar Negeri

Seperti sudah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa usaha Kabinet Sjahrir I untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan mendapat tantangan berat dari Belanda. Dengan berbagai cara Belanda berusaha mematahkan segala perjuangan kabinet Sjahrir I baik itu perjuangan diplomasi maupun perjuangan fisik.

¹³⁶ Dua partai yang meninggalkan PP adalah Partai Sosialis dan Pesindo, sedangkan Masyumi walaupun tidak mengambil jalan itu tetapi tidak melarang anggotanya untuk duduk dalam kabinet.

¹³⁷ George Mc Turnan Kahin, *op. cit.*, hal. 221.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Terhadap perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Sjahrir, pihak Belanda tidak serta merta mau menerima untuk berunding. Bahkan ada sebagian masyarakat Belanda yang tidak setuju kalau pemerintah Belanda berunding dengan pemerintah Indonesia. Van Poll misalnya dari Partai Katolik menganggap berunding dengan Indonesia dapat melemahkan kedudukan Belanda.¹³⁸ Bahkan Parlemen Belanda sampai mengirimkan komisi penyelidik ke Indonesia untuk menyelidiki laporan bahwa Van Mook terlalu rapat kepada Republik.¹³⁹ Pemerintah Belanda sendiri melarang perundingan dengan Soekarno dan Hatta serta pemimpin-pemimpin lain di Republik.¹⁴⁰

Perundingan dengan pihak Indonesia bisa dijalankan sejauh itu untuk menggolkan rencana Belanda tentang masa depan Indonesia. Pemerintah Belanda telah merencanakan untuk menjadikan Indonesia sebagai suatu bentuk federasi dengan Belanda, Suriname dan Curacao.¹⁴¹ Dalam federasi itu Indonesia memiliki otonomi untuk mengatur urusan di dalam negeri tetapi tidak demikian yang berkaitan dengan luar negeri.

Di forum PBB pemerintah Belanda dengan mendapat dukungan dari Inggris berhasil mempengaruhi badan dunia itu untuk memandang persoalan Indonesia sebagai persoalan dalam negeri, sebab Indonesia dalam pandangan Belanda adalah wilayah kerajaan Belanda di seberang lautan. Karena itu apa yang

¹³⁸ A.H. Nasution, Jilid 3, *op. cit.*, hal. 25.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ A.H. Nasution, Jilid 2, *op. cit.*, hal. 152.

¹⁴¹ A.H. Nasution, Jilid 3, *op. cit.*, hal. 22-23.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terjadi dalam negeri Indonesia merupakan persoalan dalam negeri Belanda sendiri. Karena itu pula maka lembaga internasional seperti PBB tidak perlu ikut campur tangan dalam persoalan di Indonesia sehingga rencana PBB untuk mengirim komisi penyelidik tidak berhasil disetujui dalam sidang Dewan Keamanan PBB.

Demikian juga Ratu Wilhelmina dalam pidato radionya yang ditujukan kepada rakyat Belanda di negeri Belanda dan “Hindia Belanda” menyatakan harapannya untuk tercapainya kedamaian di Indonesia dan mendapatkan kemenangan dalam soal Indonesia. Rakyat Belanda sendiri memiliki semangat sangat anti Indonesia dan menginginkan perang dengan Indonesia yang dianggap fasis serta menyengsarakan banyak interniran Belanda.

Pihak militer Belanda malah beranggapan bahwa Republik Indonesia sungguh-sungguh cuma boneka Jepang. Mereka juga menganggap bahwa tentara Republik itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah gerombolan fanatik yang sering melakukan teror dan kekacauan di dalam negeri. Karena itu bagi militer Belanda hanya ada satu jalan untuk menyelesaikan masalah Indonesia yaitu dengan mengadakan suatu aksi militer yang cepat dan tegas.

Di Indonesia, Belanda berusaha dengan kekuatan senjatanya pelan-pelan merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Indonesia. Usahnya ini dilawan oleh rakyat Indonesia dengan segala kemampuan yang ada. Beberapa pertempuran sengit terjadi antara Indonesia dengan Belanda atau dengan Inggris seperti Pertempuran di Ambarawa (Palagan Ambarawa), Pertempuran Lima Hari di

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Semarang, Pertempuran Surabaya dan pertempuran di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

Di samping itu, Belanda sering melakukan teror serta merampok dan menciptakan suasana kacau dalam masyarakat untuk memberi kesan kepada dunia luar bahwa rakyat Indonesia adalah golongan ekstremis yang perlu ditumpas dan bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu untuk mengendalikan rakyatnya. Konsekuensi dari situasi seperti ini adalah bahwa Negara Indonesia belum bisa berdiri sendiri. Selanjutnya karena belum bisa berdiri sendiri maka ia harus menerima rancangan Belanda untuk menjadikan Indonesia sebagai negara federasi di bawah kekuasaan Belanda.

Pihak Inggris baik yang ada di Indonesia untuk mewakili Sekutu maupun yang di Inggris bekerjasama dengan Belanda untuk mengembalikan Indonesia kepada kekuasaan Belanda. Usaha untuk mengembalikan Indonesia kepada Belanda tertuang dalam dua kesepakatan yaitu dalam *Civil Affairs Agreement* dalam hasil pertemuan di Singapura pada tanggal 6 Desember 1945.

Semua sikap dan pendirian Bangsa Belanda dan Inggris berkaitan dengan Indonesia sangat menyulitkan pemerintahan Sjahrir dalam mengusahakan penyelesaian persoalan Indonesia dengan Belanda dan itu sangat mempengaruhi pemerintahan Sjahrir dalam menjalankan tugas pemerintahannya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rangkuman

Ketika Kabinet Sjahrir I mulai dibentuk ada tantangan dari beberapa pihak yang berpendapat bahwa pembentukan Kabinet Sjahrir I yang bersifat parlementer merupakan suatu bentuk penyelewengan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensiil. Setelah Kabinet Sjahrir I dibentuk dan mulai menjalankan pemerintahan, muncul tantangan baru yang berasal dari para anggota kabinet pertama yang tidak terpilih lagi dalam kabinet Sjahrir I. Mereka pada umumnya adalah orang-orang terkemuka dari PNI dan Masyumi. Melalui partainya masing-masing mereka menentang kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintahan Sjahrir. Mereka juga menuduh bahwa Kabinet Sjahrir I dan Badan Pekerja KNIP tidak representatif karena itu harus dirombak.

Tantangan lainnya yang jauh lebih berat adalah tantangan dari Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka. Persatuan Perjuangan adalah himpunan dari pelbagai organisasi dan Partai Politik. Mereka memiliki anggota yang cukup banyak dalam KNIP sehingga bisa sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Di bawah pimpinan Tan Malaka, Persatuan Perjuangan menolak strategi diplomasi yang dijalankan Kabinet Sjahrir I. Persatuan Perjuangan menolak dengan tegas kebijakan pemerintah untuk berunding dengan Belanda tanpa terlebih dahulu Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 100%.

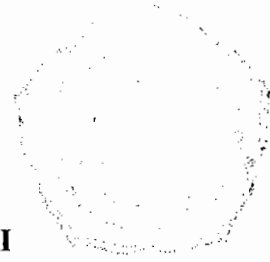
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tantangan lain datang dari pihak Belanda yang dibantu oleh Inggris guna memperjuangkan keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Belanda berusaha mengambil untung dari setiap strategi diplomasi yang ditempuh Kabinet Sjahrir I. Setiap berunding Belanda menyampaikan tuntutan-tuntutan yang sangat merugikan pihak Indonesia, hal mana akan sangat ditentang oleh kelompok-kelompok yang menentang Sjahrir.



BAB V

KEJATUHAN KABINET SJAHRIR I



Suatu pemerintahan sama seperti negara dalam perkembangannya mengalami masa keemasan dan masa kehancuran, atau dengan kata lain perkembangan suatu pemerintahan atau suatu negara akan mengalami masa integrasi dan masa disintegrasi. Yang dimaksud dengan masa integrasi adalah masa di mana suatu negara atau pemerintahan mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga menjadikan negara atau pemerintahan itu kuat dan dewasa. Sedangkan yang dimaksud dengan masa disintegrasi adalah masa ketika suatu pemerintahan atau negara mengalami kemunduran dan kehancuran atau keruntuhan.

Suatu integrasi bisa terjadi kalau suatu pemerintahan atau negara berhasil mempersatukan unsur-unsur yang ada di dalam suatu pemerintahan atau suatu negara. Sebaliknya disintegrasi akan terjadi kalau unsur-unsur yang ada dalam suatu pemerintahan atau suatu negara tidak berhasil dipersatukan.

Untuk mempersatukan unsur-unsur yang ada dalam suatu masyarakat atau pemerintahan atau negara maka diperlukan beberapa hal berikut:¹⁴²

1. Pembinaan akan kesadaran dan partisipasi
2. Pelaksanaan asas keadilan sosial dan asas subsidiaritas
3. Pengawasan sosial secara intensif dan persuasif

¹⁴² P.J. Suwamo (editor), *Negara dan Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 1995, hal. 36.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Tekanan dari luar
5. Bahasa Persatuan
6. Lambang kesatuan

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan tidak terjadinya penyatuan unsur-unsur dalam suatu masyarakat atau negara adalah:

1. Kesombongan rasial
2. Kesombongan kultural
3. Fanatisme agama
4. Semangat kedaerahan atau daerahisme (propinsialisme) dan
5. Ketidakserasian hubungan mayoritas-minoritas.¹⁴³

Pemerintahan Kabinet Sjahrir I juga mengalami masa integrasi dan masa disintegrasi. Masa integrasi memang kurang tampak kalau dibandingkan dengan masa disintegrasi karena dalam waktu yang sedemikian singkat serta penuh dengan kesulitan maka sulit sekali bagi Kabinet Sjahrir I untuk memperlihatkan kinerja kegiatan yang menonjol. Masa integrasi Kabinet Sjahrir I terjadi ketika Kabinet mendapatkan dukungan dari kalangan luas dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Dukungan itu menandakan adanya kesatuan antara pemerintah dan rakyat serta unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Beberapa keberhasilan yang dicapai oleh Kabinet Sjahrir I antara lain adalah bahwa Kabinet Sjahrir I berhasil mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari ancaman kembali berkuasanya Belanda. Kabinet Sjahrir I juga

¹⁴³ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berhasil menata kembali pemerintahan di daerah-daerah serta memenangkan diplomasi di luar negeri. Dalam bidang ekonomi Kabinet Sjahrir I bisa menjaga sehingga kebutuhan pokok rakyat tersedia.

Sedangkan masa disintegrasi Kabinet Sjahrir I terjadi ketika dalam kongres KNIP di Solo peserta kongres mengajukan mosi tidak percaya kepada Kabinet yang mengakibatkan Kabinet Sjahrir I jatuh. Namun proses untuk sampai kepada masa kejatuhan sudah berlangsung sejak awal terbentuknya Kabinet Sjahrir I melalui perlawanan dari para mantan menteri dari Kabinet Presidensiil yang sakit hati karena merasa dirugikan oleh Pamflet *Perjuangan Kita* yang ditulis Sjahrir. Perlawanan yang sama dilakukan oleh kalangan tentara yang juga merasa dikecam oleh Sjahrir melalui pamflet yang sama. Disintegrasi menjadi semakin terlihat ketika Persatuan Perjuangan yang didirikan Tan Malaka mulai melakukan serangan langsung kepada Kabinet Sjahrir I.

Kabinet Sjahrir I umumnya diserang karena dua hal yaitu pertama, anggota kabinet yang tidak representatif karena didominasi oleh pemimpin-pemimpin dari Partai Sosialis dan kebanyakan terdiri dari orang-orang non politikus yang kompeten yang menurut catatan tidak pernah bekerjasama dengan Jepang. Sehingga sebenarnya, hampir tidak bisa dikatakan bahwa pemerintahan Kabinet Sjahrir I adalah suatu pemerintahan koalisi nasional. Kedua, kabinet juga diserang karena politik diplomasi yang menjadi andalannya dalam menyelesaikan persoalan Indonesia nampaknya tidak menunjukkan hasil-hasil yang nyata

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terutama setelah gagal melakukan perundingan pertama pada bulan Nopember 1945 Van Mook kembali ke negeri Belanda dan tidak kembali ke Indonesia dalam waktu yang lama.

Dalam situasi kabinet yang diserang seperti ini, kemunculan tokoh yang mampu menggalang dukungan massa dan memiliki program-program yang dapat diterima massa akan mempercepat terjadinya krisis dalam kabinet. Dan Tan Malaka tampil sebagai sosok yang bisa menggalang dukungan dari banyak organisasi dan memiliki program-program yang dapat diterima masyarakat. Tampilnya Tan Malaka menjadi faktor yang paling menentukan kejatuhan Kabinet Sjahrir I.

Sejak kembali dari pengasingannya di luar negeri, Tan Malaka sudah mulai menjalankan kegiatan yang menunjukkan bahwa dia berkeinginan kuat untuk ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan bahkan kalau perlu mengambil alih pimpinan revolusi. Untuk itu, ia bersama Subardjo dan beberapa pemimpin lainnya tidak segan-segan mendesak Soekarno dan Hatta untuk mengundurkan diri dari pucuk pimpinan Republik. Ia bahkan mengajak Sjahrir untuk bergabung dengan mereka dalam menggulingkan Soekarno dan Hatta. Sjahrir menolak ajakan Tan Malaka dan sedapat mungkin mencegah keinginan dan kemungkinan bagi Tan Malaka untuk naik ke puncak pimpinan tertinggi republik.

Tan Malaka menyadari bahwa Sjahrir tidak berada di pihaknya. Ia menyadari pula bahwa Sjahrir memiliki kekuatan yang bisa menghalangi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perjuangan politiknya. Karena itu, Tan Malaka berusaha mencari dukungan sebanyak mungkin orang dan organisasi untuk menentang pemerintahan Sjahrir. Untuk itu Tan Malaka bersama wakil-wakilnya berusaha membentuk suatu organisasi besar dengan tujuan menyaingi dan akhirnya mengganti pemerintah yang ada.¹⁴⁴ Dengan memanfaatkan solidaritas nasional, pada tanggal 4 dan 5 Januari 1946 mereka mengadakan suatu rapat di Purwokerto yang dihadiri 300 delegasi dari hampir semua organisasi politik dan militer. Dalam rapat ini, Tan Malaka mengajak para peserta rapat untuk mendirikan Persatuan Perjuangan. Ia juga menyerukan pemantapan solidaritas politik monolitik selama perjuangan kemerdekaan, dihapuskannya semua perpecahan dalam bidang politik, membatalkan semua perundingan dengan Belanda dan merebut semua milik asing.¹⁴⁵ Organisasi Persatuan Perjuangan akhirnya didirikan dalam rapat berikutnya di Solo tanggal 15 dan 16 Januari 1946.¹⁴⁶

Walaupun Persatuan Perjuangan dalam resolusi yang dikeluarkannya memperlihatkan bahwa tujuan mereka adalah mendesak pemerintah agar bekerjasama untuk melaksanakan dengan segera program minimum yang telah diputuskan oleh Persatuan Perjuangan, tetapi cukup jelas bagi banyak orang bahwa tujuan jangka pendek pimpinan tertinggi Persatuan Perjuangan adalah menjatuhkan Kabinet Sjahrir.¹⁴⁷ Hal ini terlihat kemudian ketika PNI, salah satu

¹⁴⁴ George Mc Kahin, *op. cit.*, hal. 217

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 217

¹⁴⁶ Tan Malaka, *op. cit.* hal. 189.

¹⁴⁷ George Mc Kahin, *op.cit.*, hal. 220.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

organisasi yang bergabung dengan Persatuan Perjuangan mengeluarkan resolusi pada bulan Januari 1946 yang menganjurkan agar unsur-unsur dalam kabinet harus terdiri dari kekuatan-kekuatan politik yang seimbang. Resolusi ini kemudian disetujui oleh Badan Pekerja.¹⁴⁸ Tetapi pemerintah tidak sepenuhnya memenuhi permintaan-permintaan dari kelompok pembuat resolusi. Selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari, Badan Pekerja mengajukan pengunduran dirinya kepada KNIP. Akan tetapi KNIP tidak bisa menerima pengunduran diri itu dengan alasan karena KNIP tidak bisa menemukan cara yang dapat disetujui oleh mayoritas anggotanya, baik untuk meningkatkan jumlah anggotanya sendiri maupun memperbaiki komposisi anggotanya yang ada.¹⁴⁹

Karena tidak berhasil mengubah susunan kekuatan KNIP dan badan perwakilannya, Badan Pekerja, maka para pemimpin PP menuntut pembubaran Kabinet Sjahrir dan diganti dengan satu kabinet baru berdasarkan pilihan dan bersifat 'nasional' yang bisa dikuasai oleh kelompok oposisi. Tekanan mereka begitu kuat untuk membubarkan Kabinet Sjahrir I sehingga Soekarno maupun KNIP tidak bisa mengabaikan keinginan mereka begitu saja. Namun sebelum mereka berhasil menjatuhkan Kabinet Sjahrir I, PM Sjahrir sudah terlebih dahulu mengundurkan diri hal mana sangat mengejutkan para pemimpin PP.¹⁵⁰

Peletakkan jabatan PM Sjahrir I baru diketahui oleh anggota KNI setelah rapat KNI di Solo pada tanggal 27/28 Pebruari 1946 di Solo. Dalam rapat yang

¹⁴⁸ George Mc Kahin, *op. cit.*, hal. 220.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal. 221.

¹⁵⁰ *Ibid.*,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dibuka oleh Mr. Asaat itu Presiden Soekarno mengumumkan peletakkan jabatan Sutan Sjahrir. Pengumuman ini menggemparkan sidang.¹⁵¹ Dalam rapat itu presiden juga meminta pengesahan atas permintaan peletakkan jabatan itu. Di samping itu juga presiden meminta pertanggungjawaban tentang kebijaksanaan politik kabinet. Kesimpulan dari petanggungjawaban Sjahrir adalah bahwa pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menempuh jalan damai dan perundingan.¹⁵²

Kekuatan Tan Malaka mampu menjatuhkan Kabinet Sjahrir I karena beberapa hal. Pertama, program Tan Malaka untuk merdeka 100 % mendapat dukungan dari rakyat terutama laskar-laskar pejuang serta kaum muda pejuang. Sedangkan politik diplomasi pemerintah dianggap terlalu lemah dan tidak revolusioner sehingga dianggap tidak cocok dengan situasi revolusi pada waktu itu yang menuntut pula tindakan-tindakan yang revolusioner.

Kedua, pindahnya pusat pemerintahan ke Yogyakarta dan di pihak lain Sjahrir tetap berada di Jakarta untuk melanjutkan kontak-kontak dengan Belanda dan Inggris telah memberi ruang dan waktu bagi para oposisi untuk mengembangkan suatu oposisi yang lebih efektif guna menentang kebijakan-kebijakan pemerintah.¹⁵³ Yogyakarta merupakan pusat kegiatan para pemuda, Badan Perjuangan, dan militer seperti Laskar Rakyat dan Hizbulla yang jauh dari kontrol pemerintah pusat sehingga mereka dapat melakukan perjuangan fisik

¹⁵¹ Tan Malaka, *op. cit.*, hal. 212

¹⁵² *Ibid.*, hal. 212

¹⁵³ Legge, *op. cit.*, hal. 199.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melawan Belanda tanpa harus mendapatkan tekanan dari pemerintah pusat. Sedangkan di Jakarta perjuangan yang bersifat militer hampir tidak mungkin dijalankan karena dapat dikontrol oleh pemerintah pusat. Karena itu dari perspektif yang lebih luas Jakarta dan Yogyakarta merupakan simbol dari perbedaan antara diplomasi dan perjuangan, diplomasi dan perlawanan.¹⁵⁴

Ketiga, pemerintah dan militer sering bertentangan dalam menjalankan politik terhadap Belanda. Antara pemerintah dan Markas Besar Tentara terasa kurang adanya saling pengertian.¹⁵⁵ Hal ini disebabkan karena anggota badan penasihat yang ada di dalam TRI berasal dari tokoh-tokoh oposisi yang menentang setiap usaha diplomasi yang dilakukan pemerintah. Lemahnya Kabinet Sjahrir I juga disebabkan terjadinya banyak pertempuran antara Belanda dan Indonesia yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah. Pertempuran-pertempuran itu mendatangkan banyak kerugian bagi pihak rakyat Indonesia yang selanjutnya bisa menimbulkan rasa kurang percaya rakyat kepada pemerintah.

Rangkuman

Dari uraian di atas terlihat bahwa jatuhnya kabinet Sjahrir I disebabkan karena kebijakan kabinet untuk melakukan perundingan dengan Belanda serta komposisi kabinet yang dianggap tidak representatif sehingga tidak memuaskan beberapa pihak. Komposisi kabinet yang tidak representatif telah menimbulkan

¹⁵⁴ Anderson, *op. cit.*, hal. 201.

¹⁵⁵ Nasution, Jilid 3, *op. cit.*, hal. 29.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ketidakpuasan dan penolakan terhadap kabinet sjahrir I oleh para mantan anggota Kabinet Presidensiil. Penolakan ini berujung pada usaha untuk menjatuhkan Kabinet Sjahrir I. Sedangkan kebijakan menempuh jalan berunding dengan Belanda menimbulkan penolakan dari pihak Persatuan Perjuangan di bawah pimpinan Tan Malaka. Tan Malaka yang memperjuangkan Program Minimumnya kemudian berhasil memaksa Sutan Sjahrir untuk meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan dengan demikian Kabinet Sjahrir I jatuh.

Ketidakharmonisan hubungan antara militer dengan pemerintah turut memperberat masalah yang dihadapi Kabinet Sjahrir I. Situasi yang kacau seringkali tidak bisa dikendalikan karena banyak pemimpin militer berasal dari golongan opsi yang berusaha menjatuhkan Kabinet Sjahrir I. Para pemimpin membiarkan situasi menjadi kacau sehingga menimbulkan rasa tidak percaya di kalangan rakyat terhadap pemerintah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI

KESIMPULAN

Skripsi ini menganalisis dan membahas tentang Kabinet Sjahrir I yang memerintah Negara Republik Indonesia dalam kurun waktu empat bulan mulai tanggal 14 Nopember 1945 sampai dengan tanggal 12 Maret 1946. Setelah menganalisis Kabinet Sjahrir I dapatlah dijelaskan bahwa pembentukan Kabinet Sjahrir I merupakan tuntutan situasi yang berkembang pada masa itu. Masa revolusi membutuhkan para pemimpin yang revolusioner yang bisa memimpin dan menggerakkan rakyat dalam revolusi. Untuk menjadi seorang pemimpin yang revolusioner maka kompromi-kompromi dengan pihak lawan sedapat mungkin dihindarkan. Sikap revolusioner seperti itu dianggap tidak terdapat dalam diri Soekarno dan Hatta serta kabinetnya pada waktu itu. Kabinet Presidensiil dianggap kabinet *Bucho* karena itu tidak bisa diharapkan untuk menggerakkan revolusi sehingga timbul usaha untuk menggantikan pemerintahan Republik Indonesia yang pertama dengan suatu pemerintahan baru yang lebih revolusioner.

Pemerintahan Presidensiil pertama juga dianggap tidak demokratis karena selama Negara Republik Indonesia belum memiliki lembaga-lembaga negara yang lain, Presiden memiliki kekuasaan penuh dan tidak terkontrol. Ketika Kabinet Presidensiil pertama dibentuk, lembaga legislatif yang bertugas mengontrol pemerintah belum terbentuk. Hal seperti itu bisa menjerumuskan pemerintah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kepada sikap otoriter dan fasis hal mana bertentangan dengan semangat demokrasi yang sangat dijunjung tinggi oleh negara-negara barat yang menang perang Dunia II dan menjadi rujukan bagi setiap negara yang baru dibentuk. Dengan komposisi kabinet yang kebanyakan berasal dari orang-orang yang bekerjasama dengan Jepang maka muncul tuduhan dari negara barat bahwa pemerintahan Indonesia merupakan pemerintahan fasis dan tidak demokratis, hal mana sangat merugikan perjuangan Indonesia di dunia internasional.

Dengan dikeluarkannya Maklumat No. X, Maklumat 3 Nopember 1945 dan Maklumat 11 Nopember 1945 serta Maklumat 14 Nopember 1945 maka dibentuklah Kabinet Sjahrir I dengan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menterinya. Sjahrir dianggap cocok untuk memimpin Bangsa Indonesia karena sikap dan pikirannya berkaitan dengan revolusi Indonesia sesuai harapan revolusi dan cocok pula dengan keinginan negara-negara Barat sebab selama masa penjajahan Sjahrir termasuk orang yang tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Ia bersama teman-temannya berjuang di bawah tanah untuk menghadapi penjajah. Karena sikapnya yang menolak bekerjasama dengan Belanda maupun Jepang, ia dipenjarakan oleh pemerintah Belanda. Karena itu semangatnya yang anti penjajah dianggap cocok untuk memimpin revolusi Indonesia. Di pihak lain, Sjahrir berlatarbelakang pendidikan Barat sehingga dianggap bisa diterima oleh negara Barat karena dianggap bisa menerapkan pemerintahan yang demokratis seperti di Barat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Setelah pemeritahan baru sudah dibentuk, maka tugas pemerintahlah untuk mengatur Negara Republik Indonesia sehingga terarah kepada cita-cita hidup negara Republik Indonesia. Untuk itu, Kabinet Sjahrir I melaksanakan beberapa kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan situasi pada waktu itu. Yang menjadi tuntutan situasi pada waktu itu adalah bahwa Bangsa Indonesia harus berusaha sedapat mungkin untuk mencegah kembalinya Belanda untuk menjajah Indonesia. Usaha pencegahan ini dilakukan dengan dua cara yaitu perjuangan diplomasi baik ke luar negeri maupun diplomasi di dalam negeri. Cara lain yang ditempuh adalah melalui perjuangan militer yaitu bertempur melawan Belanda. Pemerintah juga berusaha mengadakan pembaharuan di bidang birokrasi pemerintahan dengan membentuk pemerintahan daerah di berbagai daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Di bidang ekonomi, pemerintah berusaha agar rakyat tidak kekurangan bahan-bahan kebutuhan pokok disamping mengembangkan ekonomi yang selama masa pendudukan Jepang tidak dikembangkan. Dan akhirnya, pemerintah menyusun kekuatan bersenjata sebagai badan keamanan yang bertugas menjaga keamanan negara. Untuk itu BKR yang semula hanya merupakan Badan Penolong Koban Perang diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat dan selanjutnya diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat lalu diubah lagi menjadi Tentara Rakyat Indonesia.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Kabinet Sjahrir I mendapat banyak tantangan baik itu tantangan dari dalam negeri maupun tantangan dari luar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

negeri. Tantangan dari dalam negeri berasal dari kelompok-kelompok yang merasa sakit hati karena merasa dirugikan oleh tulisan Sjahrir dalam pamflet *Perjuangan Kita*, serta dari kelompok Tan Malaka yang tidak setuju dengan strategi perjuangan diplomasi Sjahrir dalam menghadapi Belanda dan Sekutu. Kelompok Tan Malakalah yang paling berpengaruh dalam menjatuhkan Kabinet Sjahrir I sebab kelompok ini memiliki pendukung yang banyak dan tersebar di berbagai organisasi dan partai politik yang berkembang di tanah air. Tantangan dari luar berasal dari Belanda yang selalu berusaha dengan berbagai cara mengambil untung dari setiap strategi yang diterapkan oleh Bangsa Indonesia.

Karena tantangan yang begitu berat dari pelbagai pihak akhirnya Sjahrir merasa tidak mendapat dukungan terhadap kebijakan yang ditempuhnya. Karena tidak mendapat dukungan lagi maka Sjahrir menyatakan diri mundur dari Perdana Menteri dan dengan demikian jatuhlah Kabinet Sjahrir I. Kabinet Sjahrir I memang banyak mendapat kritikan terhadap kebijakan yang ditempuhnya, tetapi di tengah kritikan itu Kabinet Sjahrir I memperlihatkan keberhasilan dalam memimpin Bangsa Indonesia. Keberhasilan yang paling menonjol adalah mampu mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tengah situasi yang serba sulit baik itu situasi dalam negeri maupun situasi luar negeri.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Anderson, Benedict R.O'G. (1972). *Java in A Time of Revolution Occupation and Resistance, 1944-1946*. Ithaca: Cornel University Press.
- Anwar, Rosihan. (1966). *Perdjalanannya Terakhir Pahlawan Nasional Sutan Sjahrir*, Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta
- _____, (Ed.). (1980). *Mengenang Sjahrir*. Jakarta: Gramedia.
- Badudu-Zain. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bandaro, Bantarto. (dkk). (1995). *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: CSIS
- Basyaib, Hamid. (penterj.). (1993). *Kemelut Demokrasi Liberal*, Jakarta: LP3ES
- Budiardjo, Miriam. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Budiman, Arief. (2002). *Teori Negara*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Cahyono, Cheppy Hari. (1986). *Ideologi Politik*, Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan dan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. (1991). *Seminar Sejarah Nasional IV*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
- Djiwandono, Soedjati.J. (1995). *Setengah Abad Negara Pancasila Tinjauan Kritis ke Arah Pembaruan*. Jakarta: Central for Strategic and International Studies.
- Engelen, O.E. (dkk). (1997). *Lahirnya Satu Bangsa dan Negara*, Jakarta: UI Press
- Ensiklopedi Umum. (1973). Yogyakarta: Kanisius.
- Feith, Herbert. (1973). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca and London: Cornel University Press.
- _____, (1978). "Demokrasi: Tantangan Tanpa Akhir" dalam *Prisma*, No. 7 Tahun VII. Jakarta: LP3ES

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Feith, Herbert dan Lance Castles. (1988). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES
- Gaffar, Afan. (2000). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hatta, Mohamad. (1982). *Sekitar Proklamasi*, Jakarta: Tintamas Indonesia.
- Heuken, A. (dkk). (1984). *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jilid 1, Jakarta: CLC
- _____. (1984). *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jilid 2, Jakarta: CLC
- _____. (1984). *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jilid 3, Jakarta: CLC
- _____. (1984). *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jilid 4, Jakarta: CLC
- Ingleson, John. (1988). *Jalan ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*, Jakarta: LP3ES
- Joeniarso. (1996). *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Kahin, George Mc Turnan. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Solo: UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan
- Kansil, C.S.T. (1995). *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Lapian, A.B. (dkk). (1996). *Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Legge, J.D. (1993). *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan Peranan Kelompok Sjahrir*, Jakarta: Grafiti
- Lijphart, Arend. (1995). *Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Loebis, Aboe Bakar. (1995). *Kilas Balik Revolusi Kenangan, Pelaku dan Saksi*, Jakarta: UI-Press
- Lubis, Solly. (1989). *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju
- Mahfud, Moh. MD. (1993). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- _____. (1993). *Demokrasi Konstitusi Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberti.
- Malaka. Tan. (2000). *Dari Penjara ke Penjara Bagian Tiga*, Yogyakarta: Teplok Press
- Moedjanto, G (1988): *Indonesia Abad ke-20*, Jilid I, Jogyakarta: Kanisius
- _____. (1988). *Indonesia Abad ke-20*, Jilid II, Yogyakarta: Kanisius
- Mrazek, Rudolf. (1996). *Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Muhaimin, Yahya & Colin MacAndrews. (1995). *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*, Yogyakarta: Gadjaja Mada University Press
- Nasution, A.H. (1996). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 1, Bandung: Disjarah-AD & Angkasa
- _____. (1996). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 2, Bandung: Disjarah-AD & Angkasa.
- _____. (1996). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* Jilid 3, Bandung: Disjarah-AD & Angkasa
- Noer, Deliar. (1983). *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV. Rajawali
- _____. (1999). *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung: Mizan
- Pamudji, S. (1995). *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Poerwantana, P.K. (1994). *Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pranoto, Suharsono. W. (2001). *Revolusi Agustus*, Jogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Pringgodigdo, Abdul Gaffar. (1955). *Perubahan Kabinet Presidensial menjadi kabinet parlementer*. Jogyakarta: Jajasan Fonds Universitas Negeri Gadjaja Mada
- Rahman, Arifin. (2002). *Sistem Politik Indonesia*, Surabaya: SIC
- Ricklefs, M.C. (1998). *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjaja Mada University Press
- Rodee, Carlton Clymer (dkk). (2002). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sanit, Arbi. (1995). *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Sartono, Kartodirdjo. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Silalahi, S. (2001). *Dasar-Dasar Indonesia Merdeka*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama
- Simamora, Sahat. (Penterj.). (1986). *Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta: PT. Bina Aksara
- Sjahrir, Sutan. (1990). *Renungan dan Perjuangan*, Jakarta: Djembatan dan Dian Rakyat.
- _____. (2000). *Pikiran dan Perjuangan*, Yogyakarta: Jendela
- Suhardiman. (1996). *Pembangunan Politik Satu Abad*, Jakarta: Yayasan Lestari Budaya
- Suhartono. (1994). *Sejarah Pergerakan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sukarna. (1990). *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- _____. (1992). *Sistem Politik Indonesia*, III, Bandung: Mandar Maju
- Sumantri, Iwa Kusuma. (t.t). *Sejarah Revolusi Indonesia*, Djilid Pertama. Tanpa penerbit.
- _____. (t.t). *Sejarah Revolusi Indonesia*, Djilid Kedua. Tanpa Penerbit.
- Suprpto, Bibit. (1985). *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Suseno, Frans Magnis. (2001). *Etika Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Suwarno, P.J. (1990). *Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya
- _____. (1993). *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis & Sosio-Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Kanisius.
- _____. (1994). *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, Yogyakarta: Kanisius.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- _____. “Integrasi Nasional dan Integrasi Negara Indonesia (1945-1949) dalam Kartodirdjo. Sartono. A. (dkk). (1995). *Negara dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- _____. “Latar Belakang Sosio-Budaya Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”, *Seri Pengetahuan Dan Pengajaran Sejarah*, Seri XXIV, No. 1, Juni 1999. Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma.
- Suwirta, Andi. (2000). *Suara Dari Dua Kota: Revolusi Indonesia Dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) Dan Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta) 1945-1947*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Swantoro, P. (2002). *Dari Buku ke Buku: Sambung Menyambung Menjadi Satu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan Rumah Budaya TeMBI
- Syafi'i, Anwar. (Ed.). (1998). *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, Bandung: Mizan
- Syafi'ie, Inu Kencana. (1994). *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Toer, Pramudia Ananta. (1999). *Kronik Revolusi Indonesia*, Jilid I, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- _____. (1999). *Kronik Revolusi Indonesia*, Jilid II, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

Sumber Majalah:

- Prisma*, 8 Agustus 1981
Prisma, 12 Desember 1981
Prisma, Edisi Khusus 20 Tahun Prisma 1971-1991
Prisma, 8, 1985

Sumber Koran

- Kedaulatan Rakyat*, 15 Nopember 1945
Kedaulatan Rakyat, 17 Nopember 1945
Kedaulatan Rakyat, 22 Nopember 1945
Kedaulatan Rakyat, 28 Nopember 1945
Kedaulatan Rakyat, 11 Desember 1945
Kedaulatan Rakyat, 18 Desember 1945
Semangat Merdeka, 20 Nopember 1945
Semangat Merdeka, 27 Nopember 1945
Semangat Merdeka, 6 Desember 1945
Soeloeh Merdeka, 13 Desember 1945
Pantja Raja, 1 Pebruari 1946
Pantja Raja, 1 Desember 1945
Pantja Raja, 23 Desember 1945

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pantja Raja, 15 Januari
Pantja Raja, 1 Pebruari 1946
Revue Indonesia, 22 Januari 1946



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 1:

MAKLUMAT NO. X*
Presiden Republik Indonesia,

Sesudah mendengar pembitjaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk kekuasaannya yang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut pasal IV Aturan Peralihan dari Undang – Undang Dasar hendaknja dikerdjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pekerjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinja berhubungan dengan pentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan bernama Dewan Pekerdja yang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat;

Menimbang bahwa didalam keadaan yang genting ini perlu adanya Badan yang ikut bertanggung djawab tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah Pemerintah;
Menimbang selandjutnya bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakjat;

Memutuskan:

Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara, serta menjetudjui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerdja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat.

Djakarta, 16 Oktober 1945.
Wakil Presiden Republik Indonesia,
Mohammad Hatta.

* Dikutip dari Pringgodigdo, Abdul Gaffar. *Perubahan Kabinet Presidensil Menjadi Kabinet Parleментар*, Yogyakarta: Jajasan Fonds Universitas Negeri Gadjah Mada., 1955, hal.. 28.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 2:

MAKLUMAT PEMERINTAH*

PARTIJ POLITIK. Anjuran Pemerintah tentang pembentukan Partij-Partij Politik

Berhubung dengan usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat kepada Pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada Rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partij-partij politik, dengan restriksi, bahwa partij-partij politik itu hendaknya memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu bahwa:

1. Pemerintah menyukai timbulnya partij-partij politik karena dengan adanya partij-partij itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partij-partij politik itu telah tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota Badan-Badan perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

Jakarta, 3 November 1945
Wakil Presiden,
Mohammad Hatta

* Dikutip dari Osman Raliby, *Documenta Historica I*, Djakarta, Bulan Bintang, 1953 seperti dikutip oleh Pramudia Anantatur, *Kronik Revolusi Indonesia*, Jilid I, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999, hal. 438.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 3:

PENGUMUMAN BADAN PEKERDJA No. 5*

*MENTERI. TANGGUNG-DJAWAB
MENTERI. Usul Badan Pekerdja
jang telah disetujui oleh
Pemerintah, tentang pertanggung-
djawab Menteri kepada Badan
Perwakilan Rakjat.*

Supaja lebih tegas adanja kedaulatan rakjat dalam susunan Pemerintah Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar jang dirubah, Badan Pekerdja dalam rapatnja telah membitjarakan soal pertanggung-djawab para Menteri kepada Badan Perwakilan Rakjat (menurut susunan sementara kepada Komite Nasional Pusat).

Seperti diketahui, maka dalam Undang-Undang Dasar kita tidak terdapat pasal, baik jang mewadajiban maupun jang melarang para Menteri bertanggung-djawab. Pada lain pihak pertanggung-djawab Menteri kepada Badan Perwakilan Rakjat itu, adalah sesuatu djalan untuk memperlakukan kedaulatan rakjat. Maka berdasarkan alasan tersebut, Badan Pekerdja mengusulkan kepada Presiden untuk mempertimbangkan adanja pertanggung-djawab itu dalam susunan Pemerintah.

Presiden menerima baik usul Badan Pekerdja, hingga dengan persetujuan tadi dimulai adanja pertanggung-djawab para Menteri kepada Badan Perwakilan Rakjat dalam susunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Djakarta, 11 November 1945.

BADAN PEKERDJA
KOMITE
NASIONAL

Ketua,

Penulis,

St. SJAHRIR

SOEWANDI

* Dikutip dari Pringgodigdo, Abdul Gaffar. *Perubahan Kabinet Presidensil Menjadi Kabinet Parlementer*, Yogyakarta: Jajasan Fonds Universitas Negeri Gadjah Mada, 1955, hal. 28.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 4:

MAKLUMAT PEMERINTAH*

KABINET II. SUSUNAN
KABINET II. Pembentukan
Kabinet II.

Oleh karena Kementerian pertama dari Republik Indonesia dibentuk buat sementara waktu, tatkala saatnja genting dalam sedjarah Negara, maka sudah semestinja, bahwa bagian-bagian Pemerintah tadi menunjukkan tanda tergesa-gesa itu. Pembaharuan dari Kabinet memang telah lama dirasakan perlunja, akan tetapi berhubung dengan beberapa keadaan, maka terpaksa ditunda sampai ada kesempatan jang baik.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengalami udjian-udjian jang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanja menegakkan diri, merasa, bahwa saat sekarang sudah tepat untuk mendjalankan matjam-matjam tindakan darurat guna menjempurnakan tata-usaha Negara kepada susunan demokrasi.

Jang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan Kabinet baru itu ialah, *bahwa tanggung-djawab adalah didalam tangan Menteri.*

ST. SJAHRIR	—	Perdana Menteri
		Menteri Luar Negeri
		„ Dalam Negeri
Mr. A. SJARIFUDIN	—	„ Penerangan
		„ Keamanan Rakjat
Mr. SOENARJO KOLOPAKING ...	—	„ Keuangan
Dr. T. G. S. MULIA	—	„ Pengadjaran
Mr. SUWANDI	—	„ Kehakiman
Dr. ADJI DARMO	—	„ Sosial
Dr. DARMASETIAWAN	—	„ Kesehatan
Ir. DARMAWAN	—	„ Kemakmuran
Ir. PUTUHENA	—	„ Pekerdjaan Umum
Ir. ABD. KARIM	—	„ Perhubungan
H. RASJIDI	—	„ Negara

Tindakan-tindakan demokrasi jang lain jang segera harus didjalankan ialah mengadakan Pemilihan Umum, supaja wakil-wakil rakjat yang terpilih dengan

* Dikutip dari Pringgodigdo, Abdul Gaffar. *Perubahan Kabinet Presidensil Menjadi Kabinet Parlemonter*, Yogyakarta: Jajasan Fonds Universitas Negeri Gadjah Mada, 1955, hal.. 28.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

merdeka dapat mengambil bahagian jang tepat dalam mendjalankan politik Pemerintah dan menentukan haluan Negara.

Dengan kesempurnaan dari Pemilihan Umum ini, maka habislah dengan sendirinja pekerdjaan Badan Pekerdja sekarang, jang baru-baru ini disusun, jang buat sementara waktu mendjalankan pekerdjaan Madjelis Perwakilan Rakjat dan Dewan Pembentukan Undang-Undang .

Untuk mendorong dan memadjukan tumbuhnja pikiran-pikiran politik, maka Pemerintah Republik Indonesia mengandjurkan kepada rakjat untuk mendirikan partai-partai guna mewakili segala pikiran politik dalam Negara. Bibit-bibit dari beberapa partai itu sudah timbul sebelum pendjadjahan Djepang, akan tetapi terpaksa tidak menampakkan diri dalam zaman pemerintahan Djepang disini.

Baik Djepang, maupun Belanda bertindak keras terhadap komunis dan partai-partai politik jang menghendaki kemerdekaan sesempurna-sempurnanja.

Republik Indonesia tidak akan melarang organisasi politik selama dasarnya atau aksi-aksinja tidak melanggar azas-azas demokrasi jang sah.

Djakarta, tgl. 14 Nopember
1945.

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 5:

SATUAN PELAJARAN 1

Program Pendidikan : Ilmu Pengetahuan Sosial

Mata Pelajaran : Sejarah

Pokok Bahasan : Masa Kemerdekaan

Sub Pokok Bahasan : Perubahan dan perkembangan masyarakat dan pemerintahan pada masa awal kemerdekaan

Sub-sub Pokok Bahasan: Pemerintahan Kabinet Sjahrir I

Alokasi waktu : 2 X 45 menit

Kelas / Semester : III SMU / I

Pertemuan : I

I. Standar Kompetensi

Merekonstruksi berbagai perubahan dan perkembangan masyarakat dan pemerintahan pada masa awal kemerdekaan

II. Kompetensi Minimal/ Indikator:

Setelah mengikuti pelajaran, diharapkan siswa mampu:

1. Menjelaskan tentang sistem pemerintahan presidensiil.
2. Menjelaskan tentang sistem pemerintahan parlementer
3. Menjelaskan perbedaan antara sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer
4. Menjelaskan usaha Sutan Sjahrir dalam menerapkan sistem parlementer di Indonesia.
5. Menjelaskan tantangan dalam menerapkan sistem parlementer pada masa awal kemerdekaan.

III. Materi

1. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensiil adalah sistem pemerintahan yang dikepalai oleh seorang presiden. Dalam sistem presidensiil, kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif);

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen (DPR), pemerintah dan parlemen adalah sejajar; menteri-menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden; eksekutif dan legislatif sama kuat.

2. Pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Dalam sistem parlementer kepada negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Karena itu maka kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dan tergantung kepada parlemen. Sistem pemerintahan parlementer disebut juga dengan sistem pemerintahan kabinet. Jadi elemen-elemen yang ada dalam sistem parlementer itu adalah sebagai berikut:
 - a. Parlemen dipilih dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia.
 - b. Mayoritas anggota parlemen (satu atau beberapa fraksi yang membentuk koalisi) membentuk pemerintah.
 - c. Perdebatan dan pertentangan antara mayoritas dan oposisi adalah inti dari parlementerisme.
 - d. Pimpinan eksekutif berkepala dua, yakni kepala negara (raja, presiden yang berfungsi representatif) dan kepala pemerintahan (Perdana Menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen).
 - e. Kepala negara mengangkat kepala pemerintahan yang harus didukung oleh mayoritas dalam parlemen.
 - f. Kepala pemerintahan memilih para menteri (kabinet), yang biasanya juga anggota parlemen.
 - g. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan politik dalam parlemen dan dapat dijatuhkan dengan mosi tak percaya.
3. Perbedaan antara Sistem Pemerintahan Presidensiil dan Sistem Pemerintahan Parlementer.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- a. Dalam pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan yang bisa dijabat oleh Perdana Menteri, Presiden dan lainnya bergantung pada mosi atau kepercayaan badan legislatif dan dapat turun dari jabatan melalui mosi tak percaya dari legislatif; dalam pemerintahan presidensiil, kepala pemerintahan hampir selalu disebut presiden – dipilih untuk masa jabatan yang ditentukan oleh UUD dan dalam keadaan normal tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri oleh badan legislatif.
 - b. Kepala pemerintahan presidensiil dipilih oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui badan pemilihan dan Perdana Menteri dipilih oleh badan legislatif.
 - c. Sistem Parlementer memiliki pemerintah/eksekutif kolektif atau kolegial sedangkan sistem presidensiil memiliki eksekutif non kolegial (satu orang)
4. Usaha Sutan Sjahrir untuk menerapkan sistem parlementer di Indonesia. Ada beberapa langkah untuk menerapkan sistem parlementer di Indonesia yaitu:
- a. Langkah pertama: mengubah status KNIP dari Badan Pembantu Presiden menjadi Badan Legislatif. Perubahan ini dilakukan melalui Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1946.
 - b. Langkah kedua: mendirikan partai-partai politik. Konsekwensi dari adanya badan legislatif adalah perlu dibentuknya partai-partai politik yang akan memperebutkan kursi di legislatif. Untuk itu maka dikeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang anjuran mendirikan partai politik.
 - c. Langkah ketiga: Merobah pertanggungjawaban menteri dari presiden kepada Badan Perwakilan Rakyat. Perubahan ini dituangkan dalam Pengumuman Badan Pekerja KNIP pada tanggal 11 Nopember 1945



- d. Langkah keempat: Membentuk Kabinet Parlemerter yang pertama melalui Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945.
5. Tantangan untuk menerapkan sistem parlementer pada masa awal kemerdekaan:
- a. Situasi revolusi tidak memungkinkan berkembangnya sistem parlementer. Sebab situasi revolusi membutuhkan pemimpin yang kuat bila perlu memiliki kekuasaan yang besar agar bisa memimpin dan mempengaruhi orang banyak.
 - b. Pertentangan kepentingan antara partai/kelompok menyebabkan sistem parlementer tidak bisa berjalan teratur.

IV. Kegiatan Pembelajaran

- a. Apersepsi
- b. Pembahasan dengan metode ceramah dan tanya jawab
 - ❖ Tanyajawab dan penjelasan tentang sistem pemerintahan presidensiil.
 - ❖ Tanyajawab dan penjelasan tentang sistem pemerintahan parlementer
 - ❖ Tanyajawab dan penjelasan tentang Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer
 - ❖ Tanyajawab dan penjelasan tentang usaha Sutan Sjahrir dalam menerapkan sistem parlementer di Indonesia.
 - ❖ Tanyajawab dan penjelasan tentang tantangan dalam menerapkan sistem parlementer pada masa awal kemerdekaan.

V. Metode: ceramah berfariasi dengan tanya jawab

VI. Alat dan Sumber bahan Pelajaran

- a. Alat:
- b. Sumber bahan:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Suprpto, Bibit. (1985). *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
2. Kahin, George Mc Turnan. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Solo: UNS Press dan Pustaka Sinar harapan
3. Malaka, Tan. (2000). *Dari Penjara ke Penjara Bagian Tiga*, Yogyakarta: Teplok Press
4. Moedjanto, G (1988), *Indonesia Abad ke-20 Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati*, Yogyakarta: Kanisius.
5. Mrazek, Rudolf. (1996). *Sjahir Politik dan Pengasingan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
6. Nasution, A.H. (1996), *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* Jilid I, Bandung: Disjarah-AD & Angkasa.
7. Nasution, A.H. (1996), *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* Jilid II, Bandung: Disjarah-AD & Angkasa
8. Nasution, A.H. (1996), *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* Jilid III, Bandung: Disjarah-AD & Angkasa
9. Pringgodigdo, Abdul Faffar. (1955). *Perubahan Kabinet Presidensial Menjadi Kabinet Parlementer*, Jogjakarta: Jajasan Fonds Universitas Negeri Gadjah Mada.

VII. Penilaian / evaluasi:

- a. Prosedur Penilaian: Evaluasi tertulis
- b. Alat Penilaian: butir-butir soal:
 1. Jelaskan tentang sistem pemerintahan presidensiil.
 2. Jelaskan tentang sistem pemerintahan parlementer
 3. Jelaskan Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

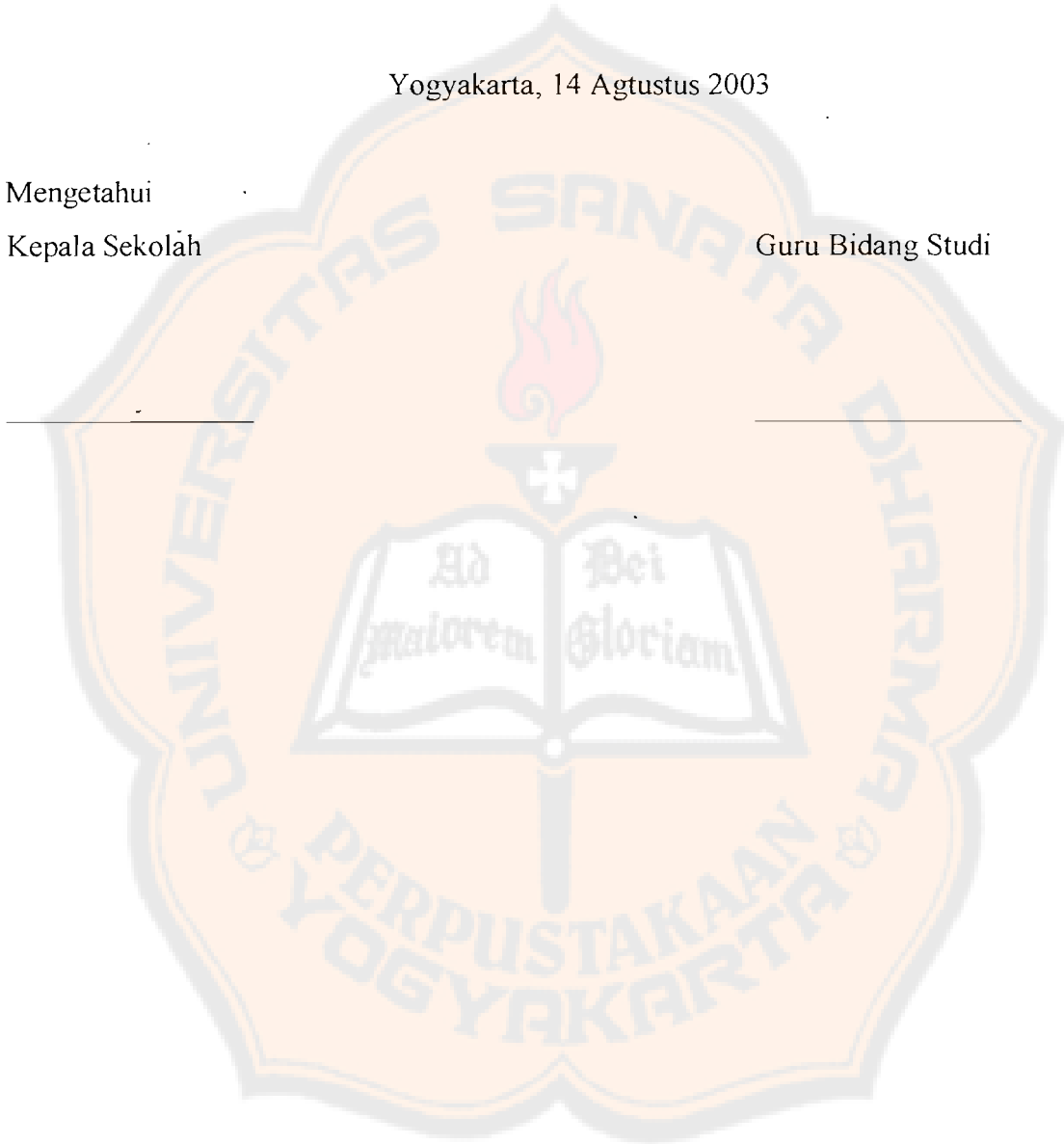
4. Jelaskan usaha Sutan Sjahrir dalam menerapkan sistem parlementer di Indonesia.
5. Jelaskan tantangan dalam menerapkan sistem parlementer pada masa awal kemerdekaan.

Yogyakarta, 14 Agustus 2003

Mengetahui

Kepala Sekolah

Guru Bidang Studi



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 6:

SATUAN PELAJARAN 2

Program Pendidikan : Ilmu Pengetahuan Sosial

Mata Pelajaran : Sejarah

Pokok Bahasan : Masa Kemerdekaan

Sub Pokok Bahasan : Perubahan dan perkembangan masyarakat dan pemerintahan pada masa awal kemerdekaan

Sub-sub Pokok Bahasan: Pemerintahan Kabinet Sjahrir I

Alokasi waktu : 2 X 45 menit

Kelas / Semester : III SMU / I

Pertemuan : II

I. Standar Kompetensi

Merekonstruksi berbagai perubahan, dan perkembangan masyarakat dan pemerintahan pada masa awal kemerdekaan

II. Kompetensi Minimal:

Setelah mengikuti pelajaran, diharapkan siswa mampu:

1. Latar belakang pembentukan Kabinet Sjahrir I
2. menjelaskan usaha Kabinet Sjahrir I dalam mempertahankan kemerdekaan
3. Menjelaskan usaha Kabinet Sjahrir I dalam menata kehidupan militer
4. Menjelaskan usaha Kabinet Sjahrir I dalam menata birokrasi pemerintahan
5. Menjelaskan usaha Kabinet Sjahrir I dalam menata kehidupan ekonomi
6. menguraikan tantangan dari dalam negeri yang dihadapi Kabinet Sjahrir I
7. Menjelaskan tantangan dari luar negeri yang dihadapi Kabinet Sjahrir I
8. menguraikan sebab-sebab jatuhnya kabinet Sjahrir I

III. Materi

1. Latar belakang pembentukan kabinet sjahrir I adalah adanya kritikan atau ketidakpuasan baik dari dalam maupun dari luar negeri tentang pemerintahan Kabinet Presidensiil. Kritikan-kritikan itu sangat mengganggu perjuangan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk menghilangkan hambatan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan maka dibentuklah kabinet baru yang lebih sesuai dengan harapan baik dari dalam maupun dari luar negeri.

2. Usaha Kabinet Sjahrir I dalam mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - a. dengan strategi diplomasi
 - b. dengan strategi perjuangan fisik
3. Usaha Kabinet Sjahrir I dalam menata kehidupan militer: Kabinet Sjahrir I mulai membentuk militer dengan jalan mengubah fungsi Badan Keamanan Rakyat dari suatu Badan Penolong Korban Perang menjadi suatu kekuatan bersenjata. Yang selanjutnya tanggal 5 Oktober diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Lalu diubah lagi menjadi Tentara Keamanan Rakyat dan akhirnya Tentara Republik Indonesia.
4. Usaha Kabinet Sjahrir I dalam menata kehidupan ekonomi dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - a. Menjaga agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga
 - b. Menghidupkan lagi kehidupan ekonomi yang mati selama masa pendudukan Jepang
5. Usaha Kabinet Sjahrir I dalam menata birokrasi Pemerintahan: dengan membentuk pemerintahan di daerah-daerah berdasarkan UU No. 1 tanggal 23 September 1945.
6. Tantangan dari dalam negeri yang dihadapi Kabinet Sjahrir I:
 - a. Tantangan dari anggota kabinet lama yang sakit hati karena diberhentikan dari jabatannya dan tidak diangkat lagi dalam kabinet yang baru.
 - b. Tantangan dari kelompok Tan Malaka dengan organisasinya Persatuan Perjuangan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- c. Tantangan dari pihak militer yang sakit hati atas serangan Sjahrir dalam pamflet *Perjuangan Kita*
7. Tantangan dari luar negeri yang dihadapi Kabinet Sjahrir I berasal dari Belanda dan Sekutu yang selalu berusaha menguasai kembali Indonesia.
8. Jatuhnya Kabinet Sjahrir I
Sebab-sebab jatuhnya Kabinet Sjahrir I:

- a. Munculnya sosok Tan Malaka dengan program minimumnya.
- b. Tantangan dari kelompok militer
- c. Tantangan dari kelompok yang tidak senang dengan Kabinet Sjahrir I terutama para mantan anggota kabinet Presidensiil.

IV. Kegiatan Pembelajaran

- a. Apersepsi
- b. Pembahasan dengan metode diskusi
 - ❖ Mendiskusikan tentang latarbelakang pembentukan Kabinet Sjahrir I
 - ❖ Mendiskusikan tentang usaha kabinet Sjahrir I dalam mempertahankan kemerdekaan
 - ❖ Mendiskusikan tentang usaha Kabinet Sjahrir I dalam menata kehidupan militer
 - ❖ Mendiskusikan tentang usaha Kabinet Sjahrir I dalam menata birokrasi pemerintahan
 - ❖ Mendiskusikan tentang usaha Kabinet Sjahrir I dalam menata kehidupan ekonomi
 - ❖ Mendiskusikan tentang tantangan dari dalam negeri yang dihadapi Kabinet Sjahrir I
 - ❖ Mendiskusikan tentang tantangan dari luar negeri yang dihadapi Kabinet Sjahrir I
 - ❖ Mendiskusikan tentang sebab-sebab jatuhnya kabinet Sjahrir I

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

V. Metode: diskusi

VI. Alat dan Sumber bahan Pelajaran

a. Alat:

b. Sumber bahan:

1. Suprpto, Bibit. (1985). *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
2. Kahin, George Mc Turman. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Solo: UNS Press dan Pustaka Sinar harapan
3. Malaka, Tan. (2000). *Dari Penjara ke Penjara Bagian Tiga*, Yogyakarta: Teplok Press
4. Moedjanto, G (1988), *Indonesia Abad ke-20 Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati*, Yogyakarta: Kanisius.
5. Mrazek, Rudolf. (1996). *Sjahir Politik dan Pengasingan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
6. Nasution, A.H. (1996), *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* Jilid I, Bandung: Disjarah-AD & Angkasa.
7. Nasution, A.H. (1996), *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* Jilid II, Bandung: Disjarah-AD & Angkasa
8. Nasution, A.H. (1996), *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* Jilid III, Bandung: Disjarah-AD & Angkasa
9. Pringgodigdo, Abdul Faffar. (1955). *Perubahan Kabinet Presidensil Menjadi Kabinet Parlementer*, Jogjakarta: Jajasan Fonds Universitas Negeri Gadjah Mada.

VII. Penilaian / evaluasi:

a. Prosedur Penilaian: Evaluasi tertulis

b. Alat Penilaian: butir-butir soal:

1. Jelaskan latar belakang pembentukan Kabinet Sjahrir I

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



2. Jelaskan usaha kabinet Sjahrir I dalam mempertahankan kemerdekaan
3. Jelaskan usaha Kabinet Sjahrir I dalam menata kehidupan militer
4. Jelaskan usaha Kabinet Sjahrir I dalam menata birokrasi pemerintahan
5. Jelaskan usaha Kabinet Sjahrir I dalam menata kehidupan ekonomi
6. Jelaskan tantangan dari dalam negeri yang dihadapi Kabinet Sjahrir I
7. Jelaskan tantangan dari luar negeri yang dihadapi Kabinet Sjahrir I
8. Jelaskan sebab-sebab jatuhnya kabinet Sjahrir I

Yogyakarta, 14 Agustus 2003

Mengetahui
Kepala Sekolah

Guru Bidang Studi